



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten Asmat Tahun 2016, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang



- Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Asmat;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja lembaga Teknis Daerah Kabupaten Asmat;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Asmat Tahun 2016-2021; dan
 16. Peraturan Bupati Asmat Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Asmat Tahun 2016-2021.

1.2 GAMBARAN UMUM

Dasar pembentukan Kabupaten Asmat adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua.

Secara geografis terletak diantara 137⁰ - 140⁰ bujur timur dan 4⁰ - 7⁰ lintang selatan, dengan luas wilayah \pm 31.984 km² yang secara administratif terdiri dari 23 distrik dan 224 kampung, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Nduga dan Kabupaten Yahukimo;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi dan Laut Arafura;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Mappi; dan
- Sebelah barat berbatasan dengan Laut Arafura dan Kabupaten Mimika.



Topografi Kabupaten Asmat sebagian besar adalah landai dengan ketinggian 0-100 mdpl hanya sebagian kecil dari wilayah kabupaten yang berupa perbukitan di sebagian Distrik Suru-Suru, Distrik Suator dan Distrik Kolof Brasa.

Jumlah penduduk sebanyak 90.730 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 46.801 jiwa dan perempuan 43.929 jiwa dengan kepadatan hanya sebesar 2,84 jiwa/km². Adapun persebaran penduduk per distrik dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut :

**Tabel 1.1
Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatannya
di Kabupaten Asmat
Tahun 2016**

No.	Distrik	Jumlah Kampung	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk			Kepadatan (jiwa/km ²)
				L (jiwa)	P (jiwa)	Jumlah	
1.	Agats	12	1.358	7.984	6.893	14.877	10,95
2.	Atsj	9	2.281	3.186	3.044	6.230	2,73
3.	Sawa Erma	10	1.372	3.551	3.445	6.996	5,10
4.	Pantai Kasuari	9	798	2.303	2.063	4.366	5,47
5.	Akat	11	3.818	2.078	2.039	4.117	1,08
6.	Fayit	23	1.600	4.356	4.069	8.425	5,27
7.	Suator	17	2.466	2.765	2.559	5.324	2,16
8.	Suru-Suru	23	1.987	979	977	1.956	0,98
9.	Unir Sirau	9	1.218	1.842	1.716	3.558	2,92
10.	Kolof Brasa	21	1.607	1.186	1.113	2.299	1,43
11.	Joerat	6	1.191	1.379	1.311	2.690	2,26
12.	Pulau Tiga	11	3.378	1.668	1.582	3.250	0,96
13.	Jetsy	8	1.218	1.030	1.109	2.139	1,76
14.	Der Koumur	9	1.144	2.454	2.373	4.827	4,22
15.	Safan	12	1.117	3.369	3.280	6.649	5,95
16.	Kopay	10	973	1.706	1.603	3.309	3,40
17.	Siret	8	2.128	2.015	1.782	3.797	1,78
18.	Ayib	6	1.387	1.573	1.465	3.038	2,19
19.	Bets Bamu	7	948	1.377	1.506	2.883	3,04
Jumlah		221	31.984	46.801	43.929	90.730	63,67

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Asmat Tahun 2016*



Distrik Akat merupakan distrik dengan luas wilayah terbesar yaitu 11,94% dari total luas wilayah kabupaten, kemudian diikuti oleh Distrik Pulau Tiga sebesar 10,56%, sedangkan Distrik Pantai Kasuari adalah distrik dengan luas wilayah paling kecil yaitu 2,50% terhadap luas wilayah kabupaten. Kepadatan penduduk tertinggi adalah di Distrik Agats yang merupakan distrik di ibukota kabupaten yaitu sebesar 10,95% atau 17,20%. Kepadatan penduduk terendah adalah di Distrik Pulau tiga yang hanya 0,96% atau 1,51% dari total kepadatan penduduk terhadap luas wilayah distrik.

1.3 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Perangkat daerah Kabupaten Asmat dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat dewan, dinas-dinas daerah dan lembaga teknis daerah dan distrik sesuai dengan kebutuhan daerah.

Adapun susunan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asmat tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah, terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Staf Ahli Bupati yang terdiri dari :
 1. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik, Pemerintahan dan Pembangunan; dan
 2. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia, Ekonomi dan Keuangan.
 - c. Asisten Sekretaris Daerah, yang terdiri dari :
 1. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang membawahi :
 - a. Bagian Tata Pemerintahan;
 - b. Bagian Hubungan Masyarakat; dan
 - c. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
 2. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan dan Perekonomian, yang membawahi :
 - a. Bagian Administrasi Pembangunan;
 - b. Bagian Administrasi Perekonomian; dan
 - c. Bagian Arsip dan Perpustakaan Daerah.



3. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi dan Umum, yang membawahi :
 - a. Bagian Hukum;
 - b. Bagian Organisasi; dan
 - c. Bagian Umum.

2. Sekeratarariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat Dewan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat, terdiri dari :
 - a. Sekretaris Dewan;
 - b. Bagian Umum;
 - c. Bagian Persidangan dan Pengkajian Produk Hukum; dan
 - d. Bagian Keuangan.

Dinas-dinas daerah dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Asmat, yang terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum;
4. Dinas Tenaga Kerja, Pemukiman dan Perumahan Rakyat;
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
6. Dinas Kesejahteraan Sosial;
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
9. Dinas Kehutanan;
10. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan;
11. Dinas Kelautan dan Perikanan;
12. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; dan
13. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.



Lembaga teknis daerah dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Asmat, yang terdiri dari :

1. Inspektorat;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Badan Kepegawaian Daerah;
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung;
6. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
7. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja; dan
8. Rumah Sakit Umum Daerah.

Adapun lembaga lain adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asmat.

Distrik merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh kepala distrik yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Distrik di Kabupaten Asmat yang dibentuk sejak tahun 2002 sampai dengan 2016 sebanyak 23 Distrik, dengan dasar pembentukan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan 14 Kabupaten di Propinsi Papua, Kabupaten Asmat terdiri dari :
 1. Distrik Agats;
 2. Distrik Atsj;
 3. Distrik Sawa Erma;
 4. Distrik Pantai Kasuari;
 5. Distrik Akat;
 6. Distrik Fayit;
 7. Distrik Suator;
2. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009, terdiri dari :
 8. Distrik Suru Suru
3. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010, terdiri dari :
 9. Distrik Unir Sirau;
 10. Distrik Kolof Brasa;



4. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 12 terdiri dari :
 11. Distrik Joerat;
 12. Distrik Pulau Tiga;
 13. Distrik Jetsy;
 14. Distrik Der Koumur;
 15. Distrik Safan;
 16. Distrik Kopay;
 17. Distrik Siret;
 18. Distrik Ayib;
 19. Distrik Bets Bamu;

5. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 terdiri dari :
 20. Distrik Aswi;
 21. Distrik Awyu;
 22. Distrik Joutu; dan
 23. Distrik Koroway Buluanop.

1.4 SUMBER DAYA APARATUR

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang bekerja di Kabupaten Asmat sampai dengan akhir tahun 2016 berjumlah 2.625 orang pegawai, yang terdiri dari PNSD Golongan I sebanyak 203 orang pegawai, Golongan II sebanyak 1.076 orang pegawai, Golongan III sebanyak 1.123 orang pegawai, dan Golongan IV sebanyak 223 orang pegawai. Persentase terbanyak diisi oleh PNSD Golongan III yaitu 42,78%, kemudian diisi oleh Golongan II sebanyak 40,99%. Persentase terkecil diisi oleh PNSD Golongan I yaitu sebanyak 7,73%, sedangkan PNSD Golongan IV sebanyak 8,50%. Adapun jumlah PNSD berdasarkan Golongan Ruang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Kabupaten Asmat
Berdasarkan Golongan Ruang
Tahun 2016

No	Pangkat	Gol. Ruang	Eselon			Non Eselon		Jumlah
			II	III	IV	Tenaga Fungsional	Staf Pelaksana	
1.	Golongan I		-	-	-	-	203	203
	- Juru Muda	I/a	-	-	-	-	66	66
	- Juru Muda TK. I	I/b	-	-	-	-	62	62



No	Pangkat	Gol. Ruang	Eselon			Non Eselon		Jumlah
			II	III	IV	Tenaga Fungsional	Staf Pelaksana	
	- Juru	I/c	-	-	-	-	53	53
	- Juru TK. I	I/d	-	-	-	-	22	22
2	Golongan II		-	-	51	467	558	1.076
	- Pengatur Muda	II/a	-	-	1	64	117	182
	- Pengatur Muda TK. I	II/b	-	-	13	68	236	317
	- Pengatur	II/c	-	-	19	201	131	351
	- Pengatur TK. I	II/d	-	-	18	134	74	226
3.	Golongan III		-	85	313	480	245	1.123
	- Penata Muda	III/a	-	7	47	189	109	352
	- Penata Muda TK. I	III/b	-	12	81	163	84	340
	- Penata	III/c	-	19	119	70	28	236
	- Penata TK. I	III/d	-	47	66	58	24	195
4.	Golongan IV		21	51	12	122	17	223
	- Pembina	IV/a	4	35	12	121	9	181
	- Pembina TK. I	IV/b	8	16	-	1	7	32
	- Pembina Utama Muda	IV/c	9	-	-	-	1	10
	- Pembina Utama Madya	IV/d	-	-	-	-	-	-
	- Pembina Utama	IV/e	-	-	-	-	-	-
	Jumlah		21	136	376	1.069	1.023	2.625

*Sumber :
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Asmat Tahun 2017*

Adapun keadaan PNSD berdasarkan tingkat pendidikan paling banyak adalah yang berpendidikan Sarjana yaitu sebanyak 37,83% dari keseluruhan jumlah PNSD yang ada, kemudian diikuti oleh PNSD dengan ijazah SMA dengan persentase sebesar 27,20%. PNSD dengan ijazah magister hanya berjumlah 2,55%. Selanjutnya keadaan PNSD berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut :

**Tabel 1.3
Keadaan PNSD Kabupaten Asmat Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2016**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase
1.	SD / sederajat	108	4,11
2.	SLTP / sederajat	95	3,62



No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase
3.	SLTA / sederajat	714	27,20
4.	Diploma	648	24,69
5.	Sarjana (S1)	993	37,83
6.	Magister (S2)	67	2,55
7.	Doktoral (S3)	-	0,00
Jumlah		2.625	100,00

*Sumber :
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Asmat
Tahun 2017*

Penyebaran PNSD terbesar dengan persentase sebesar 29,07% berada di sekolah-sekolah, kemudian diikuti dengan penyebaran PNSD di distrik-distrik dengan persentase sebanyak 16,15% dan di puskesmas-puskesmas dengan persentase penyebarannya sebanyak 8,50%. Penyebaran PNSD dan tenaga honorer di Kabupaten Asmat disajikan pada tabel 1.4 berikut ini :

**Tabel 1.4
Penyebaran PNSD dan Tenaga Honorer sdi Kabupaten Asmat
Tahun 2016**

No.	Satuan Kerja	PNSD					Tenaga Honorer
		I	II	III	IV	Jml	
1.	Sekretariat Daerah	3	56	71	15	145	93
2.	Sekretariat Dewan	4	19	22	4	49	116
3.	Inspektorat	0	5	18	6	29	7
4.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	1	18	27	10	56	24
5.	Dinas Kesehatan	1	12	35	3	51	51
6.	Dinas Pekerjaan Umum	3	27	17	5	52	18
7.	Dinas Tenaga Kerja, Pemukiman dan Perumahan Rakyat	-	10	17	4	31	12
8.	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6	16	9	2	43	49
9.	Dinas Kesejahteraan Sosial	-	8	17	4	29	9
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	9	17	8	35	21
11.	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	2	21	24	4	51	21
12.	Dinas Kehutanan	-	19	32	2	53	13
13.	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	1	17	48	2	68	101
14.	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	28	23	4	55	32



**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN ASMAT
TAHUN 2016**

No.	Satuan Kerja	PNSD					Tenaga Honorer
		I	II	III	IV	Jml	
15.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1	19	24	3	47	19
16.	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1	34	36	6	77	55
17.	Badan Kepegawaian Daerah	-	21	19	3	43	19
18.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	13	27	4	45	23
19.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	10	12	6	29	13
20.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	-	18	20	2	40	21
21.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	5	9	2	15	18
22.	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	-	22	16	2	40	12
23.	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	-	18	6	1	25	56
24.	Rumah Sakit Umum Daerah	-	69	34	1	104	151
25.	Distrik	108	172	145	2	424	97
26.	Puskesmas	5	160	58	-	223	-
27.	Sekolah	64	251	330	118	763	659
Jumlah		203	1.076	1.123	223	2.625	1.710

*Sumber :
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Asmat
Tahun 2017*

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Asmat Tahun 2016 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, dasar hukum, gambaran umum, organisasi perangkat daerah, sumber daya aparatur dan sistematika.

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Berisi tentang visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program, indikator makro dan penetapan kinerja.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Berisi tentang kerangka pengukuran kinerja, capaian indikator makro, capaian indikator sasaran dan indikator kinerja utama serta evaluasi indikator kinerja.

BAB IV PENUTUP

Berisi tentang ringkasan pembahasan, permasalahan dan saran perbaikan.



BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan dan tantangan lingkungan strategis lokal, nasional dan global serta berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat maka pemerintah daerah harus segera berbenah dan terus menerus melakukan perubahan yang konsisten dan berkelanjutan seiring dengan kemajuan dan tuntutan profesionalisme sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan tujuan sebagaimana diharapkan.

Rencana strategis merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang ada dalam suatu wilayah pemerintahan dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan, antisipatif, beradaptasi terhadap perubahan, mampu mengorganisasikan pelaksanaannya, dapat diukur pencapaiannya secara rasional dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Rencana strategis ini setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis serta mampu mengantisipasi perubahan yang mungkin dan akan ditimbulkan seiring dengan kemajuan masyarakat yang diakibatkan semakin berkembangnya lingkungan strategis, nasional dan global.

Pemerintah Kabupaten Asmat telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Asmat Tahun 2016-2021 sebagai arah dan kebijakan pembangunan selama kurun waktu lima tahun kedepan. Penjabaran lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Asmat Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Asmat Tahun 2016-2021. Indikator Kinerja Utama ini sebagai dasar dan pedoman satuan kerja perangkat daerah untuk mewujudkan visi dan misi sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan lima tahunan.



2.1 VISI DAN MISI

2.1.1 VISI

Visi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 12 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan.

Masyarakat yang sejahtera dapat dimaknai sebagai kondisi dimana masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya dan ekonomi terutama pangan, sandang dan papan yang selayaknya secara merata disamping rasa aman dan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah sehingga masyarakat dapat menikmati kehidupan yang lebih baik dan lebih maju serta memiliki pilihan yang luas dalam perjalanan kehidupannya. Untuk menjawab hal tersebut, dalam dokumen RPJMD Kabupaten Asmat Tahun 2016-2021, visi pemerintah daerah lima tahun kedepan yang hendak dicapai adalah **“Terwujudnya Kabupaten Asmat yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat”**.

Memperhatikan visi tersebut di atas, terdapat tiga kata kunci yang saling berkaitan dan melengkapi satu dengan lainnya yaitu, *Pertama* adalah maju yang merupakan kondisi yang memungkinkan terwujudnya kesejahteraan dan bermartabat. *Kedua* adalah sejahtera yang memberikan pondasi bagi terbangunnya martabat serta *Ketiga* adalah martabat yang merupakan wujud sekaligus elemen penting dari kemajuan dan kesejahteraan Masyarakat Asmat.

Asmat yang Maju dapat diartikan sebagai satu kesatuan wilayah berkembang dan berubah kearah yang lebih baik dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan yang dimiliki yang tercermin dari makin meningkatnya kualitas layanan pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi berbasis komoditas lokal serta peningkatan dalam tata kelola pemerintahan.

Asmat yang Sejahtera dapat dipahami sebagai kondisi yang tidak kekurangan dan adanya perasaan aman yang tidak saja dari segi lahiriah tetapi juga dari sisi batiniah. Dalam konsep makro, pembangunan daerah



juga dimaknai sebagai upaya mencapai kesejahteraan sosial, peningkatan kualitas kehidupan ekonomi serta sosial dan budaya dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dengan mendorong peningkatan sektor-sektor potensial yang dimiliki.

Asmat yang Bermartabat dapat dimaknai sebagai suatu tatanan kehidupan dan penghidupan yang dilandasi oleh nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang memungkinkan setiap masyarakat di kabupaten ini untuk terpenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial baik sebagai diri pribadi, keluarga dan satu komunitas masyarakat dan daerah dengan berlandaskan pada identitas dan jati diri orang asmat.

2.1.2 MISI

Misi pembangunan disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan Visi Kabupaten Asmat. Rumusan misi menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang hendak dicapai dalam rangka perwujudan visi tersebut. Adapun misi yang dituangkan dalam dokumen RPJMD adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Membangun birokrasi yang bersih, responsif, transparan dan akuntabel

Merupakan basis kebijakan pemerintah daerah dalam memperkuat peran dan fungsi kelembagaan pemerintah daerah agar sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan. Menempatkan pejabat sesuai dengan kompetensi serta menciptakan harmonisasi demokrasi lokal agar senantiasa dapat diandalkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mempunyai kinerja yang optimal guna membangun dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah serta menciptakan kondisi yang memungkinkan (*enabling environment*) pelaksanaan dan keberhasilan seluruh misi.

Misi 2 : Meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas akses pendidikan

Merupakan dasar pijakan bagi pemerintah daerah dalam mengakselerasikan peningkatan kapasitas sumber daya



manusia, baik dari sisi aparatur pemerintah maupun masyarakat sebagai pelaku dan penggerak pembangunan. Selain itu juga ditujukan untuk dapat menghasilkan para pelaku pembangunan yang sehat, terampil, terdidik, kreatif dan berwawasan luas. Pembangunan sumber daya manusia juga ditekankan pada upaya menghasilkan manusia-manusia yang tidak melupakan jati diri dan budaya yang ada.

Misi 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan

Merupakan basis kebijakan yang menjadi semangat pemerintah daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat agar mampu menjadi komunitas yang produktif dalam mendorong kemajuan sosial, ekonomi dan peradaban masyarakat asmat dimasa yang akan datang.

Misi 4 : Mendorong pemberdayaan ekonomi kerakyatan

Merupakan dasar bagi kebijakan fasilitasi pemerintah daerah dalam mengkorvesi potensi ekonomi daerah terutama dibidang pertanian, kelautan dan perikanan serta pariwisata menjadi pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkualitas serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Misi 5 : Mempercepat pembangunan infrastruktur dan memperluas lapangan kerja

Dimaksudkan untuk menjadi pondasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam mepercepat pembangunan infrastruktur daerah yang memberi dampak pada penguatan daya saing ekonomi daerah sesuai dengan potensi ekonomi yang dimiliki terutama pada sektor pariwisata, perikanan dan kelautan, disamping juga untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan.

Misi 6 : Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik

Dimaksudkan untuk menjadi dasar kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga terciptanya harmonisasi para pelaku pembangunan yang secara bersama-sama melalui mekanisme partisipatif.



2.2 TUJUAN DAN SASARAN

2.2.1 TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktifitas lembaga dalam melaksanakan misinya.

Tujuan pembangunan yang ingin dicapai Tahun 2016-2021 di Kabupaten Asmat adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih dan transparan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima bagi masyarakat;
2. Mewujudkan peningkatan kehidupan masyarakat yang aman, tertib dalam panji demokrasi dan wawasan kebangsaan;
3. Mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas;
4. Mewujudkan peningkatan peran serta dan partisipasi pemuda dalam pembangunan;
5. Terbangunnya dasar bagi pelestarian dan pengembangan kebudayaan Asmat;
6. Mewujudkan peningkatan taraf kesehatan masyarakat secara berkelanjutan;
7. Mewujudkan pengarusutamaan gender dan keluarga sejahtera berkualitas;
8. Mewujudkan penataan kependudukan dan pencatatan sipil;
9. Mewujudkan pembangunan sektor ekonomi daerah yang berbasis pada penciptaan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat;
10. Mewujudkan pembangunan sektor pariwisata minat khusus yang berbasis pada kekayaan adat dan budaya Asmat;
11. Mewujudkan peningkatan ketersediaan jaringan infrastruktur dasar daerah dalam mendukung percepatan pembangunan daerah di berbagai bidang;



12. Mewujudkan pengembangan sistem transportasi dan telekomunikasi yang handal dan efisien;
13. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah;
14. Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan dan penanggulangan bencana yang handal; dan
15. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat berbasis kampung dan perlindungan sosial.

2.2.2 SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai Tahun 2016-2021 di Kabupaten Asmat, yaitu :

1. Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah daerah;
2. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional dan bertanggungjawab;
3. Terwujudnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas, aplikatif dan responsif;
4. Terwujudnya peningkatan kenyamanan dan ketertiban umum;
5. Terwujudnya peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas;
6. Terwujudnya peningkatan kualitas generasi muda yang sehat jasmani dan rohani dan berdaya saing;
7. Peningkatan eksistensi adat dan budaya Asmat yang dapat mewarnai dan menjadi semangat dalam berbagai aktifitas;
8. Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat;
9. Meningkatnya jangkauan dan intensitas pelayanan keluarga berencana;
10. Meningkatnya upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
11. Terwujudnya pelayanan kependudukan yang prima;



12. Terwujudnya pengembangan sektor kelautan dan perikanan yang berbasis potensi unggulan;
13. Terwujudnya peningkatan ketersediaan bahan pangan utama dan keragaman pangan lokal;
14. Terwujudnya peningkatan produktifitas hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan;
15. Meningkatnya pemberdayaan usaha kecil menengah dan koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat;
16. Terwujudnya masyarakat Asmat sadar budaya dan wisata dalam rangka mendukung perwujudan Kabupaten Asmat sebagai daerah tujuan wisata minat khusus;
17. Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah secara konsisten;
18. Terwujudnya peningkatan ketersediaan infrastruktur pengairan yang berkualitas dan merata;
19. Terwujudnya peningkatan kualitas jalan dan jembatan;
20. Terwujudnya pemukiman layak huni;
21. Terwujudnya peningkatan ketersediaan infrastruktur perhubungan darat, laut dan udara guna memperlancar arus orang dan barang dari dan ke Asmat;
22. Terwujudnya peningkatan jaringan komunikasi yang handal;
23. Terwujudnya peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja yang selaras dengan perkembangan ekonomi daerah;
24. Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam yang berkelanjutan;
25. Terwujudnya sistem kewaspadaan dini terhadap bencana;
26. Terwujudnya peningkatan upaya pemberdayaan sosial masyarakat;
27. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup masyarakat kampung berbasis kearifan lokal;
28. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam praktek demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan.

2.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

2.3.1 STRATEGI

Adapun strategi yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Asmat Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :



1. Menata struktur kelembagaan pemerintah daerah sesuai dengan asas miskin struktur kaya fungsi;
2. Menciptakan harmonisasi kehidupan demokrasi lokal;
3. Meningkatkan sistem akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
4. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;
5. Meningkatkan manajemen dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Asmat;
6. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah;
7. Peningkatan kualitas dan proses penyusunan APBD;
8. Peningkatan pelayanan penatusahaan, akuntansi dan pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan daerah;
9. Mewujudkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas, aplikatif dan responsif;
10. Meningkatkan pemberdayaan potensi dan kenyamanan dan ketertiban umum; dan
11. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam praktek demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan.

2.3.2 KEBIJAKAN

Kebijakan merupakan arah atau pedoman untuk menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan dalam mencapai tujuan. Kebijakan merupakan kumpulan keputusan-keputusan pimpinan yang menentukan tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan atau dengan kata lain kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu sehingga pada dasarnya kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program atau kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, misi dan visi instansi pemerintah.

Kebijakan yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Asmat Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Kajian restrukturisasi kelembagaan pemerintah daerah;
2. Penyiapan perangkat regulasi kelembagaan pemerintah daerah;
3. Penataan kelembagaan pemerintah daerah dengan asas miskin struktur kaya fungsi;



4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan;
5. Membangun komunikasi intensif dan setara antara pemerintah daerah dan DPRD;
6. Peningkatan aspirasi dan komunikasi DPRD dengan konstituen serta masyarakat di distrik dan kampung;
7. Peningkatan penataan *rule of law* dalam kehidupan demokrasi di daerah;
8. Membangun komunikasi yang harmonis dengan berbagai *stakeholder* dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
9. Implementasi Sistem Pengawasan Instansi Pemerintah;
10. Pengawasan internal secara reguler dan khusus;
11. Tindak lanjut hasil pemeriksaan dan gelar pengawasan;
12. Bimbingan teknis dan pelatihan bagi aparatur pengawasan;
13. Pendidikan dan pelatihan struktural kepemimpinan tingkat IV, III dan II;
14. Pendidikan dan pelatihan prajabatan Golongan II dan III;
15. Pendidikan dan pelatihan teknis;
16. Pelayanan kepegawaian;
17. Seleksi penerimaan calon PNSD;
18. Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNS;
19. Monitoring kepegawaian;
20. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur melalui jenjang pendidikan formal;
21. Peningkatan optimalisasi pengelolaan pendapatan asli daerah;
22. Penggalian sumber pendapatan daerah diluar pendapatan konvensional;
23. Penataan regulasi pendapatan daerah;
24. Peningkatan sumber daya manusia di bidang pendapatan daerah;
25. Penyusunan APBD tepat waktu dan berkualitas;
26. Pemantapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah;
27. Meningkatkan kualitas pengelola aset daerah;
28. Meningkatkan kualitas pelayanan penatausahaan keuangan daerah yang lebih profesional;
29. Meningkatkan kualitas implementasi sistem akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;
30. Penguatan penyediaan data daerah sektoral dan spasial untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah;
31. Peningkatan kerjasama pembangunan;



32. Penyusunan dokumen perencanaan daerah berbasis sektoral dan spasial;
33. Peningkatan kerjasama pembangunan;
34. Peningkatan aktualisasi potensi wilayah perbatasan sebagai wilayah yang maju;
35. Peningkatan kualitas aktifitas forum keamanan dan kenyamanan masyarakat;
36. Peningkatan sosialisasi dan kesadaran masyarakat untuk menjaga kenyamanan dan ketertiban umum;
37. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang wawasan kebangsaan;
38. Peningkatan kesigapan aparaturnya dalam menangani berbagai kasus pelanggaran ketertiban umum;
39. Peningkatan kapasitas dan kecukupan tenaga pengamanan berbasis swadaya masyarakat;
40. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum;
41. Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat dalam pembangunan daerah; dan
42. Peningkatan kesadaran komponen masyarakat dalam mengatasi konflik.

2.4 PROGRAM

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistemik dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa organisasi ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Adapun program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Asmat dalam RPJMD Tahun 2016-2021 adalah sebanyak 258 program, yang terdiri dari 141 program urusan pemerintahan wajib dan 117 program urusan pemerintahan pilihan.

2.5 INDIKATOR MAKRO

Rancangan pembangunan manusia sesungguhnya adalah menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan sebagai alat bagi pembangunan. Agar konsep pembangunan manusia dapat diterjemahkan kedalam perumusan kebijakan, pembangunan manusia harus dapat diukur



dan dipantau dengan mudah. *Human Development Report (HDR)* telah mengembangkan dan menyempurnakan pengukuran statistik dari pembangunan manusia yaitu berupa *Human Development Index (HDI)* atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pengukurannya meliputi tingkat harapan hidup (*longevity*), tingkat pendidikan (*knowledge*), standar hidup (*decent living*).

Tabel 2.1
Target Indikator Makro Pembangunan Daerah
Tahun 2016-2021

No.	Indikator	Target					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Indeks Pembangunan Manusia	46.33	46.74	47.16	47.57	47.99	48.40
2.	Tingkat Kemiskinan	28.83	28.57	28.30	28.03	27.77	27.50
3.	Pertumbuhan Ekonomi	6.60	6.68	6.76	6.84	6.92	7.00
4.	Indeks Kesejangan Pendapatan	0.36	0.34	0.32	0.29	0.27	0.25
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Rendah	Rendah	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Sumber :
RPJMD Kabupaten Asmat Tahun 2016-2021

2.6 PENETAPAN KINERJA

Indikator kinerja daerah digunakan sebagai tolak ukur kemajuan serta sebagai alat untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Adapun indikator kinerja yang telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Asmat Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah
Tahun 2016

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
Misi 1 : Membangun birokrasi bersih, responsif, transparan dan akuntabel					
1.1	Terwujudnya penerapan prinsip-prinsip <i>good governance</i> dan <i>clean government</i> dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	1.1.1	Indeks Persepsi Korupsi	indeks	40



**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN ASMAT
TAHUN 2016**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
1.2	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional dan bertanggungjawab	1.2.1	APBD tepat waktu	kriteria	tepat
		1.2.2	Opini BPK terhadap LKPD Kabupaten Asmat	nilai	WTP
		1.2.3	Persentase peningkatan PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan	persen	14,76
1.3	Terwujudnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas, aplikatif dan responsif	1.3.1	Tingkat pencapaian target RPJMD	persen	76,50
		1.3.2	Cakupan kelengkapan dokumen perencanaan spasial daerah	persen	76,54
		1.3.3	Cakupan ketersediaan data pembangunan daerah	persen	90,00
		1.3.4	Rata-rata rasio pencapaian kinerja pembangunan	persen	90,00
1.4	Terwujudnya peningkatan kualitas dan kapasitas SDM aparatur	1.4.1	Cakupan jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat struktural dan fungsional	persen	49,87
1.5	Terwujudnya peningkatan kenyamanan dan ketertiban umum	1.5.1	Tingkat kriminalitas	persen	9,00
		1.5.2	Persentase kelompok masyarakat yang dibina dalam bidang perlindungan masyarakat	persen	17,30
1.6	Terwujudnya pelayanan kependudukan	1.6.1	Cakupan jumlah penduduk yang telah memiliki dokumen kependudukan	persen	42,50
Misi 2 : Meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas akses pendidikan					
2.1	Terwujudnya peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan berkualitas pada semua jenjang pendidikan	2.1.1	Angka Melek Huruf	persen	31,20
		2.1.2	Rata-rata lama sekolah	tahun	4,40
		2.1.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD	persen	88,60
		2.1.4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP	persen	65,30
		2.1.5	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA	persen	72,80
		2.1.6	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	persen	39,56
		2.1.7	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	persen	82,33
		2.1.8	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	persen	59,84
		2.1.9	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA	persen	24,98
		2.1.10	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	persen	79,77
		2.1.11	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	persen	38,32
		2.1.12	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA	persen	17,72



**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN ASMAT
TAHUN 2016**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
2.2	Peningkatan eksistensi adat dan budaya Asmat yang menjadi semangat dalam berbagai aktifitas	2.2.1	Cakupan pelaku seni dan budaya yang meningkat kemampuannya dalam pengembangan seni, budaya dan adat	persen	87,00
		2.2.2	Jumlah objek wisata yang telah dikembangkan	objek	7
		2.2.3	Jumlah pelaku seni dan budaya yang eksis di tingkat nasional maupun internasional	kelompok	10
		2.2.4	Jumlah materi publikasi budaya	materi	10
		2.2.5	Cakupan jumlah objek budaya yang telah disahkan sebagai HAKI	unit	10
		2.2.6	Cakupan kekayaan budaya yang dilindungi oleh Perda	persen	75
		2.2.7	Cakupan jumlah kelompok pemuda yang difasilitasi	kelompok	34
		2.2.8	Cakupan budaya Asmat yang masuk dalam kurikulum lokal	persen	25
2.3	Terwujudnya peningkatan kualitas generasi muda yang sehat jasmani dan rohani dan berdaya saing	2.3.1	Jumlah jenis sarana olah raga yang dibangun	jenis	3
		2.3.2	Jumlah organisasi kepemudaan berbasis budaya yang dibina	kelompok	5
Misi 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan					
3.1	Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan	3.1.1	Angka Harapan Hidup	tahun	65,40
		3.1.2	Persentase kelahiran yang ditolong tenaga medis	persen	36,80
		3.1.3	Rata-rata waktu penyembuhan pasien di rumah sakit	hari	3,30
		3.1.4	Rasio puskesmas per 1.000 penduduk	rasio	1,60
		3.1.5	Rasio puskesmas pembantu per 10.000 penduduk	rasio	6,20
		3.1.6	Rasio dokter per 10.000 penduduk	rasio	2,40
		3.1.7	Rata-rata penduduk yang dilayani puskesmas	orang/ tahun	5.890
		3.1.8	Rata-rata penduduk yang dilayani tiap dokter	orang/ tahun	5.460
3.2	Meningkatnya jangkauan dan intensitas pelayanan keluarga berencana	3.2.1	Persentase peserta KB aktif	persen	66,50
		3.2.2	Jumlah pusat pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja	unit	2



**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN ASMAT
TAHUN 2016**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
		3.2.3	Persentase keluarga sejahtera	persen	22,69
		3.2.4	Persentase rasio akseptor KB per 100 Pasangan Usia Subur (PUS)	persen	49,85
3.3	Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	3.3.1	Indeks Pembangunan Gender	indeks	49,01
		3.3.2	Indeks Pemberdayaan Gender	indeks	37,29
		3.3.3	Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	kasus	12
Misi 4 : Mendorong pemberdayaan ekonomi kerakyatan					
4.1	Terwujudnya pengembangan sektor kelautan dan perikanan yang berbasis potensi unggulan	4.1.1	Kontribusi sektor perikanan tangkap	persen	10,81
		4.1.2	Jumlah produksi perikanan tangkap	ton	8.161
		4.1.3	Nilai produksi perikanan tangkap	juta rupiah	97,10
		4.1.4	Jumlah produksi perikanan budidaya	ton	76,77
		4.1.5	Nilai produksi perikanan budidaya	juta rupiah	523,01
		4.1.6	Cakupan jumlah masyarakat pesisir yang diberdayakan	persen	66,3
4.2	Terwujudnya peningkatan ketersediaan bahan pangan utama dan keragaman pangan lokal	4.2.1	Persentase pengeluaran penduduk untuk pangan	persen	68,5
		4.2.2	Cakupan jumlah kampung mandiri dan swasembada pangan	persen	7,60
4.3	Terwujudnya peningkatan produktifitas hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan	4.3.1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	persen	1,18
		4.3.2	Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB	persen	0,32
		4.3.3	Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB	persen	0,22
		4.3.4	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	persen	5,09
		4.3.4	Rasio jumlah penyuluh pertanian terhadap total petani	persen	3,88
		4.3.5	Cakupan jumlah kampung tangguh yang diberdayakan	persen	29,21
		4.3.6	Cakupan jumlah petani yang ditingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan maupun magang	persen	42,60
		4.3.7	Cakupan jumlah kelompok petani dan aparaturnya yang	persen	39,03



**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN ASMAT
TAHUN 2016**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
			mendapatkan program peningkatan kapasitas		
4.4	Meningkatkan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam mendukung perekonomian masyarakat	4.4.1	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	persen	2,88
		4.4.2	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	persen	7,94
		4.4.3	Jumlah koperasi aktif	unit	80
		4.4.4	Jumlah anggota koperasi yang aktif	orang	2.217
		4.4.5	Cakupan jumlah wirausaha baru yang dibina	persen	100
4.5	Terwujudnya masyarakat Asmat sadar budaya dan wisata dalam rangka perwujudan Kabupaten Asmat sebagai daerah tujuan wisata minat khusus	4.5.1	Jumlah kunjungan wisatawan domestik	orang	1.536
		4.5.2	Jumlah kunjungan wisatawan asing	orang	443
		4.5.3	Rata-rata lama tinggal wisatawan domestik	hari	4
		4.5.4	Rata-rata lama tinggal wisatawan asing	hari	3
		4.5.5	Cakupan jumlah kelompok ukir yang dibina	persen	35,89
		4.5.6	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan	objek	4
		4.5.7	Jumlah kampung wisata yang dikembangkan melalui kemitraan	kampung	7
		4.5.8	Cakupan jumlah kelompok seni dan budaya yang difasilitasi	persen	47,90
Misi 5 : Mempercepat pembangunan infrastruktur dan memperluas lapangan kerja					
5.1	Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah secara konsisten	5.1.1	Persentase ketaatan penduduk terhadap RTRW	persen	35,00
		5.1.2	Persentase luas kawasan yang sudah dibangun sesuai dengan peruntukannya	persen	20
5.2	Terwujudnya peningkatan ketersediaan infrastruktur pengairan yang berkualitas dan merata	5.2.1	Persentase jaringan irigasi yang dimanfaatkan sesuai fungsi	persen	40
		5.2.2	Persentase sarana pengairan dan air minum yang berfungsi dengan baik	persen	6,54
5.3	Terwujudnya peningkatan kualitas jalan dan jembatan	5.3.1	Persentase peningkatan panjang jalan per tahun	persen	12,74
		5.3.2	Persentase jalan dalam kondisi baik	persen	83,22



**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN ASMAT
TAHUN 2016**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
5.4	Terwujudnya pemukiman yang layak huni	5.4.1	Persentase penduduk dengan perumahan yang layak huni	persen	26,54
		5.4.2	Persentase rumah dengan lantai bukan tanah	persen	98,35
		5.4.3	Persentase rumah dengan atap yang layak	persen	24,98
5.5	Terwujudnya peningkatan ketersediaan infrastruktur perhubungan darat, laut dan udara guna memperlancar arus orang dan barang yang masuk	5.5.1	Cakupan kecukupan sarana transportasi	persen	45,90
		5.5.2	Cakupan penumpang masuk dan keluar kabupaten	persen	9,37
5.6	Terwujudnya peningkatan jaringan komunikasi yang memadai	5.6.1	Cakupan rumah tangga yang memiliki akses handphone	persen	15,64
		5.6.2	Cakupan rumah tangga yang memiliki akses telepon rumah	persen	0,51
		5.6.3	Cakupan rumah tangga yang memiliki akses internet	persen	2,54
5.7	Terwujudnya peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja	5.7.1	Tingkat partisipasi angkatan kerja	persen	83,54
		5.7.2	Tingkat pengangguran terbuka	persen	0,43
5.8	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam berkelanjutan	5.8.1	Luas hutan lindung	hektar	1.087.531,17
		5.8.2	Luas hutan produksi	juta hektar	0,08
		5.8.3	Cakupan jumlah kelompok masyarakat asli yang dibina dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi	persen	100
		5.8.4	Jumlah kelompok masyarakat yang berperan serta dalam pengawasan kelestarian hutan	persen	100
		5.8.5	Jumlah luas areal rehabilitasi dan konservasi hutan	hektar	32.320,40
5.9	Terwujudnya sistem kewaspadaan dini terhadap bencana	5.9.1	Cakupan kelengkapan peralatan untuk pengendalian kebakaran hutan	persen	19,80
Misi 6 : Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik					
6.1	Terwujudnya peningkatan upaya pemberdayaan sosial masyarakat	6.1.1	Persentase pemilihan kepala kampung yang dilakukan secara demokratis	persen	10,33
		6.1.2	Persentase kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	persen	15,26



**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN ASMAT
TAHUN 2016**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
		6.1.3	Persentase kelompok binaan PKK	persen	30,46
		6.1.4	Persentase kampung mandiri dalam menyusun perencanaan partisipatif	persen	5,00
6.2	Terwujudnya peningkatan kualitas hidup masyarakat kampung berbasis kearifan lokal	6.2.1	Cakupan kampung mandiri	persen	2,00
		6.2.2	Persentase kampung yang mendapat aliran listrik	persen	6,72
		6.2.3	Persentase rumah tangga di kampung yang memiliki akses terhadap pelayanan air minum	persen	8,37
		6.2.4	Jumlah hutan adat dan tempat sakral yang diperdakan	jumlah	1
		6.2.5	Persentase tema dalam hukum adat yang diakomodasikan dalam perda	persen	2,22
6.3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam praktek demokrasi penyelenggaraan pemerintahan	6.3.1	Persentase masukan masyarakat yang diakomodasikan dalam perda	persen	43,57
		6.3.2	Persentase rata-rata dengar pendapat dengan masyarakat dalam penyusunan perda	persen	5,44
		6.3.3	Persentase usulan masyarakat melalui musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	persen	64,37

Sumber :
Peraturan Bupati Asmat Nomor 40 Tahun 2016
tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Asmat Tahun 2016-201



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai misi organisasi. SAKIP memuat gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sebagai alat/tolak ukur untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

Laporan ini memberikan gambaran tentang penilaian tingkat pencapaian kinerja atas indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Asmat Tahun 2016-2021 serta Penetapan Kinerja Tahun 2016. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program serta sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Dalam bab ini memuat rangkaian pengukuran kinerja terhadap tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dengan kondisi sebagai berikut :



1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{(\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}))}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Penilaian terhadap keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran yang digunakan adalah skala ordinal dengan *range* sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Ordinal

No.	Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Nilai 85 s.d. 100	Baik
2.	Nilai 70 s.d. 84	Cukup
3.	Nilai 55 s.d. 69	Sedang
4.	Nilai < 55	Kurang

3.2 CAPAIAN INDIKATOR MAKRO

Tujuan pembangunan Kabupaten Asmat yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam pernyataan visi dan misi, yang mana hal ini memberikan kejelasan bahwa arah pembangunan Kabupaten Asmat telah disusun dalam suatu kebijakan yang bertahap, terstruktur dan berkesinambungan. Oleh karenanya, kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan daerah harus dapat menginformasikan sejauhmana kebijakan tersebut dalam mendukung tujuan pembangunan. Representasi ketercapaian tujuan pembangunan tersebut dituangkan dalam indikator makro pembangunan daerah, yang akhirnya akan memberikan dampak terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).



Kinerja pembangunan daerah dapat diukur melalui informasi gambaran ketercapaian dan permasalahan yang terjadi dari setiap indikator makro. Keberhasilan dan juga kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator makro merupakan akumulasi dari peran serta seluruh *stakeholder* pembangunan yang meliputi pemerintah, swasta dan masyarakat, oleh karena itu dalam menyikapi kinerja kebijakan pemerintah dalam konstelasi pencapaian indikator makro perlu diterjemahkan terlebih dahulu kerangka pikir kontribusi kebijakan dan pelaku terhadap capaian indikator makro tersebut sehingga gambaran pencapaian indikator makro merupakan hasil kinerja seluruh pelaku pembangunan. Perkembangan capaian indikator makro Kabupaten Asmat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Perkembangan Indikator Makro Kabupaten Asmat
Tahun 2014 s.d. 2016

No.	Indikator	Pencapaian			Target
		2014	2015	2016	2016
1.	Indeks Pembangunan Manusia	45,91	46,62	47,58	47.23
2.	Tingkat Kemiskinan	29.80	28.48	27,15	27.37
3.	Pertumbuhan Ekonomi	5.45	5.73	6.10	6.60
4.	Indeks Kesejangan Pendapatan	0.42	0.40	0.38	0.36
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah

Sumber :
RPJMD Kabupaten Asmat Tahun 2016-2021

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun 2014 adalah 45.91, pencapaian tahun 2015 adalah 46.45 dan di tahun 2016 adalah 47,58. Tingkat kemiskinan tahun 2014 adalah 29,80% pencapaian tingkat kemiskinan tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 1,33 poin menjadi 28,48% dan di tahun 2016 adalah 27,15%. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang kerap digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Laju pertumbuhan ekonomi menunjukan indikator yang menunjukkan naik tidaknya produk yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan di suatu daerah. Pencapaian pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Asmat tahun 2014 adalah 5.45%. Pada tahun 2015 pencapaian pertumbuhan ekonomi adalah 5.73% dan di tahun 2016 adalah 6,10%.



Sektor konstruksi memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Asmat yaitu sebesar 590.508,05 juta rupiah atau sebesar 31,17% dari PDRB ADHB Tahun 2016, selanjutnya diikuti oleh sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang memberikan kontribusi sebesar 409.024,89 juta rupiah atau 21.59%, kemudian sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi sebesar 19,99% atau senilai 378.621,02 juta rupiah. Sedangkan sektor pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi terkecil yaitu hanya 0,01% atau senilai 178,61 juta rupiah.

Perkembangan PDRB Kabupaten Asmat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha tahun 2014 s.d. 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3
PDRB Kabupaten Asmat
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2014 s.d. 2016
(dalam juta rupiah)

No.	Lapangan Usaha	Tahun		
		2014 *)	2015 *)	2016 **)
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	327.571,41	352.172,43	378.621,02
2.	Pertambangan dan Penggalian	181,40	180,00	178,61
3.	Industri Pengolahan	27.862,81	30.766,58	33.972,97
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	172,94	182,72	193,05
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	802,24	875,70	955,89
6.	Konstruksi	438.117,40	508.637,25	590.508,05
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	108.799,51	118.517,01	129.102,43
8.	Transportasi dan Pergudangan	36.047,30	39.826,69	44.002,23
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.879,30	4.281,55	4.725,51
10.	Informasi dan Komunikasi	9.216,69	9.873,83	10.577,82
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.586,56	3.925,78	4.297,08
12.	Real Estate	32.707,23	34.771,64	36.966,35
13.	Jasa Perusahaan	6.808,10	7.487,34	8.234,35
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	289.117,70	343.884,19	409.024,89
15.	Jasa Pendidikan	118.998,50	129.489,57	140.905,55
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	61.701,30	70.769,68	81.170,86
17.	Jasa Lainnya	17.801,60	19.277,14	20.874,98
Produk Domestik Regional Bruto		1.483.371,99	1.674.919,10	1.894.311,76

*) Badan Pusat Statistik Kabupaten Asmat Tahun 2016

**) Angka Sementara, Data diolah



Kontribusi terbesar terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Asmat yaitu 26,90% berasal dari sektor konstruksi yaitu sebesar 350.791,03 juta rupiah, kemudian diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 317.114,47 juta rupiah atau sebesar 24,32% dari PDRB ADHK dan kontributor ketiga berasal sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang memberikan kontribusi sebesar 21,78% atau senilai 284.066,29 juta rupiah. Sedangkan sektor pengadaan listrik dan gas memberikan kontribusi terkecil yaitu sebesar 0,01% atau hanya sebesar 118,69 juta rupiah. Perkembangan PDRB Kabupaten Asmat Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014 s.d. 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4
PDRB Kabupaten Asmat
Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2014 s.d. 2016
(dalam juta rupiah)

No.	Lapangan Usaha	Tahun		
		2014 *)	2015 *)	2016 **)
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	287.386,60	301.884,83	317.114,47
2.	Pertambangan dan Penggalian	250,10	235,44	221,64
3.	Industri Pengolahan	29.398,30	30.879,86	32.436,08
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	120,72	119,70	118,69
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	641,25	654,42	667,86
6.	Konstruksi	310.667,50	330.120,24	350.791,03
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	80.604,60	80.681,27	80.758,01
8.	Transportasi dan Pergudangan	27.971,97	29.131,55	30.339,20
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.281,67	3.402,99	3.528,80
10.	Informasi dan Komunikasi	7.778,60	7.817,23	7.856,05
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.422,08	2.508,32	2.597,63
12.	Real Estate	23.025,19	23.446,55	23.875,62
13.	Jasa Perusahaan	6.630,03	6.942,31	7.269,30
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	238.906,48	260.509,65	284.066,29
15.	Jasa Pendidikan	93.012,72	96.956,45	101.067,39
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	40.701,20	44.061,42	47.699,05
17.	Jasa Lainnya	13.181,40	13.463,48	13.751,60
Produk Domestik Regional Bruto		1.165.980,41	1.232.815,71	1.304.158,73

*) Badan Pusat Statistik Kabupaten Asmat Tahun 2016

**) Angka Sementara, Data diolah



Sektor konstruksi memberikan kontribusi utama terhadap PDRB Kabupaten Asmat yaitu sebesar 31,17% diikuti oleh sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang memberikan kontribusi sebesar 21,59%, serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu 19,99%, selanjutnya dari sedangkan sektor pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi terkecil yaitu hanya sebesar 0,01%. Adapun persentase PDRB ADHB Tahun 2014 s.d. 2016 tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Persentase PDRB
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Di Kabupaten Asmat
Tahun 2013 s.d. 2015

No.	Lapangan Usaha	Tahun		
		2014 *)	2015 *)	2016 **)
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	22,08	21,03	19,99
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,01	0,01	0,01
3.	Industri Pengolahan	1,88	1,84	1,79
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,01
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05
6.	Konstruksi	29,54	30,37	31,17
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,33	7,08	6,82
8.	Transportasi dan Pergudangan	2,43	2,38	2,32
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,26	0,26	0,25
10.	Informasi dan Komunikasi	0,62	0,59	0,56
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,24	0,23	0,23
12.	Real Estate	2,20	2,08	1,95
13.	Jasa Perusahaan	0,46	0,45	0,43
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	19,49	20,53	21,59
15.	Jasa Pendidikan	8,02	7,73	7,44
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,16	4,23	4,28
17.	Jasa Lainnya	1,20	1,15	1,10
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00

*) Badan Pusat Statistik Kabupaten Asmat Tahun 2016

**) Angka Sementara, Data diolah

Persentase PDRB ADHK Tahun 2014 s.d. 2016 dari sektor konstruksi memberikan kontribusi utama terhadap PDRB Kabupaten Asmat yaitu sebesar 26,90% diikuti oleh serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu

24,32%, selanjutnya dari sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang memberikan kontribusi sebesar 21,78%, sedangkan sektor pengadaan listrik dan gas memberikan kontribusi terkecil yaitu hanya sebesar 0,01%. Adapun persentase PDRB ADHK Tahun 2014 s.d. 2016 tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6
Persentase PDRB
Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
Di Kabupaten Asmat
Tahun 2013 s.d. 2015

No.	Lapangan Usaha	Tahun		
		2014 *)	2015 *)	2016 **)
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	24,65	24,49	24,32
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,02	0,02	0,02
3.	Industri Pengolahan	2,52	2,50	2,49
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,01
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05
6.	Konstruksi	26,64	26,78	26,90
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,91	6,54	6,19
8.	Transportasi dan Pergudangan	2,40	2,36	2,33
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,28	0,28	0,27
10.	Informasi dan Komunikasi	0,67	0,63	0,60
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,21	0,20	0,20
12.	Real Estate	1,97	1,90	1,83
13.	Jasa Perusahaan	0,57	0,56	0,56
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	20,49	21,13	21,78
15.	Jasa Pendidikan	7,98	7,86	7,75
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,49	3,57	3,66
17.	Jasa Lainnya	1,13	1,09	1,05
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00

*) Badan Pusat Statistik Kabupaten Asmat Tahun 2016

**) Angka Sementara, Data diolah

3.3 CAPAIAN INDIKATOR SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Asmat Tahun 2016-2021 memiliki 6 (enam) misi dan 15 (lima belas) sasaran serta 111



(seratus sebelas) indikator kinerja. Persentase capaian kinerja dari seluruh indikator kinerja sasaran tersaji sebagai berikut :

Tabel 3.7
Persentase Kriteria Pencapaian Kinerja Indikator Sasaran

No.	Kriteria	Jumlah Indikator	Jumlah Capaian (%)	Persentase Capaian	Kategori
Misi 1 (3 sasaran, 12 indikator)					
1.	BAIK	10	1.0012,14	101,26	Baik
2.	CUKUP	2	146,80	73,40	
3.	SEDANG	-	-	0,00	
4.	KURANG	-	-	0,00	
Jumlah		12	1.148,94	96,62	
Misi 2 (3 sasaran, 22 indikator)					
1.	BAIK	14	1.446,76	103,34	Baik
2.	CUKUP	3	227,20	75,73	
3.	SEDANG	2	124,71	62,35	
4.	KURANG	3	48,18	16,06	
Jumlah		22	1.846,48	83,95	
Misi 3 (2 sasaran, 14 indikator)					
1.	BAIK	10	994,96	99,50	Baik
2.	CUKUP	1	75,63	75,63	
3.	SEDANG	1	59,58	59,58	
4.	KURANG	2	97,99	48,99	
Jumlah		14	1.228,15	87,73	
Misi 4 (2 sasaran, 29 indikator)					
1.	BAIK	18	1.817,47	100,97	Baik
2.	CUKUP	6	459,32	76,55	
3.	SEDANG	2	122,82	61,41	
4.	KURANG	3	119,19	39,73	
Jumlah		29	2.518,81	86,86	
Misi 5 (4 sasaran, 22 indikator)					
1.	BAIK	13	1.272,18	97,86	Cukup
2.	CUKUP	-	0,00	0,00	
3.	SEDANG	4	250,41	62,60	
4.	KURANG	5	182,85	36,57	
Jumlah		22	1.705,44	77,52	
Misi 6 (1 sasaran, 12 indikator)					
1.	BAIK	6	607,14	101,19	Cukup
2.	CUKUP	2	147,59	73,79	
3.	SEDANG	1	64,91	64,91	
4.	KURANG	3	45,04	15,01	
Jumlah		12	864,68	72,06	



Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pencapaian kinerja paling tinggi adalah pada Misi 1 dengan rata-rata capaian kinerjanya sebesar 96,62% dengan kategori BAIK. Kemudian diikuti oleh pencapaian kinerja pada Misi 3 dengan rata-rata capaian kinerjanya adalah sebesar 87,73% dengan kategori BAIK. Pencapaian ketiga adalah pada Misi 4 dengan rata-rata capaian kinerjanya adalah sebesar 86,86% dengan kategori BAIK. Pencapaian keempat adalah pada Misi 2 dengan rata-rata capaian kinerjanya adalah sebesar 83,95% dengan kategori BAIK. Pencapaian kelima adalah pada Misi 5 dengan rata-rata capaian kinerjanya adalah sebesar 77,52% dengan kategori CUKUP, dan pencapaian keenam adalah pada Misi 6 dengan rata-rata capaian kinerjanya adalah sebesar 72,06% dengan kategori CUKUP. Dengan demikian rata-rata capaian kinerja dari 111 indikator kinerja di tahun 2016 adalah sebesar 83,99% dengan kategori BAIK.

**Tabel 3.8
Pencapaian Target Misi**

No	Misi	Sasaran	Jumlah Indikator	Pencapaian Target								
				Melampaui Target			Memenuhi Target			Belum Memenuhi Target		
				Σ	%	≈	Σ	%	≈	Σ	%	≈
1	Misi 1	Sasaran 1	9	2	247,48	123,74	3	300,00	100,00	4	366,71	91,68
		Sasaran 2	2	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2	146,80	73,40
		Sasaran 3	1	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1	98,45	98,45
2.	Misi 2	Sasaran 1	12	4	418,49	104,62	5	501,83	100,37	3	210,40	70,13
		Sasaran 2	8	1	142,86	142,86	1	100,00	100,00	6	313,27	52,21
		Sasaran 3	2	0	0,00	0,00	1	100,00	100,00	1	60,00	60,00
3.	Misi 3	Sasaran 1	11	5	533,44	106,69	0	0,00	0,00	6	410,25	68,38
		Sasaran 2	3	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3	284,46	94,82
4.	Misi 4	Sasaran 1	21	7	786,71	112,39	0	0,00	0,00	14	1.081,90	77,28
		Sasaran 2	8	0	0,00	0,00	1	100,00	100,00	7	550,20	78,60
5.	Misi 5	Sasaran 1	9	3	306,58	102,19	0	0,00	0,00	6	432,75	72,13
		Sasaran 2	5	1	101,44	101,44	0	0,00	0,00	4	348,17	87,04
		Sasaran 3	2	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2	187,40	93,70
		Sasaran 4	6	0	0,00	0,00	2	200,00	200,00	4	129,10	32,27
6.	Misi 6	Sasaran 1	12	2	238,25	119,12	1	100,41	100,41	9	526,02	58,45

Keterangan :

Σ : Jumlah Indikator

% : Jumlah Persentase Capaian Kinerja

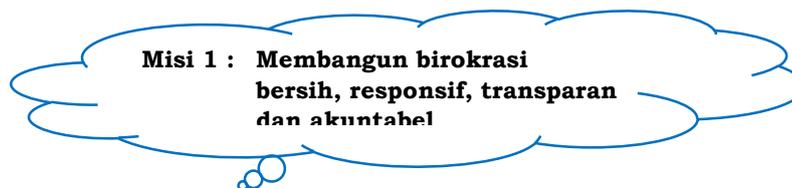
≈ : Rata-rata Capaian Kinerja

Dari 15 sasaran dan 111 indikator kinerja, pencapaian kinerja di tahun 2016 yang melampaui target sebanyak 25 indikator kinerja, yang memenuhi target sebanyak 14 indikator kinerja dan yang belum memenuhi target sebanyak 72 indikator kinerja.

Adapun capaian dan analisa terhadap setiap sasaran sebagaimana tersebut diatas akan diuraikan pada tabel berikut ini :

3.4 EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR SASARAN

3.4.1 EVALUASI PENCAPAIAN MISI 1



Tabel 3.9
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 1 pada Misi 1

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun			Capaian (%)	Ket
			2015	2016			
			Keadaan Awal	Target	Realisasi		
Sasaran 1 :							
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih dan transparan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima							
1. Terwujudnya penerapan prinsip-prinsip <i>good governance</i> dan <i>clean government</i> dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah							
1.1	Indeks Persepsi Korupsi	poin	36	40	40	100,00	Baik
2. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional dan bertanggungjawab							
2.1	APBD tepat waktu	kriteria	tepat	tepat	tepat	100,00	Baik
2.2	Opini BPK terhadap LKPD Asmat	nilai	WTP	WTP	WTP	100,00	Baik
2.3	Persentase peningkatan PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan	persen	10,72	14,76	20,34	137,80	Baik
3. Terwujudnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas, aplikatif dan responsif							
3.1	Tingkat pencapaian target RPJMD	persen	72,85	76,50	83,90	109,67	Baik
3.2	Cakupan kelengkapan dokumen perencanaan spasial daerah	persen	73,15	76,54	75,54	98,69	Baik
3.3	Cakupan ketersediaan data pembangunan daerah	persen	80,00	90,00	80,00	88,89	Baik



**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN ASMAT
TAHUN 2016**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun			Capaian (%)	Ket
			2015	2016			
			Keadaan Awal	Target	Realisasi		
3.4	Rata-rata rasio pencapaian kinerja pembangunan	persen	82,58	90,00	84,50	93,89	Baik
4. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kapasitas SDM aparatur							
4.1	Cakupan jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat struktural dan fungsional	persen	42,51	49,87	42,51	85,24	Baik
Jumlah						914,19	Baik
Rata-rata Capaian Kinerja						101,58	

*Sumber :
Inspektorat Kabupaten Asmat;
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asmat;
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Asmat;
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Asmat;
Tahun 2017*

Deskripsi Pencapaian Tahun 2016 :

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 1 pada misi 1 adalah 101,58% yang termasuk dalam kategori baik. Dari 8 indikator pada sasaran 1, terdapat 2 indikator yang melampaui target, 3 indikator memenuhi target dan 4 indikator belum memenuhi target. 8 indikator tersebut semua masuk dalam kategori baik.

Pencapaian Kinerja Tahun 2016 :

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Indeks Persepsi Korupsi pada tahun 2015 adalah sebesar 36 poin dan di tahun 2016 adalah 40 poin. Peningkatan ini terjadi seiring semakin baiknya penatausahaan keuangan yang dilakukan oleh setiap unit kerja yang menyelenggarakan pemerintahan. Pencapaian kinerja dari indikator ini mencapai 100% dari target yang direncanakan di tahun yang sama yaitu indeks persepsi korupsi adalah 40 poin.

Penetapan APBD Kabupaten Asmat dalam 5 (lima) tahun terakhir selalu tepat waktu sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan. Adapun penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sesuai dengan target yang direncanakan untuk tahun 2016. Hal ini merupakan komitmen seluruh penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Asmat untuk lebih transparan dan akuntabel dalam penatausahaan keuangan yang dilaksanakan oleh setiap unit kerja bahkan sampai di tingkat kampung dalam pengelolaan keuangan kampung.



Peningkatan PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan terjadi sangat signifikan dimana tahun 2015 adalah sebesar 10.72% dan di tahun 2016 meningkat menjadi 20.34% yang mana hal ini melampaui target di tahun yang sama yaitu sebesar 14.76%, sehingga pencapaian kinerjanya adalah 130,80%.

Tingkat pencapaian target RPJMD di tahun 2015 adalah 72,85% dan direncanakan target di tahun 2016 adalah sebesar 76,50%. Tingkat pencapaian target RPJMD di tahun 2016 adalah sebesar 83,90 sehingga pencapaian kinerjanya di tahun 2016 adalah sebesar 109,67%.

Ketersediaan data pembangunan daerah dari rencana yang ditargetkan di tahun 2016 sebesar 90%, realisasinya hanya mencapai 85%, sehingga pencapaian kinerjanya hanya mencapai 94.44%. Pencapaian kinerja untuk indikator rata-rata pencapaian kinerja pembangunan hanya mencapai 96.67% yang mana dari rencana yang ditargetkan di tahun 2016 sebesar 90% hanya terealisasi 87%.

Rata-rata rasio pencapaian kinerja pembangunan pada tahun 2015 adalah 82,58% sedangkan rencana yang ditargetkan di tahun 2016 adalah 90,00%. Pencapaian di tahun 2016 adalah 84,50% sehingga capaian kinerja pembangunan adalah 93,89%.

Cakupan jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat struktural dan fungsional dari rencana target 49.87% hanya tercapai 42.51% yang mana ditahun 2016 tidak ada kegiatan diklat struktural maupun fungsional yang dilakukan sehingga jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat struktural maupun fungsional capaiannya masih seperti tahun 2015 yaitu 42.51%, sehingga pencapaian kinerjanya hanya mencapai 85.24%.

Tabel 3.10
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 2 pada Misi 1

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun			Capaian (%)	Ket
			2015	2016			
			Kedaaan Awal	Target	Realisasi		
Sasaran 2 : Mewujudkan peningkatan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib dalam panji demokrasi dan wawasan kebangsaan							
5. Terwujudnya peningkatan kenyamanan dan ketertiban umum							
5.1	Tingkat kriminalitas	persen	13.88	9.00	12.38	72.70	Cukup



**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN ASMAT
TAHUN 2016**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun			Capaian (%)	Ket
			2015	2016			
			Keadaan Awal	Target	Realisasi		
5.2	Persentase kelompok masyarakat yang dibina dalam bidang perlindungan masyarakat	persen	8.26	17.30	12.82	74.10	Cukup
Jumlah						146,80	Cukup
Rata-rata Capaian Kinerja						73,40	

*Sumber :
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asmat Tahun 2017
Badan Pusat Statistik Kabupaten Asmat Tahun 2016*

Deskripsi Pencapaian Tahun 2016 :

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 2 pada misi 1 adalah 73,40% yang termasuk dalam kategori cukup. Dari 2 indikator pada sasaran 2, terdapat 2 indikator belum memenuhi target. Kedua indikator tersebut termasuk dalam kategori cukup.

Pencapaian Kinerja Tahun 2016 :

Tingkat kriminalitas yang terjadi di sepanjang tahun 2015 adalah 13,88%, ditargetkan untuk diturunkan ditahun 2016 yaitu sebesar 9,00%, kenyataannya tingkat kriminalitas hanya mampu mencapai 12,38% sehingga pencapaiannya kinerja hanya 72,70%. Hal ini banyak disebabkan konsumsi minuman keras yang beredar terutama minuman keras non pabrikan sehingga memberi dampak terhadap gangguan keamanan.

Persentase kelompok masyarakat yang dibina dalam bidang perlindungan masyarakat dari rencana yang ditargetkan di tahun 2016 yaitu 17,30% hanya tercapai 12,82% sehingga pencapaiannya hanya 74,10%. Pembinaan yang telah dilakukan sampai dengan tahun 2016 meliputi 4 distrik dari total 19 distrik dengan jumlah kelompok yang dibina adalah 47 kelompok jumlah keseluruhan 221 kelompok binaan yang ada.



Tabel 3.11
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 3 pada Misi 1

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun			Capaian (%)	Ket
			2015	2016			
			Keadaan Awal	Target	Realisasi		
Sasaran 3 :							
Mewujudkan penataan kependudukan dan pencatatan sipil							
6. Terwujudnya pelayanan kependudukan yang prima							
6.1	Cakupan jumlah penduduk yang telah memiliki dokumen kependudukan	persen	40.15	42.50	41.84	98.45	Baik
Jumlah						98,45	Baik
Rata-rata Capaian Kinerja						98,45	

Sumber :
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat
Tahun 2017

Deskripsi Pencapaian Tahun 2016 :

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 3 pada misi 1 adalah 98,45% yang termasuk dalam kategori baik. Satu indikator tersebut belum memenuhi target yang direncanakan di tahun 2016.

Pencapaian Kinerja Tahun 2016 :

Dokumen penduduk yang telah memiliki dokumen kependudukan direncanakan mencapai 42.50% di tahun 2016, realisasi sampai dengan akhir tahun 2016 hanya mencapai 41.84% atau pencapaiannya hanya sebesar 98.45%. Hal ini dipengaruhi oleh faktor geografis kabupaten yang hanya dapat dijangkau dengan transportasi sungai sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk mencapai kampung-kampung sangat tinggi, selain itu faktor ketergantungan terhadap alam menyebabkan masyarakat di kampung-kampung lebih sering berada di dalam hutan untuk mencari makan dari pada berdiam di kampung sehingga ketika tim dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil melakukan pelayanan administrasi kependudukan di kampung-kampung, tidak bertemu dengan masyarakat sebagai sasaran pelayanan.

3.4.2 EVALUASI PENCAPAIAN MISI 2

Misi 2 : Meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas akses pendidikan

**Tabel 3.12
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 1 pada Misi 2**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun			Capaian (%)	Ket
			2015	2016			
			Keadaan Awal	Target	Realisasi		
Sasaran 1 :							
Mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas							
1. Terwujudnya peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan berkualitas pada semua jenjang pendidikan							
1.1	Angka Melek Huruf	persen	30.80	31.20	31.30	100.32	Baik
1.2	Rata-rata lama sekolah	tahun	4.38	4.40	4.84	110.00	Baik
1.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD	persen	76.21	88.60	89.20	100.68	Baik
1.4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP	persen	83.38	65.30	85.50	100.23	Baik
1.5	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA	persen	38.89	72.80	56.20	77.20	Cukup
1.6	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	persen	4.09	39.56	19.06	48.18	Kurang
1.7	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	persen	81.25	82.33	82.54	100.26	Baik
1.8	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	persen	57.42	59.54	60.19	101.09	Baik
1.9	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA	persen	15.92	24.98	25.78	103.20	Baik
1.10	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	persen	76.21	79.77	83.12	104.20	Baik
1.11	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	persen	26.08	38.32	32.58	85.02	Baik
1.12	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA	persen	17.65	17.72	17.78	100.34	Baik
Jumlah						1.130,72	Baik
Rata-rata Capaian Kinerja						94,23	

*Sumber :
Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat Tahun 2017
Badan Pusat Statistik Kabupaten Asmat Tahun 2016*



Deskripsi Pencapaian Tahun 2016 :

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 1 pada misi 2 adalah 94,23% yang termasuk dalam kategori baik. Jumlah indikator untuk sasaran ini sebanyak 12 indikator dengan pencapaian yang melampaui target sebanyak 4 indikator, dengan pencapaian yang memenuhi target sebanyak 5 indikator dan belum memenuhi target sebanyak 3 indikator. Indikator dengan kategori baik sebanyak 10 indikator, dengan kategori cukup sebanyak 1 indikator dan dengan kategori kurang sebanyak 1 indikator.

Pencapaian Kinerja Tahun 2016 :

Jumlah kelompok belajar untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di tahun 2016 adalah sebanyak 25 kelompok belajar dengan jumlah murid sebanyak 1.187 anak. Jumlah guru PNS sebanyak 8 orang dan guru yang Non PNS sebanyak 128 orang.

Jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) di tahun 2015 berjumlah 10 TK dan di tahun 2016 sebanyak 12 TK, dengan jumlah murid sebanyak 1.164 anak. Jumlah guru PNS sebanyak 9 orang dan guru Non PNS sebanyak 65 orang.

Jumlah Sekolah Dasar (SD) di tahun 2016 sebanyak 137 SD atau bertambah 7 SD dari jumlah di tahun 2015 sebanyak 130 SD. Jumlah murid SD tahun 2016 sebanyak 18.735 murid, dengan jumlah guru PNS sebanyak 578 orang dan guru Non PNS sebanyak 317 orang. Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun 2016 sebanyak 16 SMP atau bertambah 3 SMP dari jumlah di tahun 2015 yaitu 13 SMP. Jumlah murid SMP sebanyak 2.422 murid. Jumlah guru PNS sebanyak 119 orang dan guru Non PNS sebanyak 104 orang.

Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) tahun 2016 sebanyak 4 SMA dan 1 SMK. Jumlah ini sama dengan jumlah di tahun sebelumnya, atau tidak ada penambahan terhadap jumlah sekolah untuk jenjang pendidikan menengah atas. Adapun jumlah murid sebanyak 1.196 orang, dengan ketersediaan guru PNS sebanyak 76 orang dan guru Non PNS sebanyak 45 orang.

Angka melek huruf pada tahun 2015 sebesar 30,80% dan di tahun 2016 naik 0,5 poin menjadi 31,30%. Keadaan ini melampaui dari rencana yang ditargetkan di tahun 2016 yaitu sebesar 31,20% angka melek huruf di Kabupaten Asmat, sehingga pencapaian kinerjanya adalah 100,32%.



Capaian kinerja dari indikator rata-rata lama sekolah adalah 110,68% dari target yang direncanakan untuk tahun 2016 yaitu 4,40 tahun. Pada tahun 2015 rata-rata lama sekolah di Kabupaten Asmat adalah 4,38 tahun dan pencapaiannya di tahun 2016 adalah 4,84 tahun atau naik 0,46 poin.

Angka Partisipasi Sekolah di tahun 2016 untuk kelompok umur 7-12 tahun mencapai 89,20%, hal ini mengindikasikan bahwa persentase tersebut menggambarkan keadaan bahwa dari 100 persen anak usia 7-12 tahun di Kabupaten Asmat sebanyak 89,20% sudah bersekolah di jenjang pendidikan sekolah dasar. Untuk kelompok umur 13-15 tahun sebanyak 85,50% sudah bersekolah di jenjang pendidikan sekolah menengah pertama, dan untuk kelompok umur 16-18 tahun sebanyak 56,20% sudah bersekolah di jenjang pendidikan menengah atas. Persentase Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA yang rendah ini dikarenakan faktor ketersediaan sekolah menengah atas yang berjumlah 5 (lima) sekolah di Kabupaten Asmat, hal ini berdampak terhadap minat anak kelompok umur 16-18 tahun untuk tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan sekolah menengah atas.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD di tahun 2015 adalah 76,21%, dengan target di tahun 2016 adalah 88,60%. Pada tahun 2016 capaian APS SD adalah 100,68% atau naik 12,99 poin menjadi 89,20%. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP dari target yang direncanakan di tahun 2016 adalah 85,30% mencapai 100,23% atau naik 2,12 poin dari keadaan di tahun 2015 yaitu 83,38 menjadi 85,50%. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA di tahun 2015 adalah sebesar 38,89% ditargetkan pada tahun 2016 mencapai 72,80%. Pencapaian di tahun 2016 hanya mampu naik 17,31 poin atau realisasinya hanya mencapai 56,20%, sehingga capaian kinerjanya hanya 77,20%.

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD pada tahun 2015 adalah sebesar 81,25%. Kondisi yang diharapkan di tahun 2016 adalah sebesar 82,33%. Realisasi di tahun 2016 naik sebesar 1,29 poin menjadi 82,54% dengan capaian kinerjanya adalah 100,26%. Capaian kinerja di tahun 2016 dari indikator APK SMP adalah 101,09%. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP tahun 2016 adalah 60,19% atau naik 2,77 poin dari tahun 2015 sebesar 57,42%. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA tahun 2015 adalah 15,92%, di tahun 2016 naik sebesar 9,86 poin menjadi 25,78% sehingga capaian kinerjanya adalah 103,20% dari rencana yang ditargetkan di tahun 2016 yaitu 24,98%.



Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD di tahun 2016 adalah 104,20% dari target yang direncanakan untuk tahun 2016 yaitu 79,77% dengan realisasi di tahun 2016 adalah 83,12% atau naik 6,91 poin dari tahun 2015 yaitu 76,21%. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP di tahun 2015 adalah 26,08% dan di tahun 2016 meningkat sebesar 6,50 poin menjadi 32,58%, dengan capaian kinerjanya hanya sebesar 85,02% dari rencana yang ditargetkan di tahun 2016 yaitu 38,32%. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA di tahun 2016 adalah 17,78% naik 0,13 poin dari tahun 2015 yaitu 17,65%. Capaian kinerja APM SMA adalah sebesar 100,34% dari rencana yang ditargetkan di tahun 2016 yaitu 17,72%.

Tabel 3.13
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 2 pada Misi 2

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun			Capaian (%)	Ket
			2015	2016			
			Keadaan Awal	Target	Realisasi		
Sasaran 2 :							
Terbangunnya dasar pelestarian dan pengembangan kebudayaan Asmat							
2. Peningkatan eksistensi adat dan budaya yang dapat mewarnai dan menjadi semangat dalam berbagai aktifitas							
2.1	Cakupan pelaku seni dan budaya yang meningkat kemampuannya dalam pengembangan seni budaya dan adat Asmat	persen	85,00	87,00	85,75	98,56	Baik
2.2	Jumlah obyek wisata yang telah dikembangkan	obyek	7	7	10	142,86	Baik
2.3	Jumlah pelaku seni dan budaya yang eksis ditingkat nasional maupun internasional	kelompok	6	10	8	80,00	Cukup
2.4	Jumlah materi publikasi budaya Asmat	materi	10	10	7	70,00	Cukup
2.5	Cakupan jumlah obyek budaya yang telah disahkan HAKI	unit	0	10	0	0,00	Kurang
2.6	Cakupan kekayaan budaya yang dilindungi Perda	persen	0	75	0	0,00	Kurang
2.7	Cakupan jumlah kelompok pemuda yang difasilitasi	kelompok	18	34	22	64,71	Sedang
2.8	Cakupan budaya Asmat yang masuk dalam kurikulum lokal	persen	25	25	25	100,00	Baik
Jumlah						556,13	Sedang
Rata-rata Capaian Kinerja						69,52	

Sumber :
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Asmat;
Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat;
Bagian Hukum Setda Kabupaten Asmat;
Tahun 2017



Deskripsi Pencapaian Tahun 2016 :

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 2 pada misi 2 adalah 69,52% yang termasuk dalam kategori sedang. Jumlah indikator untuk sasaran ini sebanyak 8 indikator dengan pencapaian yang melampaui target sebanyak 1 indikator, dengan pencapaian yang memenuhi target sebanyak 1 indikator dan belum memenuhi target sebanyak 6 indikator. Indikator dengan kategori baik sebanyak 3 indikator, dengan kategori cukup sebanyak 2 indikator, dengan kategori sedang sebanyak 1 indikator dan dengan kategori kurang sebanyak 2 indikator.

Pencapaian Kinerja Tahun 2016 :

Obyek wisata dengan kategori wisata budaya antara lain Museum Asmat, dan kampung-kampung di Kampung Syuru, Mbait, Uwus, Yepem dan Beriten (Distrik Agats), Kampung Yasiu, Amanamkai dan Ambisu (Distrik Atsj), Kampung Sawa (Distrik Sawa Erma), Kampung Yaosakor (Distrik Siret), Kampung Waras (Distrik Fayit), Kampung Sesakam (Distrik Jetsy). Untuk kategori wisata alam adalah Taman Nasional Lorentz, Kawasan Rawa Baki dan Kawasan Hutan Hujan Tropis.

Obyek wisata yang dikembangkan sampai dengan tahun 2016 adalah sebanyak 10 obyek wisata antara lain Museum, Taman Nasional Lorentz, Kawasan Rawa Baki, Kawasan Hutan Hujan Tropis, Rumah Pohon Suku Koroway, dan penyelenggaraan pesta-pesta adat di Kampung Amanamkai, Uwus dan Yepem serta sanggar seni ukir di Kampung Yasiu dan Kampung Syuru. Dari rencana target di tahun 2016 sebanyak 7 (tujuh) obyek yang dikembangkan, pencapaiannya sampai dengan tahun 2016 mencapai 10 (sepuluh) obyek wisata sehingga pencapaian kinerjanya mencapai 142.86%.

Jumlah pelaku seni dan budaya yang eksis di tingkat nasional maupun internasional tidak melampaui target yang direncanakan, target untuk tahun 2016 sebanyak 10 hanya tercapai 8 kelompok saja. Kelompok ini terdiri dari kelompok tari, ukir dan anyam. Pencapaian indikator ini dilakukan melalui kegiatan fasilitasi penyelenggaraan festival kebudayaan daerah tingkat provinsi dan pusat, analisa pasar untuk promosi dan pemasaran obyek wisata di Eropa dan pengembangan jaringan kerjasama promosi wisaya lainnya.



Capaian indikator jumlah materi publikasi Asmat tahun 2016 hanya mencapai 7 materi dari target 10 materi, sehingga pencapaian terhadap indikator ini hanya mencapai 70%. Materi publikasi ini berisi tentang sejarah manusia asmat, rumah adat atau rumah bujang/jew, keberadaan rumah pohon, beworpits dan teweraut, kawasan mangrove, taman nasional lorentz dan rawa baki. Berbagai informasi yang berkaitan dengan kebudayaan asmat disebarluaskan dalam bentuk brosur, pamflet, dan dalam bentuk buku.

Jumlah obyek wisata yang telah disahkan HAKInya di tahun 2015 adalah 0 (nol) dan target di tahun 2016 adalah sebanyak 10 (sepuluh) obyek wisata tetapi sampai dengan akhir tahun 2016 tidak ada satupun yang teralisasi atau 0%.

Kekayaan budaya yang dilindungi perda di tahun 2015 adalah 0 (nol) dan target di tahun 2016 adalah sebanyak 75% tetapi sampai dengan akhir tahun 2016 tidak ada satupun yang teralisasi atau 0%.

Jumlah kelompok pemuda di tahun 2015 sebanyak 18 kelompok dan di tahun 2016 menjadi 22 kelompok sedangkan target yang direncanakan di tahun 2016 adalah sebanyak 34 kelompok sehingga pencapaiannya hanya 64.71%. Adapun Kelompok tersebut antara lain KNPI Kabupaten Asmat, KNPI Distrik Agats, Akat, Sawa Erma, Joerat, Unir Sirau, Jetsy, Siret, Atsj, Suator, Fayit dan Pantai Kasuari, Orang Muda Katolik (OMK) Kabupaten Asmat, OMK Salib Suci Agats, OMK Distrik Akat, PAMKA GPKAI Kabupaten Asmat, PAMKA GPKAI Distrik Agats, PAMKA GPKAI Distrik Akat, Pemuda IKT Kabupaten Asmat, Remaja Masjid An-Nur Agats dan Kepramukaan.

Budaya asmat yang masuk dalam kurikulum lokal diharapkan sebesar 25% di tahun 2016, terealisasi sebesar 25% budaya asmat yang sudah masuk dalam kurikulum lokal di Kabupaten Asmat sehingga capaian kinerjanya adalah 100% dari target yang direncanakan. Dinas terkait harus lebih mengembangkan metode pembelajaran yang mudah dimengerti dan diterima oleh murid sehingga budaya lokal ini menjadi warisan bagi generasi muda di masa datang.



Tabel 3.14
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 3 pada Misi 2

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun			Capaian (%)	Ket
			2015	2016			
			Keadaan Awal	Target	Realisasi		
Sasaran 3 :							
Mewujudkan peningkatan peran serta dan partisipasi pemuda dalam pembangunan							
3. Terwujudnya peningkatan kualitas generasi muda yang sehat jasmani dan rohani dan berdaya saing							
3.1	Jumlah jenis sarana olah raga yang dibangun	jenis	3	3	3	100.00	Baik
3.2	Jumlah organisasi kepemudaan berbasis budaya yang dibina	kelompok	3	5	3	60.00	Sedang
Jumlah						160,00	Baik
Rata-rata Capaian Kinerja						80,00	

Sumber :
Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Asmat Tahun 2017

Deskripsi Pencapaian Tahun 2016 :

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 3 pada misi 2 adalah 80,00% yang termasuk dalam kategori baik. Jumlah indikator untuk sasaran ini sebanyak 2 indikator dengan pencapaian yang memenuhi target sebanyak 1 indikator dan belum memenuhi target sebanyak 1 indikator. Indikator dengan kategori baik sebanyak 1 indikator dan kategori sedang sebanyak 1 indikator dan dengan kategori kurang sebanyak 2 indikator.

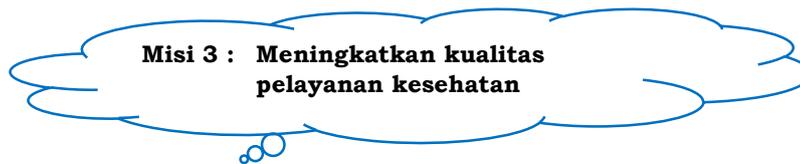
Pencapaian Kinerja Tahun 2016 :

Jumlah sarana olah raga yang sudah dibangun sampai dengan tahun 2016 adalah sebanyak 3 (tiga) sarana olah raga yaitu sarana olah raga bulu tangkis, tinju dan bola voli. Capaian kinerja terhadap indikator ini mencapai 100% dari target yang direncanakan di tahun 2016. Pengembangan dan peningkatan olah raga bagi generasi muda di tahun mendatang dapat lebih dioptimalkan melalui program dan kegiatan dari dinas teknis yang menangani urusan ini sehingga diharapkan ada atlet-atlet nasional berasal dari kabupaten ini.

Organisasi kepemudaan berbasis budaya yang telah dibina di tahun 2015 adalah sebanyak 3 (tiga) kelompok yaitu untuk kelompok ukir, tari-tarian dan

anyaman. Di tahun 2016 jumlah kelompok yang dibina masih tetap berjumlah 3 (tiga) kelompok. Pencapaiannya hanya 60% dari target yang direncanakan dibina di tahun 2016 yaitu sebanyak 5 (lima) kelompok.

3.4.3 EVALUASI PENCAPAIAN MISI 3



**Tabel 3.15
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 1 pada Misi 3**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun			Capaian (%)	Ket
			2015	2016			
			Keadaan Awal	Target	Realisasi		
Sasaran 1 :							
Mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan							
1. Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat							
1.1	Angka Harapan Hidup	tahun	64,87	65,40	67,56	103,30	Baik
1.2	Persentase kelahiran yang ditolong tenaga medis	persen	35,54	36,80	37,74	102,55	Baik
1.3	Rata-rata pelayanan pasien di rumah sakit	hari	4,36	3,30	3,87	85,27	Baik
1.4	Rasio puskesmas per 10.000 penduduk	rasio	1,18	1,60	1,21	75,63	Cukup
1.5	Rasio pustu per 10.000 penduduk	rasio	8,13	8,20	9,15	111,59	Baik
1.6	Rasio dokter per 10.000 penduduk	rasio	1,02	2,40	1,43	59,58	Sedang
1.7	Rata-rata penduduk yang dilayani puskesmas per tahun	orang	4.110	5.890	6.649	112,89	Baik
1.8	Rata-rata penduduk yang dilayani tiap dokter per tahun	orang	2.469	5.460	2.260	47,99	Kurang
2. Meningkatnya jangkauan dan intensitas pelayanan keluarga berencana							
2.1	Jumlah pusat pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja	unit	1	2	1	50,00	Kurang
2.2	Persentase keluarga sejahtera	persen	28,48	22,69	24,72	91,79	Baik
2.3	Rasio akseptor KB per 100 PUS	persen	11,85	49,85	51,40	103,11	Baik
Jumlah						943,69	Baik
Rata-rata Capaian Kinerja						85,79	

Sumber :
Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat Tahun 2017
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Asmat Tahun 2017
Dinas Sosial Kabupaten Asmat Tahun 2017
Badan Pusat Statistik Kabupaten Asmat Tahun 2016



Deskripsi Pencapaian Tahun 2016 :

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 1 pada misi 3 adalah 85,79% yang termasuk dalam kategori baik. Jumlah indikator untuk sasaran ini sebanyak 11 indikator dengan pencapaian kinerja yang melampaui target sebanyak 5 indikator dan yang belum memenuhi target sebanyak 6 indikator. Indikator dengan kategori baik sebanyak 8 indikator, dengan kategori cukup sebanyak 1 indikator dengan kategori kurang sebanyak 2 indikator.

Pencapaian Kinerja Tahun 2016 :

Angka Harapan Hidup tahun 2015 sebesar 64,87 tahun. Target yang direncanakan di tahun 2016 adalah 65,40 tahun. Angka Harapan Hidup di tahun 2016 adalah 67,56 tahun. Persentase capaian kinerjanya adalah 103,30%.

Persentase kelahiran yang ditolong tenaga medis di tahun 2015 adalah 37,74%. Target di tahun 2016 adalah 36,80% kelahiran yang ditolong oleh tenaga medis. Realisasi di tahun 2016 mencapai 37,74% sehingga pencapaian kinerjanya adalah 102,55%.

Rata-rata lama pelayanan pasien di rumah sakit di tahun 2015 adalah 4,36 hari dan capaian di tahun 2016 adalah 3,87 hari, realisasi ini masih berada di bawah target yang direncanakan untuk tahun 2016 yaitu 3,30 hari sehingga capaian kinerja terhadap indikator ini hanya mencapai 85,27%.

Jumlah puskesmas di tahun 2016 masih sama jumlahnya dengan di tahun 2015 yaitu sebanyak 13 puskesmas. Rasio pencapaian di tahun 2015 1,18 sedangkan target rasio puskesmas terhadap 10.000 penduduk yang direncanakan di tahun 2016 adalah 1,60. Pencapaian di tahun 2016 adalah 1,43 sehingga capaian kinerjanya hanya 89,38%.

Jumlah pustu di tahun 2015 adalah sebanyak 72 pustu dan di tahun 2016 bertambah 11 pustu sehingga jumlah pustu di tahun 2016 adalah sebanyak 83 pustu. Rasio pustu per 10.000 penduduk di tahun 2015 adalah 8,13 dan di tahun 2016 adalah 9,15. Target rasio pustu per 10.000 penduduk yang direncanakan di tahun 2016 adalah 8,20 sehingga pencapaian kinerjanya di tahun 2016 adalah 111,59%.



Jumlah dokter tahun 2015 adalah sebanyak 9 orang, dan di tahun 2016 jumlah dokter yang ada berjumlah 13 orang yang terdiri dari 1 orang dokter spesialis anak, 9 orang dokter umum dan 1 orang dokter gigi. Rasio dokter per 10.000 penduduk di tahun 2015 adalah 1,02 dan rasio dokter per 10.000 penduduk di tahun 2016 adalah 1.43, sehingga pencapaian kinerjanya adalah 75,63%.

Rata-rata penduduk yang dilayani puskesmas di tahun 2015 sebanyak 4,110 orang. Pencapaian di tahun 2016 sebanyak 6.649 orang yang dilayani puskesmas per tahun. Target yang direncanakan di tahun 2016 adalah sebanyak 5.890 orang yang dapat dilayani oleh setiap puskesmas. Pencapaian kinerjanya di tahun 2016 adalah 112,89%.

Rata-rata penduduk yang dilayani tiap dokter di tahun 2015 adalah sebanyak 2.469 orang. Target yang direncanakan di tahun 2016 adalah sebanyak 5.460 orang yang dilayani oleh tiap dokter. Pencapaian di tahun 2016 adalah sebanyak 2.620 orang yang dilayani tiap dokter, sehingga pencapaian kinerjanya adalah 47,99%.

Jumlah pusat pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja di tahun 2015 sebanyak 1 (satu) unit yang berada di Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Target untuk tahun 2016 sebanyak 2 (dua) unit, tetapi realisasi di tahun 2016 tidak ada penambahan terhadap pusat pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja sehingga capaian kinerjanya hanya 50,00%.

Persentase keluarga prasejahtera di tahun 2015 adalah sebesar 28,48%. tahun 2016 persentase keluarga prasejahtera adalah sebanyak 24,72%. Pencapaian kinerja di tahun 2016 adalah 91,79% dari target yang direncanakan untuk tahun 2016 sebesar 22,69%.

Rasio akseptor KB per 100 PUS tahun 2015 adalah sebanyak 11,85% dan di tahun 2016 meningkat sebanyak 2,52 poin menjadi 14,37%. Hasil ini masih berada di bawah target yang direncanakan untuk tahun 2016 yaitu sebanyak 49,85%, sehingga pencapaian kinerjanya hanya 28,83%.



Tabel 3.16
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 2 pada Misi 3

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun			Capaian (%)	Ket
			2015	2016			
			Keadaan Awal	Target	Realisasi		
Sasaran 2 :							
Mewujudkan pengarusutamaan gender							
3. Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak							
3.1	Indeks Pembangunan Gender	persen	48,81	49,01	48,96	99,90	Baik
3.2	Indeks Pemberdayaan Gender	persen	36,48	37,29	36,86	98,85	Baik
3.3	Kasus KDRT	kasus	20	12	14	85,71	Baik
Jumlah						284,46	Baik
Rata-rata Capaian Kinerja						94,82	

Sumber :
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Asmat Tahun 2017

Deskripsi Pencapaian Tahun 2016 :

Rata-rata capaian kinerja sasaran 2 pada misi 3 adalah 94,82% yang termasuk dalam kategori baik. Jumlah indikator untuk sasaran ini sebanyak 3 indikator dengan pencapaian yang belum memenuhi target sebanyak 3 indikator, dan ketiga indikator tersebut termasuk kategori baik.

Pencapaian Kinerja Tahun 2016 :

Indeks Pembangunan Gender di tahun 2015 adalah 48,81%. Tahun 2016 direncanakan meningkat menjadi 49,01%, realisasi indeks pembangunan gender di tahun ini adalah 48,96%, pencapaian kerjanya adalah 99,90%.

Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2016 naik 0,26 poin dari tahun 2015 sebesar 36,48% menjadi 48,96%. Pencapaiannya masih dibawah target yang direncanakan dengan capaiannya adalah 99,90%.

Kasus KDRT di tahun 2015 adalah sebanyak 20 kasus, target 2016 adalah berkurang hingga menjadi 12 kasus. Tahun 2016 kasus KDRT sebanyak 14 kasus sehingga capaian kerjanya adalah 85,71%.

3.4.4 EVALUASI PENCAPAIAN MISI 4

Misi 4 : Mendorong pemberdayaan ekonomi kerakyatan

**Tabel 3.17
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 1 pada Misi 4**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun			Capaian (%)	Ket
			2015	2016			
			Keadaan Awal	Target	Realisasi		
Sasaran 1 :							
Mewujudkan pembangunan sektor ekonomi daerah yang berbasis pada penciptaan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat							
1. Terwujudnya pengembangan sektor kelautan dan perikanan berbasis potensi unggulan							
1.1	Kontribusi sektor perikanan tangkap terhadap PDRB	persen	5,13	10,81	6,07	56,15	Sedang
1.2	Jumlah produksi perikanan tangkap	ton	7.627,34	8.161,00	8.969,00	109,90	Baik
1.3	Nilai produksi perikanan tangkap	Rp. juta	91.527,51	97.934,00	115.061,71	117,49	Baik
1.4	Jumlah produksi perikanan budidaya	ton	92,68	96,77	98,08	101,35	Baik
1.5	Nilai produksi perikanan budidaya	Rp. juta	500,91	523,01	530,05	101,35	Baik
1.6	Cakupan jumlah masyarakat pesisir yang diberdayakan	persen	5,40	6,30	7,22	108,90	Baik
2. Terwujudnya peningkatan ketersediaan bahan pangan utama dan keragaman pangan lokal							
2.1	Persentase pengeluaran penduduk untuk pangan	persen	60,62	68,50	63,76	93,08	Baik
2.2	Cakupan jumlah kampung mandiri dan swasembada pangan	persen	5,67	7,60	6,85	90,13	Baik
3. Terwujudnya peningkatan produktifitas hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan							
3.1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	persen	0,88	1,18	1,12	94,92	Baik
3.2	Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB	persen	0,24	0,32	0,30	93,75	Baik
3.3	Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB	persen	0,28	0,22	0,32	145,45	Baik
3.4	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	persen	4,76	5,09	5,08	99,80	Baik
3.5	Rasio jumlah penyuluh pertanian terhadap petani lokal	persen	1,22	3,88	1,33	34,28	Kurang
3.6	Cakupan jumlah kampung tangguh yang diberdayakan	persen	9,50	29,21	13,12	44,92	Kurang
3.7	Cakupan jumlah petani yang ditingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan maupun magang	persen	31,89	42,60	38,16	89,58	Baik



**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN ASMAT
TAHUN 2016**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun			Capaian (%)	Ket
			2015	2016			
			Keadaan Awal	Target	Realisasi		
3.8	Cakupan jumlah kelompok petani dan aparatur yang mendapatkan program peningkatan kapasitas	persen	32,13	39,03	38,01	97,39	Baik
4. Meningkatnya pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam mendukung perekonomian masyarakat							
4.1	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	persen	1,86	2,88	2,52	87,50	Baik
4.2	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	persen	7,08	7,94	8,12	102,27	Baik
4.3	Cakupan jumlah wirausaha baru yang dibina	persen	35,00	100,00	40,00	40,00	Kurang
4.4	Jumlah koperasi aktif	koperasi	87	80	65	81,25	Cukup
4.5	Jumlah anggota koperasi yang aktif	orang	2.349	2.217	1.755	79,16	Cukup
Jumlah						1.868,61	Baik
Rata-rata Capaian Kinerja						88,98	

Sumber :
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Asmat Tahun 2017
Dinas Tanaman Pangan dan Pertanian Kabupaten Asmat Tahun 2017
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Asmat Tahun 2017
Badan Pusat Statistik Kabupaten Asmat Tahun 2016

Deskripsi Pencapaian Tahun 2016 :

Rata-rata capaian kinerja sasaran 1 pada misi 4 adalah 88,98% yang termasuk dalam kategori baik. Jumlah indikator untuk sasaran ini sebanyak 21 indikator dengan pencapaian yang melampaui target sebanyak 7 indikator dan yang belum memenuhi target sebanyak 14 indikator. Pencapaian dengan kategori baik sebanyak 15 indikator, kategori cukup sebanyak 2 indikator, kategori sedang sebanyak 1 indikator dan kategori kurang sebanyak 3 indikator.

Pencapaian Kinerja Tahun 2016 :

Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB untuk tahun 2015 sebesar 5,13%. adapun rencana yang ditargetkan di tahun 2016 yaitu sebesar 10,81%. kenyataannya bahwa di tahun 2016 kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB yaitu hanya mencapai 6,07% sehingga pencapaian kerjanya hanya mencapai 56,15%.



Jumlah produksi perikanan tangkap tahun 2015 sebesar 7.627,34 ton, ditargetkan untuk tahun 2016 yaitu sebesar 8.161,00 ton. Pencapaiannya di tahun 2016 mencapai 8.969,00 ton sehingga kinerjanya mencapai 109,90%.

Nilai produksi perikanan tangkap pada tahun 2015 adalah sebesar 91.527,51 juta rupiah. Sampai dengan akhir tahun 2016 nilai produksinya mencapai 115.061,71 juta rupiah melampaui rencana yang ditargetkan ditahun ini yaitu sebesar 97.934,44 juta rupiah sehingga pencapaian kinerjanya adalah 11,49%.

Jumlah produksi perikanan budidaya tahun 2016 mencapai 101.35% atau sebanyak 98,08 ton melampaui target di tahun yang sama sebanyak 96,77 ton. Sedangkan tahun 2015 jumlah produksi perikanan budidaya sebanyak 92,68 ton.

Nilai produksi perikanan budidaya tahun 2015 sebesar 500,91 ribu rupiah dengan target yang diharapkan untuk tahun 2016 yaitu sebesar 523,01 ribu rupiah. Pencapaian di tahun 2016 melampaui target yang diharapkan sebesar 101,35% atau mencapai 530,05 ribu rupiah.

Pemberdayaan bagi masyarakat pesisir sampai dengan akhir tahun 2016 yang telah dilakukan bagi 991 orang dari jumlah keseluruhan masyarakat pesisir yaitu sebanyak 13.720 orang. Pada tahun 2015 pemberdayaan bagi masyarakat pesisir yang telah dilaksanakan bagi 741 orang atau sebanyak 5,40%. di tahun 2016 target yang diharapkan untuk pemberdayaan bagi masyarakat pesisir yaitu sebanyak 6,63%. Realisasi sampai dengan diakhir tahun 2016 pemberdayaan yang dilakukan untuk masyarakat pesisir sebanyak 7,22% sehingga pencapaian kinerjanya mencapai 108,90%.

Persentase pengeluaran penduduk untuk memenuhi kebutuhan pangan di tahun 2015 adalah 60,62%. Ditargetkan pada tahun 2016 tingkat pengeluaran penduduk untuk pangan adalah 68,50%. Pencapaian ditahun 2016 untuk persentase pengeluaran penduduk untuk mencukupi kebutuhan pangannya adalah 93,08% dari rencana yang targetkan tersebut atau hanya mampu mencapai 63,76%.

Cakupan jumlah kampung mandiri swasembada pangan pada tahun 2015 adalah 5,67%. Target yang direncanakan untuk tahun 2016 adalah 7,60% atau sebanyak 17 dari 221 kampung dalam kategori swasembada pangan.



Pencapaian di tahun 2016 hanya mampu mencapai 15 kampung atau hanya 6,85%, sehingga pencapaian kinerjanya adalah 90,13%.

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB pada tahun 2015 adalah 0,88%. Target yang direncanakan untuk tahun 2016 adalah 1,18%. Realisasi kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB pada tahun 2016 adalah 1,12%, sehingga pencapaian kinerjanya adalah 94,92%.

Kontribusi sektor perkebunan dan sektor peternakan terhadap PDRB tahun 2015 adalah 0,24% dan 0,28%. Pencapaian di tahun 2016 untuk kedua sektor tersebut adalah 0,30% kontribusi dari sektor perkebunan dan 0,32% dari sektor peternakan terhadap pertumbuhan PDRB. Capaian kinerja untuk kedua sektor tersebut adalah 93,75% dan 145,45%.

Kontribusi dari sektor kehutanan di tahun 2015 adalah 4,76% sedangkan target yang direncanakan untuk tahun 2016 adalah 5,09%. Pencapaian di tahun 2016 untuk kontribusi dari sektor kehutanan terhadap pertumbuhan PDRB adalah 5,08% sehingga capaian kinerjanya adalah 99,80%. Kontribusi sektor kehutanan sangat dipengaruhi oleh pemanfaatan kayu untuk pembangunan di kampung-kampung melalui pemanfaatan dan pengelolaan alokasi dana kampung yang dilaksanakan oleh masyarakat sehingga kontribusi dari sektor kehutanan ini memberikan dampak yang cukup baik terhadap pertumbuhan PDRB.

Jumlah penyuluh pada tahun 2015 sebanyak 81 orang dan di tahun 2016 terdapat penambahan tenaga penyuluh sebanyak 7 (tujuh) orang sehingga jumlah petugas penyuluh di tahun 2016 adalah sebanyak 88 orang. Rasio jumlah penyuluh terhadap petani lokal pada tahun 2015 adalah 1,22% dan rasio di tahun 2016 adalah sebesar 1,33% yang berada jauh dari target yang direncanakan di tahun 2016 yaitu 3,88%. Pencapaian kinerja untuk rasio jumlah penyuluh di tahun 2016 hanya mencapai 34,28%.

Cakupan kampung tangguh yang diberdayakan tahun 2015 adalah sebanyak 21 kampung dari jumlah 221 kampung yang ada atau 9,50%. Target yang direncanakan di tahun 2016 adalah sebanyak 65 kampung. Jumlah kampung tangguh yang diberdayakan di tahun 2016 berjumlah 9 (sembilan) kampung sehingga keseluruhan sampai dengan akhir tahun 2016 sudah berjumlah 30 kampung atau 13,12%. Persentase pencapaian realisasi terhadap rencana adalah hanya sebesar 44,92%.



Cakupan jumlah petani yang ditingkatkan kapasitasnya yang ditargetkan ditahun 2016 adalah sebanyak 42.60%. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan di tahun 2016 telah melaksanakan kegiatan magang dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas petani dan peternak bagi 2.531 orang dari jumlah keseluruhan 6.633 orang yang menjadi target pembinaan untuk peningkatan kapasitas petani atau hanya mencakup 38.16% dari rencana yang ditargetkan yaitu 42.60% sehingga pencapaian kerjanya hanya 89.58%.

Cakupan jumlah kelompok petani dan aparatur yang mendapatkan program peningkatan kapasitas pada tahun 2015 adalah 32.13%. Di tahun 2016 rencana yang ditargetkan adalah 39.03%. cakupan jumlah kelompok petani dan aparatur yang diberikan peningkatan kapasitasnya tercatat 38.01% sehingga pencapaian kerjanya sebesar 97.39%.

Kontribusi sektor perindustrian dan sektor perdagangan terhadap PDRB di tahun 2015 adalah 1,86% dan 7,08%. Rencana yang ditargetkan di tahun 2016 adalah sebesar 2,88% dan 7,94%. Kontribusi dari sektor perindustrian terhadap PDRB adalah 2,52% di tahun 2016, capaian kerjanya 87,50% dan dari sektor perdagangan melampaui target di tahun 2016 dengan capaian kerjanya mencapai 102,27% yang mana kontribusi dari sektor ini adalah 8,12%. Hal ini disebabkan bertambah dan berkembangnya sektor-sektor usaha dibidang perdagangan yang dilihat diperoleh dari makin banyaknya pertumbuhan kios-kios baru baik di ibukota kabupaten, ibukota distrik maupun di kampung-kampung yang berimbas dari pelaksanaan pembangunan melalui kebijakan pengelolaan alokasi dana kampung sehingga perputaran uang dari kegiatan pelaksanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi untuk skala kecil.

Cakupan jumlah wirausaha baru yang dibina tahun 2015 adalah sebanyak 50,00% dan direncanakan wirausaha baru yang dibina adalah sebanyak 100,00% di tahun 2016. Pencapaian ini tidak tercapai di tahun 2016 sehingga kerjanya adalah 0,00%

Jumlah koperasi aktif yang ada tahun 2015 berjumlah 87 koperasi. Tahun 2016 terdapat 22 koperasi yang dinyatakan sudah tidak aktif dan dicabut ijin kerjasannya sehingga jumlah koperasi yang aktif tahun 2016 berjumlah 65 koperasi dengan jumlah anggota koperasi sebanyak 1.755 orang. Jumlah anggota koperasi di tahun 2016 ini capaian kerjanya hanya 79,16% dari target jumlah anggota koperasi aktif sebanyak 2.217 orang.



Tabel 3.18
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 2 pada Misi 4

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun			Capaian (%)	Ket
			2015	2016			
			Keadaan Awal	Target	Realisasi		
Sasaran 2 : Mewujudkan pembangunan sektor pariwisata minat khusus yang berbasis pada kekayaan adat dan budaya Asmat							
5. Terwujudnya Masyarakat Asmat sadar budaya dan wisata dalam rangka perwujudan Kabupaten Asmat sebagai daerah tujuan wisata minat khusus							
5.1	Jumlah kunjungan wisatawan domestik	orang	1.365	1.536	1,487	96,81	Baik
5.2	Jumlah kunjungan wisatawan asing	Orang	318	443	389	87,81	Baik
5.3	Rata-rata lama tinggal wisatawan domestik	hari	3	4	3	75,00	Cukup
5.4	Rata-rata lama tinggal wisatawan asing	hari	2	3	2	66,67	Sedang
5.5	Cakupan jumlah kelompok ukir yang dibina	persen	17,00	35,89	28,00	78,02	Cukup
5.6	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan	obyek	4	4	4	100,00	Baik
5.7	Jumlah kampung wisata yang dikembangkan melalui kemitraan	kampung	5	7	5	71,43	Cukup
5.8	Cakupan jumlah kelompok seni budaya yang difasilitasi	persen	28,76	47,90	35,67	74,47	Cukup
Jumlah						650,20	Baik
Rata-rata Capaian Kinerja						81,27	

Sumber :
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Asmat Tahun 2017
Badan Pusat Statistik Kabupaten Asmat Tahun 2016

Deskripsi Pencapaian Tahun 2016 :

Rata-rata capaian kinerja sasaran 2 pada misi 4 adalah 81,27% yang termasuk dalam kategori baik. Jumlah indikator untuk sasaran ini sebanyak 8 indikator dengan pencapaian yang memenuhi target sebanyak 1 indikator dan yang belum memenuhi target sebanyak 7 indikator. Pencapaian dengan kategori baik sebanyak 3 indikator, kategori cukup sebanyak 4 indikator dan kategori sedang sebanyak 1 indikator.

Pencapaian Kinerja Tahun 2016 :

Jumlah kunjungan wisatawan sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah untuk mempromosikan keunikan daerahnya, selain itu juga faktor sarana



untuk menjangkau destinasi wisata yang dipromosikan turut mempengaruhi minat wisatawan untuk berkunjung ke suatu daerah. Tahun 2015, jumlah kunjungan wisatawan domestik yang berkunjung sebanyak 1,365 orang, sedangkan wisatawan asing sebanyak 318 orang dalam satu tahun tersebut. Dari rencana yang ditargetkan untuk jumlah kunjungan wisatawan domestik sebanyak 1.536 orang dan wisatawan asing sebanyak 443 orang, di tahun 2016 terealisasi sebanyak 1.487 kunjungan wisatawan domestik dan 389 kunjungan wisatawan asing. Capaian kinerja untuk kedua indikator ini adalah 96,81% dan 87,81%.

Adapun rata-rata lama tinggal untuk wisatawan domestik di tahun 2015 adalah 3 (tiga) hari dan wisatawan asing adalah 2 (dua) hari. Rata-rata lama tinggal untuk setiap kunjungan wisatawan domestik dan asing di tahun 2016 masih seperti di tahun 2015 yaitu 3 (tiga) hari untuk wisatawan domestik dan 2 (dua) hari untuk setiap kunjungan wisatawan asing.

Cakupan jumlah kelompok ukir yang dibina di tahun 2015 adalah sebanyak 17% dan diharapkan untuk tahun 2016 dapat dilakukan pembinaan mencapai 35.89% dari keseluruhan jumlah kelompok pengukir yang ada. Realisasi terhadap jumlah kelompok ukir yang dibina di tahun 2016 hanya mencapai 28% sehingga capaian terhadap kinerjanya hanya 78,02%.

Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu di tahun 2015 berjumlah 4 (empat) destinasi wisata, dan di tahun 2016 tidak ada penambahan terhadap destinasi wisata yang dikembangkan. Demikian halnya dengan jumlah kampung wisata yang dikembangkan melalui kemitraan dengan melibatkan masyarakat masih seperti di tahun 2015 yaitu 5 (lima) kampung, yang meliputi Kampung Uwus, Kampung Yepem, Kampung Syuru, Kampung Yasiu dan Kampung Amanamkai.

Cakupan jumlah kelompok seni budaya yang difasilitasi tahun 2015 sebanyak 28,76%, di tahun 2016 menjadi 35,67% ini masih berada dibawah target yang direncanakan untuk tahun yang sama yaitu sebesar 47,90% dari jumlah keseluruhan kelompok seni budaya yang ada, hal ini mengakibatkan capaian kinerjanya hanya 74,47%.

3.4.5 EVALUASI PENCAPAIAN MISI 5

Misi 5 : Mempercepat pembangunan infrastruktur dan memperluas lapangan kerja

**Tabel 3.19
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 1 pada Misi 5**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun			Capaian (%)	Ket
			2015	2016			
			Kedadaan Awal	Target	Realisasi		
Sasaran 1 :							
Mewujudkan peningkatan ketersediaan jaringan infrastruktur dasar daerah dalam mendukung percepatan pembangunan daerah diberbagai bidang							
1. Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah secara konsisten							
1.1	Persentase ketaatan penduduk terhadap RTRW	persen	21,50	35,00	23,00	65,71	Sedang
1.2	Persentase luas kawasan yang sudah dibangun sesuai dengan peruntukannya	persen	9,25	20,00	10,75	53,75	Kurang
2. Terwujudnya peningkatan ketersediaan infrastruktur pengairan yang berkualitas dan merata							
2.1	Persentase jaringan irigasi yang dimanfaatkan sesuai dengan fungsi	persen	23,25	40,00	24,65	61,63	Sedang
2.2	Persentase sarana pengairan dan air minum yang berfungsi dengan baik	persen	2,26	6,54	3,62	55,35	Sedang
3. Terwujudnya peningkatan kualitas jalan dan jembatan							
3.1	Persentase peningkatan panjang jalan per tahun	persen	7,80	12,74	12,94	101,57	Baik
3.2	Persentase jalan dalam kondisi baik	persen	66,02	83,22	85,99	103,33	Baik
4. Terwujudnya pemukiman layak huni							
4.1	Persentase penduduk dengan perumahan yang layak	persen	24,74	26,54	25,71	96,87	Baik
4.2	Persentase rumah dengan lantai bukan tanah	persen	98,12	98,35	100,00	101,68	Baik
4.3	Persentase rumah dengan atap layak	persen	23,72	28,43	24,84	99,44	Baik
Jumlah						739,33	Baik
Rata-rata Capaian Kinerja						82,15	

Sumber :
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2017
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Asmat Tahun 2017
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Asmat Tahun 2017
Dinas Sosial Kabupaten Asmat Tahun 2017
Badan Pusat Statistik Kabupaten Asmat Tahun 2016



Deskripsi Pencapaian Tahun 2016 :

Rata-rata capaian kinerja sasaran 1 pada misi 5 adalah 77,35% yang termasuk dalam kategori cukup. Jumlah indikator untuk sasaran ini sebanyak 9 indikator dengan pencapaian yang memenuhi target sebanyak 1 indikator dan yang belum memenuhi target sebanyak 8 indikator. Pencapaian dengan kategori baik sebanyak 4 indikator, kategori cukup sebanyak 1 indikator, kategori sedang sebanyak 3 indikator dan kategori kurang sebanyak 1 indikator.

Pencapaian Kinerja Tahun 2016 :

Persentase ketaatan penduduk terhadap RTRW tahun 2015 adalah 21,50%, di tahun 2016 persentase ketaatan penduduk terhadap RTRW naik 1,50 poin menjadi 23,00%. Persentase yang ditargetkan di tahun 2016 adalah sebesar 35,00% sehingga pencapaian kinerja persentase ketaatan penduduk terhadap RTRW adalah 65,71%.

Persentase luas kawasan yang sudah dibangun sesuai dengan peruntukannya tahun 2016 adalah 10,75% atau naik 1,50 poin dari tahun 2015 yaitu 9,25%. Pencapaian kinerjanya ditahun 2016 adalah 53,75% dari target yang direncanakan yaitu 20,00% luas kawasan yang sudah dibangun sesuai dengan peruntukannya.

Persentase jaringan irigasi yang dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya di tahun 2015 adalah 23,25%. Tahun 2016 persentase jaringan irigasi yang sudah dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya adalah 24,65% yang masih jauh dari target yang direncanakan untuk tahun 2016 yaitu 40,00% sehingga pencapaian kinerjanya adalah 61,63%.

Persentase sarana pengairan dan air minum yang berfungsi dengan baik di tahun 2015 adalah 2,26% atau hanya 5 kampung dari 221 kampung yang sudah tersambung jaringan pipa air minum. Di tahun 2016 ditargetkan 14 kampung telah tersambung jaringan pipa air minum. Realisasi di tahun 2016 baru mencapai 3,62% atau hanya 8 kampung dari 221 kampung yang sudah tersambung dengan pipa air minum, sehingga pencapaian kinerjanya di tahun 2016 hanya 55,35%.



Jumlah panjang jalan pada tahun 2015 adalah 223,62 km, yang terdiri atas jalan kelas IIIIC dengan panjang jalan 82,24 km, jalan baja komposit sepanjang 5,24 km, jalan jembatan kayu sepanjang 115,20 km dan jalan jembatan beton 20,94 km. Jumlah panjang jalan pada tahun 2016 adalah 256,17 km, yang terdiri atas kelas IIIIC dengan panjang jalan 84,50 km, jalan baja komposit sepanjang 5,24 km, jalan jembatan kayu sepanjang 139,68 km dan jalan jembatan beton 26,75 km. Persentase peningkatan panjang jalan di tahun 2016 adalah sebesar 12,94%. Capaian kinerja peningkatan panjang jalan adalah 101,57%.

Kondisi jalan dalam keadaan baik di tahun 2015 adalah sepanjang 135,19 km atau 66,02%. Kondisi jalan dalam keadaan baik di tahun 2016 adalah sepanjang 220,28 km atau 85,99%. Kondisi jalan sedang adalah sepanjang 12,58 km atau 4,91%, dalam kondisi rusak ringan adalah sepanjang 6,03 km atau 2,35% dan jalan dalam kondisi rusak berat adalah sepanjang 17,28 km atau 6,75% dari keseluruhan panjang jalan yang ada. Rencana yang ditargetkan di tahun 2016 adalah 83,22% kondisi jalan dalam keadaan baik, realisasi untuk kondisi jalan dalam keadaan baik di tahun 2016 adalah 85,99%, sehingga capaian kinerjanya adalah 103,33%.

Persentase penduduk dengan perumahan layak di tahun 2015 adalah sebesar 24,47% atau sebanyak 6.774 rumah yang dihuni berada dalam kondisi yang layak untuk ditempati. Persentase yang direncanakan di tahun 2016 adalah 26,54%. Di tahun 2016 terdapat 7.116 rumah penduduk yang layak untuk dihuni atau sebanyak 25,71%. Persentase capaian kinerja di tahun 2016 ini sebesar 96,87%.

Persentase rumah dengan lantai bukan tanah di tahun 2015 adalah 98,12% dan ditargetkan di tahun 2016 adalah 98,35% rumah penduduk dengan kondisi lantai yang bukan tanah. Keadaan geografis di Kabupaten Asmat menyebabkan rumah penduduk dibangun dengan kontruksi panggung dengan bahan utamanya adalah kayu, sehingga sebagian besar kondisi lantainya bukan tanah. Persentase di tahun 2016 dari indikator ini adalah 100% sehingga capaiannya adalah 101,68% dari rencana yang ditargetkan di tahun 2016.

Sebanyak 75,16% penduduk masih memiliki rumah dengan atap yang terbuat dari daun sagu dan sisanya sebanyak 24,84% sudah memiliki rumah dengan atap yang terbuat dari seng di tahun 2016. Peningkatan sebesar 1,12% dari tahun sebelumnya ini terjadi dari kebijakan melalui pemanfaatan alokasi dana

kampung berupa pembangunan rumah masyarakat yang layak huni yang dikerjakan sendiri oleh masyarakat kampung. Capaian kinerja untuk tahun 2016 ini adalah 99,44% atau masih berada di bawah target yang direncanakan persentasenya sebesar 24,98%.

**Tabel 3.20
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 2 pada Misi 5**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun			Capaian (%)	Ket
			2015	2016			
			Keadaan Awal	Target	Realisasi		
Sasaran 2 :							
Mewujudkan pengembangan sistem transportasi dan telekomunikasi yang handal dan efisien							
5. Terwujudnya peningkatan ketersediaan infrastruktur perhubungan darat, laut dan udara guna memperlancar arus orang dan barang dari dan ke Asmat							
5.1	Cakupan kecukupan prasarana transportasi	persen	36,00	45,90	46,56	101,44	Baik
5.2	Cakupan penumpang keluar masuk Kabupaten Asmat	persen	8,53	9,37	9,18	97,97	Baik
6. Terwujudnya peningkatan jaringan komunikasi yang lebih memadai							
6.1	Cakupan rumah tangga yang memiliki akses handphone	persen	12,23	15,64	13,82	88,36	Baik
6.2	Cakupan rumah tangga yang memiliki akses telepon	persen	0,48	0,51	0,48	94,12	Baik
6.3	Cakupan rumah tangga yang memiliki akses internet	persen	0,59	2,54	1,72	67,72	Sedang
Jumlah						449,61	Baik
Rata-rata Capaian Kinerja						89,92	

Sumber :
Dinas Perhubungan Kabupaten Asmat Tahun 2017
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Asmat Tahun 2017
Badan Pusat Statistik Kabupaten Asmat Tahun 2016

Deskripsi Pencapaian Tahun 2016 :

Rata-rata capaian kinerja sasaran 2 pada misi 5 adalah 89,92% yang termasuk dalam kategori baik. Jumlah indikator untuk sasaran ini sebanyak 5 indikator dengan pencapaian yang melampaui target sebanyak 1 indikator dan yang belum memenuhi target sebanyak 4 indikator. Pencapaian dengan kategori baik sebanyak 4 indikator dan kategori sedang sebanyak 1 indikator.

Pencapaian Kinerja Tahun 2016 :

Cakupan kecukupan prasarana transportasi tahun 2015 adalah 36,00% dan di tahun 2016 meningkat sebesar 10,56 poin menjadi 46,56% melebihi target



yang direncanakan di tahun 2016 yaitu 45,90% sehingga pencapaian kinerjanya adalah 101,44%.

Jumlah penumpang masuk tahun 2015 adalah sebanyak 9.862 orang dan penumpang keluar sebanyak 5.275 orang sehingga jumlah keseluruhan penumpang masuk dan keluar sebanyak 15.119 orang. Cakupan persentase penumpang keluar masuk di tahun 2015 adalah sebesar 8,53% dari jumlah penduduk di tahun yang sama. Pada tahun 2016 jumlah penumpang masuk adalah sebanyak 11.927 orang dan penumpang keluar sebanyak 4.737 orang sehingga jumlah keseluruhan penumpang masuk dan keluar sebanyak 16.664 orang. Cakupan persentase penumpang keluar masuk di tahun 2016 adalah sebesar 9,18% dari jumlah penduduk di tahun 2016. Pencapaian kinerja atas indikator ini sebesar 97,97% dari target yang direncanakan di tahun 2016 yaitu 9,37% cakupan persentase penumpang yang masuk dan keluar.

Cakupan penumpang keluar masuk Kabupaten Asmat di tahun 2015 yaitu 8,43% dan meningkat di tahun 2016 sebesar 2,65 poin menjadi 11,08% yang melebihi target yang direncanakan sebesar 9,37% sehingga pencapaian kinerja dari cakupan penumpang keluar masuk Kabupaten Asmat adalah 118,25%.

Di ibukota kabupaten terdapat 2 (dua) menara telekomunikasi seluler yang baru dapat dinikmati di ibukota kabupaten yang jangkauannya meliputi 5 (lima) kampung di ibukota kabupaten yaitu Kampung Bis Agats, Asuwetsy, Syuru, Kaye dan Mbait, serta beberapa kampung di pinggiran ibukota yaitu Kampung Yepem, Yaun, Yufri. 1 (satu) menara telekomunikasi seluler yang dibangun di ibukota Distrik Atsj hanya mampu menjangkau Kampung Atsj, Kampung Yasiuw, Kampung Bakasei. 1 (satu) menara telekomunikasi seluler yang dibangun di Kampung Omor, dapat dijangkau oleh Kampung Omor, Onavai, Yamas dan Yeni. Dari total 221 kampung yang ada di kabupaten asmat, tahun 2015 kebutuhan akses telekomunikasi baru dapat dinikmati di 15 (lima belas) kampung dari jumlah keseluruhan 221 kampung yang ada.

Tahun 2016 terdapat 1 (satu) menara telekomunikasi yang dibangun di ibukota Distrik Sawa Erma yang jangkauannya meliputi Kampung Sauti, Erma, Sona, Sawa dan Er. Dari 221 kampung yang ada baru 20 kampung yang dapat menikmati akses telekomunikasi atau hanya 9.05% kampung yang bisa mengakses sarana telekomunikasi. Sampai dengan akhir tahun 2016 ini, bila dilihat dari jumlah penduduk yang dapat mengakses sarana telekomunikasi seluler di tahun 2016 adalah sebanyak 12.322 orang atau hanya 11.85% dari

keseluruhan jumlah penduduk, dengan persentase rumah tangga yang dapat mengaksesnya sebanyak 13.82%.

Cakupan rumah tangga yang memiliki akses handphone di tahun 2015 adalah 12.23%, dan ditargetkan di tahun 2016 mencapai 15.64%, sedangkan realisasinya sampai dengan akhir tahun hanya mampu dijangkau oleh 13.82% rumah tangga sehingga pencapaian kinerjanya hanya 88.36%.

Akses internet yang diperoleh dari jaringan wifi yang dikelola penyedia jasa swasta tersebar di ibukota kabupaten, sebagian di ibukota Distrik Atsj, Ayib, Pantai Kasuari, Suator dan Suru Suru serta di beberapa kampung seperti Kampung Sagare, Tomor dan Munu. Jaringan wifi ini disediakan untuk dapat diakses oleh rumah tangga dengan cara berlangganan bulanan maupun dengan pembelian voucher untuk akses dalam satuan jam yang aktif untuk pemakaian satu, tiga dan tujuh hari. Di tahun 2016 akses rumah tangga terhadap internet hanya 506 rumah tangga atau persentasenya 1.72% dari jumlah rumah tangga yang ada. Peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya 0.59% rumah tangga ini terjadi karena penyedia jasa ini terus membuka jaringannya di beberapa ibukota distrik maupun di beberapa kampung. pertumbuhan yang lambat ini diakibatkan karena masih mahalnya harga yang ditawarkan untuk pemakaian voucher 3 (tiga) jam seharga 25 ribu rupiah, sedangkan untuk tarif bulanan dengan harga yang variatif antara beberapa penyedia jasa yang berkisar antara 800 ribu sampai dengan 1 juta rupiah.

Tabel 3.21
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 3 pada Misi 5

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun			Capaian	Ket
			2015	2016			
			Keadaan Awal	Target	Realisasi		
Sasaran 3 :							
Meningkatkan penyerapan tenaga kerja							
7. Terwujudnya peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja yang selaras							
7.1	Tingkat partisipasi angkatan kerja	persen	77,18	83,54	81,72	97,82	Baik
7.2	Tingkat pengangguran terbuka	persen	0,53	0,43	0,48	89,58	Baik
Jumlah						187,40	Baik
Rata-rata Capaian Kinerja						93,70	

Sumber :
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Asmat Tahun 2017
Badan Pusat Statistik Kabupaten Asmat Tahun 2016

Deskripsi Pencapaian Tahun 2016 :

Rata-rata capaian kinerja sasaran 3 pada misi 5 adalah 93,70% yang termasuk dalam kategori baik. Jumlah indikator untuk sasaran ini sebanyak 2 indikator dengan pencapaian yang memenuhi target sebanyak 2 indikator. Pencapaian kinerja dengan kategori baik sebanyak 2 indikator.

Pencapaian Kinerja Tahun 2016 :

Pencapaian kinerja dari indikator tingkat partisipasi nagkatan kerja tahun 2016 adalah sebesar 97,82% dari target yang direncanakan di tahun 2016 yaitu sebesar 83,54%. Tingkat partisipasi angkatan kerja di tahun 2016 adalah 84,13% atau naik 4,54 poin dari tahun 2015 sebesar 77,18%.

Target pencapaian tingkat pengangguran terbuka di tahun 2016 adalah 0,43% atau meningkat sebesar 0,10 poin dari keadaan di tahun 2015 yaitu 0,53%. Pencapaian kinerja indikator ini adalah 89,58% karena tingkat pengangguran terbuka di tahun 2016 masih berada di bawah target yang direncanakan dengan persentasenya tingkat pengangguran terbuka adalah sebesar 0,48%.

Tabel 3.22
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 4 pada Misi 5

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun			Capaian (%)	Ket
			2015	2016			
			Keadaan Awal	Target	Realisasi		
Sasaran 4 :							
Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan dan penanggulangan bencana yang handal							
8. Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam yang berkelanjutan							
8.1	Luas hutan lindung	hektar	1.087.531,17	1.087.531,17	1.087.531,17	100,00	Baik
8.2	Luas hutan produksi	juta hektar	0,08	0,08	0,08	100,00	Baik
8.3	Cakupan jumlah kelompok masyarakat asli yang dibina dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi	persen	30,00	100,00	40,00	40,00	Kurang
8.4	Jumlah kelompok masyarakat yang berperan serta dalam pengawasan kelestarian hutan	persen	30,00	100,00	40,00	40,00	Kurang
8.5	Jumlah luas areal rehabilitasi dan konservasi hutan	hektar	570,69	3.232,04	770,69	23,85	Kurang



**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN ASMAT
TAHUN 2016**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun			Capaian (%)	Ket
			2015	2016			
			Keadaan Awal	Target	Realisasi		
9. Terwujudnya sistem kewaspadaan dini terhadap bencana							
9.1	Cakupan kelengkapan peralatan untuk pengendalian kebakaran hutan	persen	5,00	19,80	5,00	25,25	Kurang
Jumlah						329,10	Kurang
Rata-rata Capaian Kinerja						54,85	

*Sumber :
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2017
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asmat Tahun 2017
Dinas Sosial Kabupaten Asmat Tahun 2017*

Deskripsi Pencapaian Tahun 2016 :

Rata-rata capaian kinerja sasaran 4 pada misi 5 adalah 54,85% yang termasuk dalam kategori sedang. Jumlah indikator untuk sasaran ini sebanyak 6 indikator dengan pencapaian kinerja yang memenuhi target sebanyak 2 indikator dan pencapaian kinerja yang belum memenuhi target sebanyak 4 indikator. Pencapaian kinerja dengan kategori baik sebanyak 2 indikator dan sebanyak 4 indikator lainnya dengan kategori kurang.

Pencapaian Kinerja Tahun 2016 :

Luas hutan lindung di tahun 2015 adalah 1.087.531,17 hektare dan target yang direncanakan untuk tahun 2016 adalah seluas 1.087.531,17 hektar. Luas hutan lindung di tahun 2016 masih tetap dan sesuai dengan target yang direncanakan, dalam arti bahwa kawasan yang peruntukannya sebagai kawasan hutan lindung masih tetap terjaga, sehingga pencapaian kerjanya adalah 100%. Demikian halnya dengan kawasan yang diperuntukan sebagai hutan produksi yaitu sebesar 0.08 juta hektare yang direncanakan di tahun 2016 sesuai kenyataan di tahun 2016, sehingga capaian kerjanya juga mencapai 100%.

Cakupan jumlah kelompok masyarakat asli yang dibina dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi di tahun 2015 adalah sebanyak 30,00%. Target yang direncanakan untuk tahun 2016 adalah 100,00% dari jumlah kelompok masyarakat asli yang dibina dalam kawasan hutan lindung dan hutan

produksi. Cakupan jumlah yang dibina sampai dengan tahun 2016 baru berjumlah 30,00% sehingga pencapaian kerjanya hanya 40,00%.

Jumlah kelompok masyarakat yang berperanserta dalam pengawasan kelestarian hutan di tahun 2015 sebanyak 30,00% dan diharapkan jumlah kelompok masyarakat yang berperanserta dalam pengawasan kelestarian hutan di tahun 2016 sebanyak 100,00%. Pencapaiannya sampai dengan tahun 2016 adalah sebanyak 40,00% atau capaian kerjanya adalah 40,00% dari target yang direncanakan.

Jumlah luas areal hutan rehabilitasi dan konservasi di tahun 2015 adalah seluas 570,69 hektar dan direncanakan menjadi 3.232,04 hektar di tahun 2016. Pencapaian di tahun 2016 adalah seluas 770,69 hektar sehingga capaian kerjanya adalah 23,85%.

Cakupan kelengkapan peralatan pengendalian kebakaran hutan di tahun 2015 adalah 5,00% dan diharapkan cakupan kelengkapannya adalah 19,80% di tahun 2016. Pencapaian di tahun 2016 tidak ada penambahan kelengkapan peralatan sehingga jumlah cakupannya adalah 5,00% dari target yang direncanakan tersebut. Pencapaian kerjanya adalah 25,25%.

3.4.6 EVALUASI PENCAPAIAN MISI 6



Tabel 3.23
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 1 pada Misi 6

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun			Capaian (%)	Ket
			2015	2016			
			Keadaan Awal	Target	Realisasi		
Sasaran 1 :							
Mewujudkan pemberdayaan masyarakat berbasis kampung dan perlindungan sosial							
1. Terwujudnya peningkatan upaya pemberdayaan sosial masyarakat							
1.1	Persentase pemilihan kepala kampung dilakukan secara demokratis	persen	4,07	10,33	11,21	108,52	Baik
1.2	Persentase kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	persen	0,00	15,26	0,00	0,00	Kurang



**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN ASMAT
TAHUN 2016**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun			Capaian (%)	Ket
			2015	2016			
			Keadaan Awal	Target	Realisasi		
1.3	Persentase kelompok binaan PKK	persen	14,74	30,46	22,11	72,59	Cukup
1.4	Persentase kampung mandiri dalam menyusun perencanaan partisipatif	persen	3,62	5,00	4,07	81,40	Cukup
2. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup masyarakat kampung berbasis kearifan lokal							
2.1	Cakupan kampung mandiri	persen	1,00	2,00	1,50	75,00	Cukup
2.2	Persentase kampung yang mendapat aliran listrik	persen	4,07	6,72	4,07	64,91	Sedang
2.3	Persentase rumah tangga di kampung yang memiliki akses terhadap pelayanan air minum	persen	3,17	8,37	3,77	45,04	Kurang
2.4	Jumlah hutan adat dan tempat sakral yang telah di-Perda-kan	jumlah	0	1	0	0,00	Kurang
2.5	Persentase tema dalam hukum adat yang diakomodasikan dalam Perda	persen	0,00	2,22	2,88	129,73	Baik
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam praktek demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan							
3.1	Persentase masukan masyarakat yang diakomodasikan dalam Perda	persen	0,00	43,57	43,75	100,41	Baik
3.2	Persentase rata-rata dengar pendapat dengan masyarakat dalam penyusunan Perda	persen	4,17	5,44	4,71	87,50	Baik
3.3	Persentase usulan masyarakat melalui musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	persen	63,84	64,37	64,10	99,58	Baik
Jumlah						864,68	Cukup
Rata-rata Capaian Kinerja						72,06	

Sumber :

*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Asmat Tahun 2017
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Asmat Tahun 2017
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Asmat Tahun 2017
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Asmat Tahun 2017
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Asmat Tahun 2017
Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat Tahun 2017
Bagian Hukum Setda Kabupaten Asmat Tahun 2017*

Deskripsi Pencapaian Tahun 2016 :

Rata-rata capaian kinerja sasaran 1 pada misi 6 adalah 72,06% yang termasuk dalam kategori cukup. Jumlah indikator untuk sasaran ini sebanyak 12 indikator dengan pencapaian kinerja yang melampaui target sebanyak 2 indikator, pencapaian kinerja yang memenuhi target sebanyak 1 indikator dan pencapaian kinerja yang belum memenuhi target sebanyak 9 indikator. Pencapaian kinerja dengan kategori baik sebanyak 6 indikator, pencapaian kinerja dengan kategori cukup sebanyak 2 indikator, pencapaian kinerja dengan kategori sedang sebanyak 1 indikator dan sebanyak 3 indikator lainnya dengan kategori kurang.



Pencapaian Kinerja Tahun 2016 :

Di tahun 2016 terdapat 116 kampung yang melaksanakan pemilihan kepala kampung. Sebanyak 11.21% atau sebanyak 13 kampung, pemilihan kepala kampung tersebut telah dilaksanakan secara demokratis. Capaian kinerjanya untuk tahun 2016 adalah 108.52%. Pemahaman masyarakat dan calon kepala kampung yang ikut serta dalam pemilihan tersebut semakin baik, hal ini dipengaruhi oleh kegiatan penguatan kapasitas bagi kepala kampung dan aparatnya yang dilakukan oleh instansi terkait sehingga memberikan dampak terhadap proses penyelenggaraan pemilihan kepala kampung.

Persentase kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat tahun 2015 adalah sebanyak 0,00% dan target yang direncanakan di tahun 2016 adalah sebanyak 15,26%. Pencapaiannya di tahun 2016 adalah sebesar 0,00% sehingga pencapaian kinerjanya adalah 0,00%.

Persentase kelompok binaan PKK tahun 2015 adalah sebanyak 14 kelompok atau 14,74%. Target yang direncanakan di tahun 2016 adalah 30,46%. Realisasi di tahun 2016 adalah sebanyak 21 kelompok atau sebesar 22,11% kelompok binaan PKK sehingga pencapaian kinerjanya mencapai 72,59%.

Persentase kampung mandiri dalam penyusunan perencanaan partisipatif di tahun 2015 adalah 3,62%, ditargetkan di tahun 2016 mencapai 5,00%. Realisasi di tahun 2016 hanya naik 0,45 poin dari tahun sebelumnya menjadi 4,07%. Capaian ini jauh dibawah target yang ditetapkan sehingga capaian kinerjanya hanya 81.40%. Dari 221 kampung yang ada, hanya 9 kampung yang sedikit lebih baik dalam hal penyusunan perencanaan partisipatif yang melibatkan para pemangku kepentingan yang ada di kampung. kampung-kampung tersebut adalah kampung-kampung di ibukota distrik dengan karakteristik masyarakatnya yang sudah heterogen.

Cakupan kampung mandiri yang ditargetkan di tahun 2015 adalah sebesar 2,00% atau sebanyak 4 kampung. Di tahun 2015 cakupan kampung mandiri sebanyak 2 kampung dan di tahun 2016 adalah sebanyak 3 kampung atau sebesar 1,50% sehingga pencapaian kinerjanya mencapai 75,00%.

Jumlah kampung yang teraliri listrik negara di tahun 2015 hanya 9 (sembilan) dari 221 kampung yang ada di Kabupaten Asmat, yaitu 5 (lima) kampung di ibukota kabupaten yang meliputi Kampung Bis Agats, Mbait, Asuwetsy, Syuru dan Kaye, 2 (dua) kampung di ibukota Distrik Atsj yaitu Kampung Atsj dan



Kampung Yasiu, dan 2 (dua) kampung yang menggunakan sumber listrik dari panel surya yang terpusat disalurkan ke rumah-rumah masyarakat di Kampung Bismam dan Saw.

Kebijakan pemerintah untuk menerangi kampung-kampung sudah dialokasikan melalui pemanfaatan alokasi dana kampung, dengan pembelian mesin diesel berkekuatan 5 kva yang digunakan secara bersama-sama oleh masyarakat di kampung-kampung. Kendala yang dihadapi dengan kebijakan ini adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan mememanfaatkannya sehingga bila terjadi kerusakan, mesinnya hanya dibiarkan begitu saja dan tidak ada kemauan untuk memperbaiki atau meminta jasa perbaikan kepada yang bisa memperbaikinya. Selain itu biaya yang harus dikeluarkan untuk mengoperasikan cukup tinggi karena menggunakan bahan bakar solar dan juga ada mesin yang menggunakan bahan bakar bensin.

Ketersediaan pelayanan air minum dalam artian bahwa pipa air minum sudah tersambung ke rumah-rumah penduduk, dan layanan air minum baru dapat dirasakan ketika beberapa hari tidak turun hujan. Air yang dialirkan ke rumah-rumah tidak dapat dikategorikan baik untuk dikonsumsi karena secara kasat mata air tersebut tidak memperlihatkan kejernihannya. Keterjangkauan pipa-pipa air minum ini dapat ditemui di ibukota kabupaten yang meliputi 5 (lima) kampung dan 2 (dua) kampung di ibukota Distrik Atsj. Jumlah rumah tangga yang telah terpasang pipa air minum sebanyak 1.102 rumah tangga di tahun 2016 atau hanya 3,77% dari jumlah rumah tangga yang ada di kabupaten. Penyediaan air bersih untuk di kampung-kampung juga disiasati dengan pembangunan tempat Penampung Air Hujan (PAH) dan pembuatan sumur galian yang dianggarkan melalui alokasi dana kampung untuk memenuhi kebutuhan air bersih di kampung-kampung. Kebutuhan air bersih di seluruh wilayah di kabupaten asmat sangat bergantung dari air hujan yang ditampung oleh penduduk dengan menggunakan blong penampung air hujan di rumah-rumah penduduk.

Belum ada perda tentang hutan adat dan tempat sakral di tahun 2015 dan target yang direncanakan di tahun 2016 adalah sebanyak 1 (satu) perda. Target ini tidak tercapai sehingga persentase capaian kerjanya adalah 0,00%.

Persentase tema dalam hukum adat yang diakomodasikan dalam perda di tahun 2015 adalah sebesar 0,00%. Di tahun 2016 terdapat 1 (satu) perda tentang kampung yang didalamnya terdapat 4 pasal dari 139 pasal yang



berkaitan dengan adat. Persentase jumlah pasal yang mengakomodir terhadap keseluruhan jumlah pasal tersebut adalah sebesar 2,88%, sehingga capaian kinerjanya adalah 129,73% dari rencana yang ditargetkan di tahun 2016 yaitu 2,22%.

Tahun 2016 terdapat 1 perda tentang pembentukan 3 kampung baru dari 8 usulan pembentukan kampung baru dan 2 perda tentang pembentukan 4 dan 2 distrik baru dari 12 usulan pembentukan distrik baru sehingga rata-rata persentasenya adalah sebesar 43,75%. Pencapaian kinerjanya sebesar 100,41% dari target yang direncanakan di tahun 2016 sebesar 43,57%.

Persentase rata-rata dengar pendapat dengan masyarakat dalam penyusunan perda di tahun 2015 adalah sebesar 4,17% atau 1 kali kegiatan dari jumlah 24 kegiatan yang diselenggarakan oleh DPRD. Di tahun 2016, sebanyak 2 dari 42 kegiatan DPRD atau 4,76% target ini masih berada di bawah yang direncanakan di tahun 2016 yaitu 5,44% atau persentase capaian kinerjanya adalah 87,50%.

Persentase usulan masyarakat melalui musrenbang yang diakomodir dalam penyusunan perda di tahun 2015 adalah 63,84%. Target yang direncanakan di tahun 2016 adalah 64,37%. Tahun 2016 usulan masyarakat melalui musrenbang yang diakomodir dalam perda sebesar 64,10%. Capaian kinerjanya adalah 99,58%.

3.4 EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan instrumen utama kebijakan publik yang berperan sebagai stimulus yang dapat menggerakkan perekonomian daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat. Kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Asmat dalam pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja dengan mengutamakan pencapaian hasil kegiatan dari rencana alokasi anggaran sebagai salah satu input dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Kebijakan keuangan daerah ini mencakup kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Keberhasilan capaian indikator-indikator sebagaimana



diuraikan sebelumnya tidak terlepas dari dukungan dana sebagai bagian dari kebijakan anggaran keuangan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2016 terdiri dari alokasi pendapatan sebesar Rp 1.501.875.953.059,94, alokasi belanja sebesar Rp. 1.221.931.012.465,00 dan pembiayaan sebesar Rp. 242.038.907.065,00.

Ringkasan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Asmat tahun Anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.24
Ringkasan Laporan Realisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat
Tahun Anggaran 2016

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Daerah	1.565.145.976.777,00	1.501.875.953.059,94	95,96
1.1	Pendapatan Asli Daerah	80.455.005.342,00	54.112.352.857,94	67,26
1.1.1	Pajak daerah	558.000.000,00	736.255.669,00	131,95
1.1.2	Retribusi daerah	3.934.922.000,00	3.930.957.800,00	99,90
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	7.181.492.131,00	7.181.492.131,00	100,00
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	68.780.591.211,00	42.263.647.257	61,45
1.2	Dana Perimbangan	1.367.325.663.285,00	1.312.027.747.271,00	95,96
1.2.1	Dana bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak	87.707.378.141,00	57.248.125.407,00	65,27
1.2.3	Dana Alokasi Umum	899.435.581.000,00	899.435.581.000,00	100,00
1.2.4	Dana Alokasi Khusus	239.733.511.144,00	214.894.847.864,00	89,63
1.2.5	Dana Desa	140.449.193.000,00	140.449.193.000,00	100,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	117.365.308.150,00	135.735.852.931,00	115,65
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	360.076.800	0,00
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya	6.679.161.150,00	7.455.295.129,00	111,62
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	110.686.147.000,00	110.686.147.000,00	100,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	17.234.334.000	0,00
2.	Belanja	1.558.026.548.217,00	1.221.931.012.465,00	78,43
2.1	Belanja operasi	1.074.316.993.362,00	853.983.946.183,00	79,49
2.1.1	Belanja pegawai	412.658.500.798,00	332.223.937.872,00	80,51
2.1.2	Belanja barang dan jasa	577.284.004.496,00	363.118.803.855,00	62,90
2.1.3	Bunga	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Subsidi	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Hibah	26.752.876.000,00	111.114.501.483,00	415,34
2.1.6	Bantuan sosial	57.621.612.068,00	47.526.702.973,00	82,48
2.1.7	Bantuan keuangan	0,00	0,00	0,00
2.2	Belanja modal	482.840.388.113,00	367.882.691.736,00	76,19
2.2.1	Belanja tanah	3.500.000.000,00	1.706.540.929,00	48,76
2.2.2	Belanja peralatan dan mesin	76.255.477.868,00	51.246.726.369,00	67,20
2.2.3	Belanja gedung dan bangunan	129.439.192.107,00	105.433.523.678,00	81,45
2.2.4	Belanja jalan, irigasi dan jaringan	271.853.098.138,00	207.905.669.660,00	76,50
2.2.5	Belanja aset tetap lainnya	1.792.620.000,00	1.520.231.000,00	84,80
2.2.6	Belanja aset lainnya	0,00	0,00	0,00
2.3	Belanja tak terduga	869.166.742,00	64.374.546,00	7,41
2.3.1	Belanja tak terduga	869.166.742,00	64.374.546,00	7,41
2.4	Transfer bantuan keuangan	249.158.335.625,00	229.104.152.242,00	91,95



**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN ASMAT
TAHUN 2016**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2.4.1	Transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya	0,00	0,00	0,00
2.4.2	Transfer bantuan keuangan ke desa	248.052.677.175,00	228.315.149.342,00	92,04
2.4.3	Transfer bantuan lainnya	1.105.658.450,00	789.002.900,00	71,36
3.	Pembiayaan Daerah	242.038.907.065,00	242.038.907.065,00	100,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	242.038.907.065,00	242.038.907.065,00	100,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	224.538.907.065,00	224.538.907.065,00	100,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	17.500.000.000,00	17.500.000.000,00	100,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00

Sumber :

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2017

Rincian anggaran berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Asmat dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.25
Rincian Anggaran Berdasarkan Program dan Kegiatan
Pemerintah Kabupaten Asmat
Tahun Anggaran 2016**

No	Satuan Kerja	Anggaran	Realisasi	%
URUSAN WAJIB				
BIDANG PENDIDIKAN				
		180.949.677.030	155.676.875.880	86,03
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		180.949.677.030	155.676.875.880	86,03
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	3.902.354.760	2.533.478.328	64,92
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	60.000.000	47.926.423	79,88
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	94.700.000	71.330.495	75,32
1.3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	680.000.000	623.350.000	91,62
1.4	Penyediaan alat tulis kantor	349.894.960	94.500.000	27,01
1.5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	76.600.000	76.453.641	99,81
1.6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	20.000.000	17.143.089	85,72
1.7	Penyediaan bahan logistik kantor	1.059.562.800	712.500.000	67,24
1.8	Penyediaan makanan dan minuman	29.160.000	28.291.050	97,01
1.9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	1.532.037.000	861.983.630	56,26
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2.246.067.200	2.204.244.455	98,14
2.1	Pembangunan gedung kantor	166.940.000	158.030.000	94,66
2.2	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	1.092.000.000	1.088.780.000	99,71
2.3	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	381.000.000	379.984.000	99,73
2.4	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	55.000.000	42.150.000	76,64
2.5	Pengadaan peralatan gedung kantor	275.127.200	275.127.000	100,00
2.6	Pemeliharaan gedung kantor	20.000.000	19.995.000	99,98
2.7	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	180.000.000	164.990.400	91,66
2.8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	76.000.000	75.187.795	98,93



**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN ASMAT
TAHUN 2016**

No	Satuan Kerja	Anggaran	Realisasi	%
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	296.750.000	295.671.200	99,64
	3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	222.250.000	221.424.500	99,63
	3.2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	74.500.000	74.246.700	99,66
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	516.204.143	348.279.120	67,47
	4.1 Rapat kerja pendidikan bagi kepala sekolah, pengawas dan UPTD	173.741.143	11.521.320	6,63
	4.2 Pelatihan kompetensi guru berprestasi	342.463.000	336.757.800	98,33
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	98.000.000	97.370.324	99,36
	5.1 Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan laporan keuangan	98.000.000	97.370.324	99,36
6.	Program pendidikan anak usia dini	6.795.733.527	6.436.721.891	94,72
	6.1 Pembangunan gedung sekolah	2.754.678.643	2.613.695.625	94,88
	6.2 Dukungan pelaksanaan pendidikan anak usia dini	438.000.000	294.500.000	67,24
	6.3 pengadaan pakaian seragam sekolah	627.500.000	626.279.000	99,81
	6.4 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	2.442.487.000	2.433.547.636	99,63
	6.5 Bimbingan teknis PAUD	533.067.884	468.699.630	87,92
7.	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	32.517.095.463	26.802.022.685	84,42
	7.1 Pembangunan gedung sekolah	8.642.961.756	8.068.804.250	93,57
	7.2 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah	1.967.164.881	1.784.557.125	90,72
	7.3 Dukungan pelaksanaan pendidikan wajib belajar sembilan tahun	2.786.800.000	1.268.940.000	45,53
	7.4 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	863.636.800	807.470.000	93,50
	7.5 Penyelenggaraan Paket A setara SD	529.794.435	450.488.827	85,03
	7.6 Penyelenggaraan paket B setara SMP	682.254.545	622.729.673	91,28
	7.7 Pengadaan mebeleur seklolah	1.466.985.564	1.056.916.300	72,05
	7.8 Pengadaan sarana mobilitas sekolah	71.000.000	70.510.000	99,31
	7.9 Penyelenggaraan belajar mengajar sekolah	8.880.850.000	8.309.650.000	93,57
	7.10 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	455.915.000	447.266.230	98,10
	7.11 Pelatihan penyusunan kurikulum	136.737.278	-	0,00
	7.12 Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTs	2.052.559.867	1.966.231.110	95,79
	7.13 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di satuan pendidikan	204.299.288	147.074.265	71,99
	7.14 Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa	165.500.000	22.587.040	13,65
	7.15 Pengembangan Comprehencive Teaching and Learning	114.200.000	-	0,00
	7.16 Pengadaan sarana dan prasarana olah raga	1.421.644.890	264.446.000	18,60
	7.17 Pelaksanaan lomba pidato bahasa inggris jenjang SMP tingkat kabupaten	79.804.000	79.533.320	99,66
	7.18 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	378.068.874	171.948.590	45,48
	7.19 Penyelenggaraan Multi-Grade Teaching di daerah terpencil	208.952.200	-	0,00
	7.20 Pelaksanaan Porseni tingkat SD	796.608.000	787.829.400	98,90
	7.21 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	373.638.000	307.992.500	82,43
	7.22 Pelaksanaan lomba sains tingkat SD	156.007.235	149.048.055	95,54
	7.23 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK) tingkat SD	81.713.050	-	0,00
8.	Program pendidikan menengah	26.838.614.985	22.239.768.412	82,86
	8.1 Pembangunan gedung sekolah	5.049.899.233	2.850.535.375	56,45
	8.2 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah	2.038.793.524	1.948.620.375	95,58
	8.3 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi	5.145.678.454	3.369.578.993	65,48
	8.4 Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (Lab. Bahasa, komputer, IPA, IPS dan lain-lain)	1.326.228.869	1.311.610.000	98,90
	8.5 Dukungan pelaksanaan sekolah pendidikan menengah	280.000.000	260.000.000	92,86
	8.6 Penyelenggaraan Paket C setara SMP	478.454.525	446.588.795	93,34
	8.7 Penyelenggaraan belajar mengajar sekolah	4.940.400.000	4.673.400.000	94,60
	8.8 Pengadaan alat prektek dan peraga siswa	335.438.945	315.821.000	94,15
	8.9 Pengadaan mebeleur sekolah	1.343.465.645	1.217.169.400	90,60
	8.10 Pengadaan perlengkapan sekolah	1.387.750.000	1.382.921.100	99,65
	8.11 pelatihan kompetensi tenaga pendidik	242.634.235	242.279.963	99,85
	8.12 Pelatihan penyusunan kurikulum	303.732.064	303.452.630	99,91
	8.13 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah	255.761.000	254.503.000	99,51
	8.14 Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah	511.779.694	509.531.025	99,56
	8.15 Penyelenggaraan ujian akhir	2.545.173.155	2.531.810.104	99,47
	8.16 Pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) jenjang SMP dan SMA tingkat provinsi	267.828.788	238.035.850	88,88



**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN ASMAT
TAHUN 2016**

No	Satuan Kerja	Anggaran	Realisasi	%
8.17	Kegiatan festival dan lomba seni siswa nasional	79.272.875	78.940.068	99,58
8.18	Pelaksanaan Porseni tingkat SMA	93.700.000	93.469.680	99,75
8.19	Pelatihan pembelajaran IPA aktif untuk guru	93.683.979	93.258.210	99,55
8.20	Pelaksanaan lomba karya ilmiah remaja tingkat SMP dan SMA/K	59.620.000	59.635.800	99,57
8.21	Lomba cerdas cermat jenjang SMP dan SMA/K tingkat kabupaten	59.320.000	58.877.080	99,25
9.	Program pendidikan non formal	1.500.081.788	1.288.408.814	85,89
9.1	Dukungan penyelenggaraan pendidikan non formal	312.000.000	100.500.000	32,21
9.2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	112.881.788	112.797.450	99,93
9.3	Kegiatan Pemberantasan Buta Huruf (PBH)	1.075.200.000	1.075.111.364	99,99
10.	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	7.972.901.732	5.357.617.006	67,20
10.1	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	1.064.109.744	287.931.200	27,06
10.2	Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	251.573.820	251.396.501	99,93
10.3	Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	5.749.054.793	3.978.386.332	69,20
10.4	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	91.048.907	28.800.000	31,63
10.5	Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS)	-	-	0,00
10.6	Sosialisasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	185.977.518	181.727.741	97,71
10.7	Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/Prakarya SMK	631.136.950	629.375.323	99,72
10.8	Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)	-	-	-
11.	Program manajemen pelayanan pendidikan	4.807.187.510	4.749.825.727	98,81
11.1	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan dibidang pendidikan	4.515.840.000	4.490.658.425	99,44
11.2	Rapat penyelesaian Dakor pengusulan KP dan Pensiun guru	291.347.510	259.167.302	88,95
12.	Belanja tidak langsung	93.458.685.922	83.323.467.918	89,16
12.1	Belanja pegawai	93.458.685.922	83.323.467.918	89,16
BIDANG KESEHATAN		192.946.141.663	136.147.439.512	70,56
DINAS KESEHATAN		128.159.711.180	94.503.826.119	73,74
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	18.073.013.857	13.624.458.889	75,39
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	8.089.550.000	5.577.644.350	68,95
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	47.080.000	42.280.000	89,80
1.3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	8.404.300.000	6.830.500.000	81,27
1.4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	41.222.450	32.873.545	79,75
1.5	Penyediaan alat tulis kantor	124.846.203	124.846.000	100,00
1.6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	112.018.895	76.996.315	68,74
1.7	Penyediaan bahan logistik kantor	87.840.000	87.840.000	100,00
1.8	Penyediaan makanan dan minuman	20.736.000	20.722.320	99,93
1.9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	408.349.000	252.629.706	61,87
1.10	Kunjungan kerja ke distrik dan kampung	522.095.000	407.933.600	78,13
1.11	Konsultasi program kepegawaian	78.990.000	77.094.000	97,60
1.12	Penyediaan alat tulis kantor untuk puskesmas	135.986.219	93.099.053	68,46
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	19.152.508.362	10.633.911.000	55,52
2.1	Pembangunan rumah dinas	10.056.667.176	9.580.715.000	95,27
2.2	Pembangunan gedung kantor	6.772.220.000	-	0,00
2.3	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	775.442.570	-	0,00
2.4	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	333.000.000	322.445.000	96,83
2.5	Pengadaan perlengkapan kantor	507.337.704	50.000.000	9,86
2.6	Pengadaan peralatan kantor	124.340.912	108.260.000	87,07
2.7	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	583.500.000	572.491.000	98,11
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	263.750.000	263.500.000	99,91
3.1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	194.250.000	194.100.000	99,92
3.2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	69.500.000	69.400.000	99,86
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1.131.969.811	535.132.244	47,27
4.1	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	388.906.000	228.834.250	58,84
4.2	Pendidikan dan pelatihan tenaga dokter, perawat dan bidan	743.063.811	306.298.094	41,22
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	98.000.000	64.614.400	65,93
5.1	Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan laporan keuangan	98.000.000	64.614.400	65,93
6.	Program obat dan perbekalan kesehatan	11.310.846.443	7.258.585.847	64,17



**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN ASMAT
TAHUN 2016**

No	Satuan Kerja	Anggaran	Realisasi	%
6.1	Pengadaan obat	9.973.600.459	6.118.420.847	61,35
6.2	Pengawasan keamanan dan kesehatan hasil industri	152.280.000	-	0,00
6.3	Operasional dalam gedung farmasi	162.245.984	158.245.000	97,53
6.4	Operasional luar gedung farmasi	820.920.000	780.120.000	95,03
6.5	Bimbingan teknis dan konsultasi program kefarmasian	201.800.000	201.800.000	100,00
7.	Program upaya kesehatan masyarakat	1.041.757.500	657.000.000	63,07
7.1	Penyediaan biaya operasional puskesmas dan pustu	1.041.757.500	657.000.000	63,07
8.	Program pengawasan obat dan makanan	304.760.000	304.760.000	100,00
8.1	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	304.760.000	304.760.000	100,00
9.	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	348.305.801	316.205.823	90,78
9.1	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	348.305.801	316.205.823	90,78
10.	Program perbaikan gizi masyarakat	3.444.109.000	3.089.401.400	89,70
10.1	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	2.708.771.000	2.478.881.400	91,51
10.2	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	322.000.000	322.000.000	100,00
10.3	peningkatan cakupan Vitamin A dan Tablet Fe	288.250.000	288.250.000	100,00
10.4	Pemantauan Status Gizi (PSG)/Pemantauan Konsumsi Gizi (PKG), pengawasan kewanamanan pangan dan pelacakan	124.918.000	-	0,00
11.	Program pengembangan lingkungan sehat	1.303.742.000	1.131.802.000	86,81
11.1	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	368.712.000	196.772.000	53,37
11.2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	720.680.000	720.680.000	100,00
11.3	pengawasan, pemeriksaan TPM, TTU, dan PAB wilayah PKM se-kabupaten	214.350.000	214.350.000	100,00
12.	Program pencegahan penyakit menular	16.216.726.410	11.678.007.155	72,01
12.1	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	186.480.000	186.480.000	100,00
12.2	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	47.580.000	47.580.000	100,00
12.3	Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah dan reviu imunisasi	505.851.470	433.026.970	85,60
12.4	Sosialisasi pencegahan penyakit HIV/AIDS	291.986.470	-	0,00
12.5	Penanggulangan kusta	2.809.076.000	2.765.286.000	98,44
12.6	Penanggulangan filariasis	369.458.000	233.898.000	63,31
12.7	Pemeriksaan suspect dan follow up pengobatan penderita	154.034.000	153.382.000	99,58
12.8	Pelacakan rumah penderita	177.040.000	-	0,00
12.9	Penemuan dan pengobatan malaria	594.372.000	546.565.000	91,96
12.10	Supervisi pelaksanaan program kusta/TBC, imunisasi, kesling	328.775.000	312.902.000	95,17
12.11	Survei darah (microfilaria)	179.114.000	171.328.000	95,65
12.12	Pelayanan medis/paramedis ke kampung-kampung	10.181.740.000	6.552.717.715	64,36
12.13	Pertemuan reviu penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi	338.191.470	274.841.470	81,27
12.14	Pengiriman vaksin	53.028.000	-	0,00
13	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	2.312.479.260	1.435.986.400	62,10
13.1	Biaya rujukan penderita kurang mampu	2.312.479.260	1.435.986.400	62,10
14.	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/pustu	19.165.008.384	14.964.002.132	78,08
14.1	Pembangunan puskesmas	7.573.529.585	7.407.850.000	97,81
14.2	Pembangunan pustu	286.174.100	266.415.478	93,10
14.3	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	9.695.469.680	5.929.244.000	61,15
14.4	Pengadaan sarana dan prasarana pustu	235.947.500	106.000.000	44,93
14.5	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas perairan	2.050.000	-	0,00
14.6	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling	1.030.277.519	1.022.300.000	99,23
14.7	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas	341.560.000	232.192.654	67,98
15.	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	5.799.823.421	4.023.943.000	69,38
15.1	Perawatan secara berkala bagi ibu hamil keluarga kurang mampu	4.067.466.161	3.633.418.000	89,33
15.2	Pertolongan persalinan bagi ibu keluarga kurang mampu	1.443.837.260	102.005.000	7,06
15.3	Pelatihan pengelola program KIA	288.520.000	288.520.000	100,00
16.	Program imunisasi	895.330.000	895.330.000	100,00



**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN ASMAT
TAHUN 2016**

No	Satuan Kerja	Anggaran	Realisasi	%
	16.1 sweeping imunisasi	500.760.000	500.760.000	100,00
	16.2 Sweeping TT wanita usia subur	394.570.000	394.570.000	100,00
17.	Belanja tidak langsung	27.297.480.931	23.627.185.729	86,55
	17.1 Belanja pegawai	27.297.480.931	23.627.185.729	86,55
	RSUD	64.786.430.483	41.643.613.393	64,28
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	6.328.386.497	5.396.138.441	85,27
	1.1 Penyediaan jasa surat menyurat	15.900.000	15.890.000	99,94
	1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	70.800.000	67.735.650	95,67
	1.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan	3.897.720.000	3.709.105.700	95,16
	1.4 Penyediaan jasa kebersihan kantor	480.872.250	471.812.625	98,12
	1.5 Penyediaan alat tulis kantor	109.680.158	109.524.690	99,86
	1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	314.232.089	313.997.492	99,93
	1.7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	50.000.000	-	0,00
	1.8 Penyediaan peralatan rumah tangga	475.695.000	5.315.000	1,12
	1.9 Penyediaan bahan logistik kantor	338.156.000	337.633.750	99,85
	1.10 Penyediaan makanan dan minuman	28.200.000	27.846.000	98,74
	1.11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	547.131.000	337.277.534	61,64
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	12.330.297.150	11.277.087.726	91,46
	2.1 Pembangunan gedung kantor	10.448.140.000	9.891.264.200	94,67
	2.2 Pengadaan kendaraan dinas operasional	650.000.000	194.820.000	29,97
	2.3 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	309.000.000	308.485.000	99,83
	2.4 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	61.000.000	60.993.000	99,99
	2.5 Pengadaan peralatan gedung kantor	195.132.150	194.898.150	99,88
	2.6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	25.400.000	20.954.518	82,50
	2.7 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	279.495.000	279.469.000	99,99
	2.8 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	362.130.000	326.203.648	90,08
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	302.750.000	302.250.000	99,83
	3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	180.250.000	180.250.000	100,00
	3.2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	122.500.000	122.000.000	99,59
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	537.620.000	407.585.900	75,81
	4.1 Pendidikan dan pelatihan formal	537.620.000	407.585.900	75,81
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	59.000.000	56.557.600	95,86
	5.1 Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan laporan keuangan	59.000.000	56.557.600	95,86
6.	Program obat dan perbekalan kesehatan	4.114.787.911	3.483.588.512	84,66
	6.1 Pengadaan obat	2.904.787.911	2.429.773.862	83,65
	6.2 Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan	1.210.000.000	1.053.814.650	87,09
7.	Program upaya kesehatan masyarakat	27.788.080.590	10.224.003.720	36,79
	7.1 Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan	15.911.002.540	590.520.020	3,71
	7.2 Rujukan pasien	3.551.417.050	2.675.256.700	75,33
	7.3 Penyediaan biaya operasional petugas RSUD	7.744.450.000	6.380.677.000	82,39
	7.4 Pembangunan sarana IPAL pada RSUD Agats	581.211.000	577.550.000	99,37
8.	Program pengawasan obat dan makanan	10.000.000	10.000.000	100,00
	8.1 Peningkatan pengawasan obat dan makanan	10.000.000	10.000.000	100,00
9.	Program standarisasi pelayanan kesehatan	30.000.000	30.000.000	100,00
	9.1 Penyusunan standar pelayanan kesehatan	30.000.000	30.000.000	100,00
10.	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	1.665.410.000	1.663.745.440	99,90
	10.1 Makan minumpasien rawat inap di RSUD	1.605.410.000	1.603.864.940	99,90
	10.2 Peningkatan pelayanan pasien rujukan keluar asmat	60.000.000	59.880.500	99,80
11.	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	329.644.000	189.644.000	57,53
	11.1 Pelayanan pemeliharaan kesehatan	329.644.000	189.644.000	57,53
12.	Belanja tidak langsung	11.290.454.335	8.603.012.054	76,20
	12.1 Belanja pegawai	11.290.454.335	8.603.012.054	76,20
	BIDANG PEKERJAAN UMUM	246.266.859.210	181.169.425.905	73,57
	DINAS PEKERJAAN UMUM	246.266.859.210	181.169.425.905	73,57
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	2.002.742.843	1.903.726.214	95,06
	1.1 Penyediaan jasa surat menyurat	21.600.000	21.582.000	99,92



**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN ASMAT
TAHUN 2016**

No	Satuan Kerja	Anggaran	Realisasi	%
	1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	78.600.000	52.735.825	67,09
	1.3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	72.000.000	70.836.000	98,38
	1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan	425.100.000	397.205.000	93,44
	1.5 Penyediaan alat tulis kantor	169.806.843	169.806.843	100,00
	1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25.000.000	9.735.000	38,94
	1.7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	25.000.000	-	0,00
	1.8 Penyediaan bahan logistik kantor	80.925.000	80.925.000	100,00
	1.9 Penyediaan makanan dan minuman	18.684.000	18.676.000	99,96
	1.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	1.086.027.000	1.082.224.546	99,65
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	4.691.839.114	4.219.192.400	89,93
	2.1 Pembangunan rumah dinas	41.960.000	5.995.000	14,29
	2.2 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	141.000.000	140.934.200	99,95
	2.3 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	57.200.000	52.200.000	91,26
	2.4 Pengadaan peralatan gedung kantor	91.755.700	91.755.700	100,00
	2.5 Pembangunan asrama mahasiswa	210.290.500	198.607.500	94,44
	2.6 Pembangunan gedung kantor	4.129.632.914	3.710.180.000	89,84
	2.7 Pemeliharaan rtuin/berkala peralatan gedung kantor	20.000.000	19.500.000	97,50
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	110.750.000	110.750.000	99,97
	3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	82.250.000	82.220.500	99,96
	3.2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	28.500.000	28.500.000	100,00
4.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	98.000.000	97.945.806	99,94
	4.1 Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan laporan keuangan	98.000.000	97.945.806	99,94
5.	Program pembangunan jalan jembatan	192.395.514.404	135.639.525.894	70,50
	5.1 Pembangunan jalan	5.609.387.930	5.158.198.400	91,96
	5.2 Pembangunan jalan jembatan konstruksi beton	114.625.700.365	92.021.720.179	80,28
	5.3 Pembangunan jalan komposit	72.160.426.109	38.459.607.315	53,30
6.	Program pembangunan turap/talut/bronjong	9.566.854.350	8.371.481.266	87,51
	6.1 Pembangunan talud penahan abrasi di Distrik Agats	9.566.854.350	8.371.481.266	87,51
7.	Program pembangunan infrastruktur pedesaan	5.323.565.824	5.267.237.000	98,94
	7.1 Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi pedesaan	5.323.565.824	5.267.237.000	98,94
8.	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan	208.600.000	207.000.000	99,23
	8.1 Pemeliharaan jaringan drainase Kota Agats	208.600.000	207.000.000	99,23
9.	Program penyediaan dan pengelolaan air baku	15.920.523.302	10.732.830.400	67,42
	9.1 Penyediaan sarana dan prasarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	15.920.523.302	10.732.830.400	67,42
10.	Program pemeliharaan rutin jalan jembatan	7.874.744.300	7.846.901.607	99,65
	10.1 Pemeliharaan jalan jembatan	7.874.744.300	7.846.901.607	99,65
11.	Program perencanaan dan pengawasan pembangunan	290.954.000	289.550.650	99,52
	11.1 Administrasi, perencanaan dan pengawasan cipta karya	290.954.000	289.550.650	99,52
12.	Program tata ruang kota	2.414.207.000	1.864.977.000	77,25
	12.1 Penyediaan biaya operasional sistem jaringan pengolahan sampah Kota Agats	1.664.642.000	1.399.562.000	84,08
	12.2 Pembangunan fasilitas tata ruang kota	71.950.000	59.645.000	82,90
	12.3 Pembangunan papan informasi kebersihan dan IMB Kabupaten Asmat	355.820.000	298.900.000	84,00
	12.4 Pendataan dan penataan IMB	321.795.000	106.870.000	33,21
13.	Belanja tidak langsung	5.368.564.073	4.618.357.168	86,03
	13.1 Belanja pegawai	5.368.564.073	4.618.357.168	86,03
BIDANG PERUMAHAN		61.913.523.482	55.660.546.355	89,90
DINAS TENAGA KERJA, PEMUKIMAN DAN PERUMAHAN RAKYAT		61.913.523.482	55.660.546.355	89,90
1.	Program pengembangan perumahan	61.552.212.532	55.323.781.440	89,88
	1.1 Pembobotan fisik perumahan masyarakat	806.285.875	792.250.877	98,26
	1.2 Pembangunan rumah masyarakat tipe 45 m ² (DAU)	8.466.745.257	7.427.314.213	87,72



**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN ASMAT
TAHUN 2016**

No	Satuan Kerja	Anggaran	Realisasi	%
	1.3 Pembangunan rumah masyarakat tipe 45 m ² (OTSUS)	11.187.667.000	8.888.526.500	79,45
	1.4 Pembangunan rumah masyarakat tipe 45 m ² (DAK IPD)	40.885.540.000	37.979.910.500	92,96
	1.5 Pendataan dan penataan tentang perumahan masyarakat	235.974.400	235.779.350	99,92
2.	Program lingkungan sehat perumahan	361.310.950	336.764.915	93,21
	2.1 Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan	361.310.950	336.764.915	93,21
	BIDANG PENATAAN RUANG	1.911.116.000	1.816.503.620	95,05
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.911.116.000	1.816.503.620	95,05
1.	Program perencanaan tata ruang	1.911.116.000	1.816.503.620	95,05
	1.1 Rapat koordinasi tata ruang	184.288.000	177.848.000	96,51
	1.2 Penyusunan raperda RDTR ibukota Distrik Suru	854.223.000	832.169.868	97,42
	1.3 Perencanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	257.395.000	203.263.193	78,97
	1.4 Evaluasi program pembangunanbidang fispra	85.645.000	81.779.808	95,49
	1.5 Pembangunan baliho tata ruang di 4 distrik	460.935.000	455.785.048	98,88
	1.6 Pemantauan pelaksanaan program Pasimas di kabupaten	68.630.000	65.657.703	95,67
	BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN	19.936.138.225	17.363.222.313	87,09
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	19.936.138.225	17.363.222.313	87,09
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	2.080.518.410	1.975.279.265	94,94
	1.1 Penyediaan jasa surat menyurat	18.200.000	15.993.817	87,88
	1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	70.200.000	70.171.332	99,96
	1.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan	505.400.000	503.450.000	99,61
	1.4 Penyediaan jasa kebersihan kantor	12.512.728	12.512.220	100,00
	1.5 Penyediaan alat tulis kantor	158.349.682	158.346.012	100,00
	1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	95.573.000	95.553.675	99,98
	1.7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	40.000.000	32.200.000	80,50
	1.8 Penyediaan bahan logistik kantor	183.000.000	182.923.636	99,96
	1.9 Penyediaan makanan dan minuman	50.256.000	50.250.300	99,99
	1.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	947.027.000	853.878.273	90,16
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	438.000.000	429.837.116	98,14
	2.1 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	144.000.000	144.000.000	100,00
	2.2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	55.000.000	50.000.000	90,91
	2.3 Pengadaan peralatan gedung kantor	76.000.000	76.000.000	100,00
	2.4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	83.000.000	79.906.132	96,27
	2.5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	80.000.000	79.930.000	99,91
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	119.000.000	119.000.000	100,00
	3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	84.000.000	84.000.000	100,00
	3.2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	35.000.000	35.000.000	100,00
4.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	98.000.000	97.559.211	99,55
	4.1 Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan laporan keuangan	98.000.000	97.559.211	99,55
5.	Program pengembangan data dan informasi	1.025.648.908	968.037.576	94,38
	5.1 Penyusunan profil daerah	28.464.636	28.336.009	99,55
	5.2 Pendampingan implementasi sistem perencanaan pembangunan (SIMRENBANG)	397.596.480	369.656.386	92,97
	5.3 Pembangunan sistem informasi, monitoring dan evaluasi pembangunan (e-monev)	538.060.000	511.589.464	95,08
	5.4 Fasilitasi penyusunan Renja SKPD	61.527.792	58.455.717	95,01
6.	Program pembangunan daerah	1.419.054.611	1.000.786.227	70,52
	6.1 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana otsus	1.012.101.972	652.492.191	64,47
	6.2 Koordinasi perencanaan pembangunan dana otsus	75.419.619	75.388.213	99,96
	6.3 Konsultasi dan pembahasan URD Otsus	331.533.020	272.905.823	82,32
7.	Program pengembangan wilayah perbatasan	494.101.000	71.013.000	14,37
	7.1 koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah	494.101.000	71.013.000	14,37
8.	Program perencanaan pembangunan daerah	7.569.799.468	7.160.923.553	94,60



**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN ASMAT
TAHUN 2016**

No	Satuan Kerja	Anggaran	Realisasi	%
8.1	Penyusunan rancangan dan penetapan RKPD	44.433.376	44.202.998	99,48
8.2	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD (Kab, Prov dan Nasional)	856.436.650	823.879.679	96,20
8.3	Koordinasi penyusunan LKPJ Bupati	42.195.084	41.863.377	99,21
8.4	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD tingkat distrik	2.012.390.000	1.998.014.954	99,29
8.5	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD tingkat kampung	1.120.760.000	1.105.659.743	98,65
8.6	Penyusunan Renstra Kabupaten 2016-2021	272.390.000	265.688.844	97,54
8.7	Penyusunan RPJMD 2016-2021	1.536.554.000	1.526.182.466	99,33
8.8	Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD, KUA dan PPAS APBD induk dan perubahan	56.976.000	56.827.673	99,74
8.9	Peningkatan LPSE	1.016.844.358	958.455.699	94,26
8.10	Fasilitasi penyusunan RPJMKampung	610.820.000	340.148.120	55,69
9.	Program perencanaan pembangunan ekonomi	798.074.463	790.213.704	99,02
9.1	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	86.721.000	86.381.550	99,61
9.2	Penyelenggaraan pameran investasi	205.131.000	203.453.123	99,18
9.3	Evaluasi program pembangunan bidang ekonomi	183.212.463	181.579.598	99,11
9.4	Sosialisasi penyusunan dokumentasi perencanaan bidang ekonomi	323.010.000	318.799.433	98,70
10.	Program perencanaan bidang sosial budaya	21.048.000	20.429.693	97,06
10.1	Evaluasi program bidang sosial budaya	21.048.000	20.429.693	97,06
11.	Belanja tidak langsung	5.872.893.365	4.730.142.968	80,54
11.1	Belanja pegawai	5.872.893.365	4.730.142.968	80,54
BIDANG PERHUBUNGAN		97.566.831.119	79.958.848.558	81,95
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		97.566.831.119	79.958.848.558	81,95
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	2.712.243.854	2.419.132.650	94,05
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	11.000.000	11.000.000	100,00
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	36.774.565	35.580.000	96,75
1.3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1.037.400.000	1.027.985.000	99,09
1.4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	147.248.369	141.038.000	95,78
1.5	Penyediaan perbaikan peralatan kantor	151.000.000	151.000.000	100,00
1.6	Penyediaan alat tulis kantor	155.349.040	155.034.000	99,80
1.7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	257.000.000	256.426.250	99,78
1.8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	19.000.000	18.100.000	95,26
1.9	Penyediaan bahan logistik kantor	91.702.800	90.090.000	98,24
1.10	Penyediaan makanan dan minuman	23.158.080	23.100.000	99,75
1.11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	782.611.000	509.779.400	65,14
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	6.243.682.564	3.854.130.000	61,73
2.1	Pembangunan gedung kantor	3.547.767.500	1.162.635.000	32,77
2.2	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	46.486.455	46.446.000	99,91
2.3	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	117.000.000	116.902.000	99,92
2.4	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	668.759.723	666.822.000	99,71
2.5	Pengadaan peralatan gedung kantor	1.238.268.850	1.236.766.000	99,88
2.6	Pengadaan sarana transportasi air	575.400.036	575.109.000	99,95
2.7	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50.000.000	49.450.000	98,90
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	111.750.000	111.738.951	99,99
3.1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	68.250.000	68.250.000	100,00
3.2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	43.500.000	43.488.951	99,97
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	54.516.000	-	0,00
4.1	Pendidikan dan pelatihan formal	54.516.000	-	0,00
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	98.000.000	98.000.000	100,00
5.1	Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan laporan keuangan	98.000.000	98.000.000	100,00
6.	Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	66.217.569.480	59.485.391.200	89,83
6.1	Pengadaan sarana dan prasarana angkutan	933.875.619	924.264.200	98,97
6.2	Pembangunan landasan pacu bandara ewer tahap 1	40.109.020.000	38.813.816.000	96,77
6.3	Pembangunan sarana dan prasarana fasilitas perhubungan	10.563.745.000	7.306.976.800	69,17
6.4	Pembangunan dermaga sungai dan penyeberangan	14.522.278.816	12.351.849.900	85,05
6.5	Keselamatan penerbangan di Kamur	31.050.000	30.884.300	99,47



**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN ASMAT
TAHUN 2016**

No	Satuan Kerja	Anggaran	Realisasi	%
	6.6 Operasional pelayanan publik perhubungan udara MAF Air	57.600.000	57.600.000	100,00
7.	Program peningkatan pelayanan angkutan	14.830.913.000	7.613.782.250	51,34
7.1	Pengawasan kepelabuhanan dan angkutan	14.706.933.000	7.490.201.850	50,93
7.2	Sosialisasi keselamatan pelayaran di distrik	123.980.000	123.580.400	99,68
8.	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	2.895.409.090	2.839.728.000	98,08
8.1	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	20.790.000	-	0,00
8.2	Pemeliharaan alur pelayaran sungai dan penyeberangan	2.874.619.090	2.839.728.000	98,79
9.	Belanja tidak langsung	4.542.747.131	3.536.945.507	77,86
9.1	Belanja pegawai	4.542.747.131	3.536.945.507	77,86
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		1.279.663.000	1.072.189.784	83,79
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		1.279.663.000	1.072.189.784	83,79
1.	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	142.798.000	127.531.776	89,31
1.1	Pemantauan kualitas lingkungan hidup	93.068.000	77.802.576	83,60
1.2	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	49.730.000	49.729.200	100,00
2.	Program perlindungan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam	267.383.000	257.484.008	96,30
2.1	Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA	267.383.000	257.484.008	96,30
3.	Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan hidup	127.670.000	-	0,00
3.1	Pengembangan data dan informasi lingkungan	127.670.000	-	0,00
4.	Program penyuluhan dan pengendalian polusi dan perencanaan menimbulkan polusi	703.727.000	687.174.000	97,65
4.1	penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran lingkungan	703.727.000	687.174.000	97,65
5.	Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	38.085.000	-	0,00
5.1	Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	38.085.000	-	0,00
BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		10.550.488.445	9.123.367.405	86,47
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		10.550.488.445	9.123.367.405	86,47
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	1.220.013.026	1.134.109.021	92,96
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	12.400.000	12.400.000	100,00
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	48.000.000	47.780.475	99,54
1.3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	391.800.000	386.500.000	98,65
1.4	Penyediaan perbaikan peralatan kantor	100.200.000	90.554.725	90,37
1.5	Penyediaan alat tulis kantor	119.709.866	119.703.650	99,99
1.6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	66.022.520	57.211.125	86,65
1.7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	18.000.000	1.500.000	8,33
1.8	Penyediaan bahan logistik kantor	80.902.800	80.586.000	99,61
1.9	Penyediaan makanan dan minuman	12.012.840	12.005.400	99,94
1.10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	370.965.000	325.867.646	87,84
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	939.616.734	929.349.800	98,91
2.1	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	108.000.000	106.920.000	99,00
2.2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	69.316.115	63.360.000	94,29
2.3	Pengadaan peralatan gedung kantor	471.272.619	468.442.500	99,40
2.4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	164.028.000	164.028.000	100,00
2.5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	127.000.000	124.599.300	98,11
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	91.500.000	91.179.000	99,65
3.1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	63.000.000	62.964.000	99,94
3.2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	28.500.000	28.215.000	99,00
4.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	196.000.000	82.829.649	42,26
4.1	Penyusunan laporan keuangan dan capaian keuangan	98.000.000	47.829.469	48,81
4.2	Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan	98.000.000	35.000.000	25,71
5.	Program penataan administrasi kependudukan	3.405.903.000	3.238.634.660	95,09



**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN ASMAT
TAHUN 2016**

No	Satuan Kerja	Anggaran	Realisasi	%
5.1	Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	74.220.000	73.950.000	99,64
5.2	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	58.000.000	57.970.000	99,65
5.3	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan pendataan orang asli papua	3.158.740.000	3.015.032.100	95,45
5.4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	56.193.000	56.193.000	100,00
5.5	pendataan penduduk rentan	58.750.000	35.488.960	60,41
6.	Belanja tidak langsung	4.697.455.685	3.647.265.455	77,64
6.1	Belanja pegawai	4.697.455.685	3.647.265.455	77,64
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		9.017.123.824	6.977.386.801	77,38
KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA		9.017.123.824	6.977.386.801	77,38
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	1.155.270.313	937.214.484	81,13
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	10.000.000	4.000.000	40,00
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	6.000.000	2.530.000	42,17
1.3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	204.000.000	204.000.000	100,00
1.4	Penyediaan perbaikan peralatan kantor	43.000.000	30.840.900	71,72
1.5	Penyediaan alat tulis kantor	51.068.019	51.068.019	100,00
1.6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	56.382.294	7.871.900	13,96
1.7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	30.000.000	24.000.000	80,00
1.8	Penyediaan bahan logistik kantor	74.400.000	74.400.000	100,00
1.9	Penyediaan makanan dan minuman	8.100.000	7.217.640	89,11
1.10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	672.320.000	531.286.025	79,02
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	161.549.000	151.200.000	93,59
2.1	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	90.000.000	90.000.000	100,00
2.2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	40.349.000	30.000.000	74,35
2.3	Pengadaan peralatan gedung kantor	31.200.000	31.200.000	100,00
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	71.000.000	52.500.000	73,94
3.1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	52.500.000	52.500.000	100,00
3.2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	18.500.000	-	0,00
4.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	93.000.000	24.833.900	26,70
4.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan	93.000.000	24.833.900	26,70
5.	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	1.097.624.133	894.336.110	81,48
5.1	Pelayanan P2TP2A	14.180.000	-	0,00
5.2	Pengembangan Sistem Gender dan Anak (PSGA)	79.320.462	-	0,00
5.3	Pemetaan isu gender	159.600.000	156.804.935	98,25
5.4	Pelatihan home industry	742.070.857	737.531.175	99,39
5.5	Pelatihan penyusunan Program Perencanaan Relationship Gender (PPRG)	102.452.814	-	0,00
6.	Program peningkatan kualitas hidup perempuan	341.225.191	339.482.050	99,49
6.1	Sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan	341.225.191	339.482.050	99,49
7.	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	1.591.389.185	1.243.158.934	63,71
7.1	Pembinaan organisasi perempuan	550.329.725	356.747.464	64,82
7.2	Pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan	314.225.000	-	0,00
7.3	Pelaksanaan 10 program pokok PKK	383.815.000	383.815.000	100,00
7.4	Pemberdayaan kelompok yang berbasis gender disektor pertanian dan peternakan	527.482.460	502.596.470	95,28
7.5	Pelatihan menjahit bagi perempuan asmat	175.537.000	-	0,00
8.	Pogram penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	176.793.224	175.991.075	99,55
8.1	Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan anak	176.793.224	175.991.075	99,55
9.	Belanja tidak langsung	3.969.272.778	3.158.670.248	79,58
9.1	Belanja pegawai	3.969.272.778	3.158.670.248	79,58
BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA		1.887.068.268	1.494.714.330	79,21



**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN ASMAT
TAHUN 2016**

No	Satuan Kerja	Anggaran	Realisasi	%
KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA		1.887.068.268	1.494.714.330	79,21
1.	Program keluarga berencana	1.337.577.364	946.014.330	70,73
	1.1 Latihan Kepemimpinan Wanita/Perempuan (LKW/P)	262.673.196	261.851.545	99,69
	1.2 Pembinaan keluarga berencana	233.103.336	206.445.085	88,57
	1.3 Sosialisasi keluarga berencana	419.604.492	417.594.655	99,52
	1.4 Pendataan keluarga	360.636.340	-	0,00
	1.5 Pembinaan dan pembekalan staf dan penyuluh KB	549.490.904	548.700.000	97,65
2.	Program pelayanan kontrasepsi	549.490.904	548.700.000	99,86
	2.1 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	549.490.904	548.700.000	99,86
BIDANG SOSIAL		17.400.383.972	12.848.796.559	73,84
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL		12.432.046.974	9.374.840.820	75,41
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	964.428.673	922.597.853	95,66
	1.1 Penyediaan jasa surat menyurat	16.000.000	16.000.000	100,00
	1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	18.000.000	16.101.040	89,45
	1.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan	184.800.000	170.400.000	92,21
	1.4 Penyediaan perbaikan peralatan kantor	53.000.000	52.966.500	99,94
	1.5 Penyediaan alat tulis kantor	51.027.113	51.027.113	100,00
	1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	24.000.000	23.997.400	99,99
	1.7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	24.000.000	23.850.000	99,38
	1.8 Penyediaan bahan logistik kantor	80.972.800	80.972.800	100,00
	1.9 Penyediaan makanan dan minuman	9.473.760	9.472.000	99,98
	1.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	503.155.000	477.811.000	94,96
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	229.606.275	225.692.178	98,30
	2.1 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	87.000.000	87.000.000	100,00
	2.2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	108.206.275	104.292.178	96,38
	2.3 Pengadaan peralatan gedung kantor	34.400.000	34.400.000	100,00
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	68.250.000	68.250.000	100,00
	3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	50.750.000	50.750.000	100,00
	3.2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	17.500.000	17.500.000	100,00
4.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	98.000.000	97.830.080	99,83
	4.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan	98.000.000	97.830.080	99,83
5.	Program pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS	3.761.410.477	1.888.556.034	50,21
	5.1 Peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	165.405.000	126.348.000	76,39
	5.2 Pembangunan Perumahan Komunitas Adat Terpencil	2.700.964.000	991.479.000	36,71
	5.3 Studi kelayakan di lokasi KAT	434.026.475	420.355.249	96,85
	5.4 Bimbingan sosial dan motivasi pemberdayaan KAT	191.935.002	191.785.000	99,92
	5.5 Bimbingan dan penyuluhan sosial Keluarga Muda Mandiri	169.695.000	158.588.785	93,46
	5.6 Bimbingan dan penyuluhan pemberdayaan sosial perempuan	99.385.000	-	0,00
6.	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	485.014.176	482.746.250	99,53
	6.1 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	206.610.000	206.610.000	100,00
	6.2 Penyuluhan dan bimbingan sosial bagi anak sekolah tentang pencegahan penyakit menular HIV/AIDS	104.949.176	104.580.050	99,65
	6.3 Pencegahan penyalahgunaan NAPZA	173.455.000	171.556.200	98,91
7.	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial	124.470.000	124.237.850	99,81
	7.1 pemberdayaan eks penyandang sosial	124.470.000	124.237.850	99,81
8.	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	2.885.232.154	2.864.928.100	99,30
	8.1 Peningkatan jaringan kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	133.045.000	133.045.000	100,00
	8.2 Penyuluhan manajemen karang taruna	129.177.154	128.978.100	99,85
	8.3 Pembangunan sarana dan prasarana peribadatan	2.623.010.000	2.602.905.000	99,23
9.	Belanja tidak langsung	3.815.635.219	2.700.002.475	70,76
	9.1 Belanja pegawai	3.815.635.219	2.700.002.475	70,76



**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN ASMAT
TAHUN 2016**

No	Satuan Kerja	Anggaran	Realisasi	%
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	1.124.658.889	894.275.334	79,25
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	20.000.000	9.956.542	49,78
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	15.400.000	15.327.000	99,53
1.3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	330.000.000	326.000.000	98,79
1.4	Penyediaan alat tulis kantor	49.900.295	49.900.295	100,00
1.5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	45.382.000	42.817.797	94,35
1.6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	30.000.000	16.000.000	53,33
1.7	Penyediaan bahan logistik kantor	80.902.800	80.902.800	100,00
1.8	Penyediaan makanan dan minuman	5.526.360	5.500.000	99,52
1.9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	547.547.434	347.870.900	63,53
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	664.052.111	594.549.984	89,53
2.1	Pembangunan gedung kantor	179.800.000	174.000.000	96,77
2.2	Pengadaan kendaraan dinas operasional	30.000.000	-	0,00
2.3	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	157.943.111	129.040.984	81,70
2.4	Pengadaan peralatan gedung kantor	296.309.000	291.509.000	98,38
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	57.750.000	57.750.000	100,00
3.1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	26.250.000	26.250.000	100,00
3.2	Pengadaan pakaian kerja	21.000.000	21.000.000	100,00
3.3	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	10.500.000	10.500.000	100,00
4.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	101.000.000	97.500.000	96,53
4.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan	101.000.000	97.500.000	96,53
5.	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	731.550.000	432.815.600	59,16
5.1	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	203.700.000	160.400.000	78,74
5.2	Sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran	410.320.000	272.415.600	66,39
5.3	Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	117.530.000	-	0,00
6.	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	314.250.000	314.050.000	99,94
6.1	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	314.250.000	314.050.000	99,94
7.	Belanja tidak langsung	1.975.075.998	1.083.014.821	54,83
7.1	Belanja pegawai	1.975.075.998	1.083.014.821	54,83
BIDANG KETENAGAKERJAAN		8.402.837.319	7.365.531.899	87,66
DINAS TENAGA KERJA, PEMUKIMAN DAN PERUMAHAN RAKYAT		8.402.837.319	7.365.531.899	87,66
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	1.592.481.799	1.481.704.640	93,04
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	20.000.000	19.991.950	99,69
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	108.505.250	108.477.626	99,97
1.3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	95.000.000	94.985.735	99,98
1.4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	238.800.000	235.600.000	98,66
1.5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	40.000.000	39.989.475	99,97
1.6	Penyediaan alat tulis kantor	85.124.550	85.124.550	100,00
1.7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	96.104.999	96.092.931	99,99
1.8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	24.800.000	24.000.000	96,77
1.9	Penyediaan bahan logistik kantor	80.893.000	80.893.000	100,00
1.10	Penyediaan makanan dan minuman	10.408.000	10.404.000	99,96
1.11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	792.846.000	686.145.373	86,54
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	851.738.266	846.287.745	99,36
2.1	Pembangunan gedung kantor	320.150.676	320.138.000	100,00
2.2	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	93.000.000	93.000.000	100,00
2.3	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	136.675.700	131.275.000	96,05
2.4	Pengadaan peralatan gedung kantor	216.187.590	216.164.745	99,99
2.5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	85.724.300	85.710.000	99,98
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	75.250.000	75.250.000	100,00
3.1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	54.250.000	54.250.000	100,00
3.2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	21.000.000	21.000.000	100,00



**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN ASMAT
TAHUN 2016**

No	Satuan Kerja	Anggaran	Realisasi	%
4.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	98.000.000	97.905.000	99,90
4.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan	98.000.000	97.905.000	99,90
5.	Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja	314.486.128	314.313.563	99,95
5.1	Pendidikan dan pelatihan keterampilan pencari kerja	314.486.128	314.313.563	99,95
6.	Program peningkatan kesempatan kerja	467.773.904	452.256.470	96,68
6.1	Pendataan informasi tenaga kerja	96.925.000	78.809.000	81,31
6.2	Pengembangan usaha bagi pencari kerja di kampung-kampung	373.447.470	370.848.904	99,30
7.	Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	836.512.540	801.126.601	95,77
7.1	Sosialisasi peraturan ketenagakerjaan	606.238.490	575.264.936	94,89
7.2	Penggalangan kepesertaan JAMSOSTEK bagi perusahaan yang sudah dalam kategori wajib	230.274.050	225.861.665	98,08
8.	Belanja tidak langsung	4.166.594.682	3.296.687.880	79,12
8.1	Belanja pegawai	4.166.594.682	3.296.687.880	79,12
BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		7.690.570.160	7.180.004.034	93,36
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI		7.690.570.160	7.180.004.034	93,36
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	1.771.952.040	1.530.814.429	86,39
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	11.000.000	8.021.025	79,92
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	27.044.000	9.748.804	36,05
1.3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	551.400.000	441.200.000	80,01
1.4	Penyediaan jasa kesersihan kantor	4.650.000	4.649.550	99,99
1.5	Penyediaan alat tulis kantor	113.492.452	111.478.300	98,23
1.6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	92.346.588	85.096.020	92,15
1.7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	25.000.000	20.440.000	81,76
1.8	Penyediaan bahan logistik kantor	80.902.800	78.408.000	96,92
1.9	Penyediaan makanan dan minuman	17.161.200	17.125.700	99,79
1.10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	848.955.000	754.646.850	88,89
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	714.125.120	668.116.825	93,56
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	5.000.000	4.967.000	99,34
2.2	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	153.000.000	153.000.000	100,00
2.3	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	108.500.000	103.385.000	95,29
2.4	Pengadaan peralatan gedung kantor	88.500.000	88.500.000	100,00
2.5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	310.125.120	277.525.000	89,50
2.6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	19.000.000	10.713.750	56,39
2.7	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan transportasi air	30.000.000	29.999.075	100,00
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	124.250.000	124.250.000	100,00
3.1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	89.250.000	89.250.000	100,00
3.2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	35.000.000	35.000.000	100,00
4.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	76.000.000	75.970.225	99,96
4.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan	76.000.000	75.970.225	99,96
5.	Program pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah	231.960.000	230.171.130	99,23
5.1	Pengadaan longboat dan engine	231.960.000	230.171.130	99,23
6.	Program peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi	2.292.775.000	2.261.086.450	98,62
6.1	Bantuan modal usaha	2.266.140.000	2.261.086.450	99,78
6.2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil bantuan modal usaha	26.635.000	-	0,00
7.	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	635.562.000	524.802.800	82,57
7.1	Pameran Dekranasda	635.562.000	524.802.800	82,57
8.	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	223.686.000	223.217.160	99,79
8.1	Pelatihan pembuatan terasi udang	223.686.000	223.217.160	99,79
9.	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	737.330.000	659.939.035	89,50



**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN ASMAT
TAHUN 2016**

No	Satuan Kerja	Anggaran	Realisasi	%
	9.2 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian dan pelatihan pengurus koperasi serta pendampingan	737.330.000	659.939.035	89,50
10.	Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro kecil menengah	882.930.000	881.636.160	99,85
	10.1 Bantuan modal bagi UKM	882.930.000	881.636.160	99,85
	BIDANG KEBUDAYAAN	13.912.544.626	12.548.975.303	90,20
	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	13.912.544.626	12.548.975.303	90,20
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	1.493.464.460	1.378.820.000	92,32
	1.1 Penyediaan jasa surat menyurat	16.000.000	16.000.000	100,00
	1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	42.000.000	42.000.000	100,00
	1.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan	476.400.000	438.983.000	92,15
	1.4 Penyediaan alat tulis kantor	105.800.000	105.800.000	100,00
	1.5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	48.000.000	48.000.000	100,00
	1.6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	37.500.000	37.500.000	100,00
	1.7 Penyediaan bahan logistik kantor	80.902.800	80.902.800	100,00
	1.8 Penyediaan makanan dan minuman	17.368.560	17.368.000	100,00
	1.9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	669.493.000	592.266.100	88,46
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.187.997.250	1.183.027.000	99,58
	2.1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional	197.340.000	197.250.000	99,95
	2.2 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	141.000.000	140.900.000	99,93
	2.3 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	262.173.490	261.839.000	99,87
	2.4 Pengadaan peralatan gedung kantor	189.004.000	188.590.000	99,78
	2.5 Pembangunan lapangan parkir	61.629.760	59.398.000	96,38
	2.6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	225.250.000	225.050.000	99,91
	2.7 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	65.000.000	65.000.000	100,00
	2.8 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	46.600.000	45.000.000	96,57
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	115.250.000	115.050.000	99,83
	3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	82.250.000	82.150.000	99,88
	3.2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	33.000.000	32.900.000	99,70
4.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	98.000.000	73.000.000	74,49
	4.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan	98.000.000	73.000.000	74,49
5.	Program pengembangan nilai budaya	544.641.000	522.626.000	95,96
	5.1 Pelestarian dan aktualisasi adat dan budaya	544.641.000	522.626.000	95,96
6.	Program pengelolaan kekayaan budaya	2.335.025.000	2.263.649.730	96,94
	6.1 Pengelolaan kekayaan budaya lokal	381.660.000	374.751.930	98,19
	6.2 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal	342.910.000	342.901.500	100,00
	6.3 Pengelolaan karya cetak dan rekaman	1.119.010.000	1.054.733.000	94,26
	6.4 Pembinaan kreatifitas seni ukiran asmat	491.445.000	491.263.330	99,96
7.	Program pengelolaan keragaman budaya	2.914.635.150	2.878.890.220	98,77
	7.1 Fasilitasi penyelenggaraan festival kebudayaan daerah tingkat kabupaten	2.144.561.150	2.144.561.150	100,00
	7.2 Fasilitasi penyelenggaraan festival kebudayaan daerah tingkat provinsi	770.074.000	734.329.070	95,36
8.	Belanja tidak langsung	5.223.531.766	4.133.912.353	79,14
	8.1 Belanja pegawai	5.223.531.766	4.133.912.353	79,14
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1.185.020.846	1.112.515.513	93,88
	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.185.020.846	1.112.515.513	93,88
1.	Program peningkatan peran serta kepemudaan	637.179.846	556.714.860	88,94
	1.1 Pelatihan dasar kepemimpinan	203.619.231	196.431.474	96,47
	1.2 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	67.240.615	62.685.648	93,23
	1.3 Peringatan Hari Pendidikan Nasional	366.320.000	307.597.738	83,97
2.	Program pembinaan dan pemasvarakatan olah raga	547.841.000	545.800.653	99,63
	2.1 Pelaksanaan identifikasi dan potensi pelajar dalam bidang olahraga	136.125.000	135.752.713	99,73
	2.2 Penyelenggaraan kompetisi olah raga	306.895.000	305.513.840	99,55
	2.3 Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olah raga	104.821.000	104.534.100	99,73



**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN ASMAT
TAHUN 2016**

No	Satuan Kerja	Anggaran	Realisasi	%
BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		21.978.125.416	18.042.319.928	82,09
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		13.285.484.400	10.598.766.909	79,78
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	1.335.292.422	1.059.808.952	79,37
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	10.600.000	10.551.250	99,54
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	63.700.000	63.420.177	99,56
1.3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	275.400.000	261.000.000	94,77
1.4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	6.538.525	6.525.675	99,80
1.5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	27.868.037	26.813.550	96,22
1.6	Penyediaan alat tulis kantor	90.797.411	90.654.000	99,84
1.7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	51.791.649	51.767.300	99,95
1.8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	35.000.000	26.157.000	74,73
1.9	Penyediaan bahan logistik kantor	80.902.800	80.900.000	100,00
1.10	Penyediaan makanan dan minuman	9.720.000	9.360.000	96,30
1.11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	682.974.000	432.660.000	63,35
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.463.910.204	1.380.537.000	94,30
2.1	Pengadaan mobil jabatan	422.294.000	409.622.000	97,00
2.2	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	188.500.000	185.000.000	98,14
2.3	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	96.000.000	94.400.000	98,33
2.4	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	67.870.000	62.800.000	92,53
2.5	Pengadaan peralatan gedung kantor	66.725.900	66.650.000	99,89
2.6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	105.000.000	68.015.000	64,78
2.7	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	517.520.304	494.050.000	95,46
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	76.500.000	70.320.000	91,92
3.1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	56.000.000	50.250.000	89,33
3.2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	20.500.000	20.295.000	99,00
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	201.855.000	-	0,00
4.1	Pendidikan dan pelatihan formal	201.855.000	-	0,00
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	98.000.000	97.918.120	99,92
5.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan	98.000.000	97.918.120	99,92
6.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	538.842.594	295.328.600	54,81
6.1	Komunikasi Pimpinan Daerah	379.638.000	295.328.600	77,79
6.2	Koordinasi forum diskusi politik	159.204.594	-	0,00
7.	Program pengembangan wawasan kebangsaan	3.712.805.606	3.215.460.207	86,60
7.1	Pengadaan sarana dan prasarana pusat pendidikan wawasan kebangsaan	1.991.958.906	1.917.770.000	96,28
7.2	Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi ormas dan masyarakat	265.254.500	261.993.335	98,77
7.3	Pembinaan kerukunan umat beragama	712.499.040	458.176.220	64,31
7.4	Penyuluhan revitalisasi dan aktualisasi Pancasila bagi pelajar SMA	259.421.500	214.717.350	82,77
7.5	Penyuluhan revitalisasi dan aktualisasi Pancasila bagi pelajar SMP	410.262.900	362.803.300	88,43
7.6	Rapat FKUB bersama tokoh lintas agama	73.408.760	-	0,00
8.	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	260.480.844	258.364.000	99,19
8.1	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	260.480.844	258.364.000	99,19
9.	Program pendidikan politik masyarakat	400.934.484	232.639.485	58,02
9.1	Penyuluhan kepada masyarakat	233.954.040	232.639.485	99,44
9.2	Fasilitasi komunikasi politik terhadap berbagai elemen masyarakat	166.980.444	-	0,00
10.	Program pembinaan ketaatan masyarakat	1.004.632.846	924.966.569	92,07
10.1	Pembinaan dan penyuluhan tentang ketentraman, ketertiban dan bela negara	304.331.276	236.955.507	77,86
10.2	Pemetaan sumber konflik	387.967.784	387.369.577	99,85
10.3	Penguatan kapasitas pemerintahan distrik dalam mencegah terjadinya konflik	312.333.786	300.641.485	96,26
11.	Belanja tidak langsung	4.192.230.400	3.063.423.976	73,07
11.1	Belanja pegawai	4.192.230.400	3.063.423.976	73,07
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		8.692.641.016	7.443.553.019	85,63
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	2.289.539.365	1.932.055.592	84,39



**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN ASMAT
TAHUN 2016**

No	Satuan Kerja	Anggaran	Realisasi	%
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	9.600.000	9.400.000	97,92
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	36.000.365	31.727.712	88,13
1.3	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	104.500.000	64.016.364	61,26
1.4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1.556.520.000	1.298.480.000	56,00
1.5	Penyediaan alat tulis kantor	45.500.000	45.500.000	83,42
1.6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	36.000.000	20.160.000	100,00
1.7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.000.000	8.000.000	80,00
1.8	Penyediaan bahan logistik kantor	80.902.000	80.902.000	100,00
1.9	Penyediaan makanan dan minuman	218.160.000	189.550.000	86,89
1.10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	192.357.000	184.319.500	95,82
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.707.607.668	1.699.845.000	99,55
2.1	Pembangunan gedung kantor	612.346.083	610.220.000	99,65
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100.000.000	100.000.000	100,00
2.3	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	407.727.273	407.100.000	99,85
2.4	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	63.000.000	63.000.000	100,00
2.5	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	267.500.000	262.500.000	98,13
2.6	Pemeliharaan rutin/berkala lapangan kantor	95.928.712	95.925.000	100,00
2.7	Pengadaan peralatan gedung kantor	161.105.600	161.100.000	100,00
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	255.636.335	254.300.000	99,48
3.1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	238.636.335	237.300.000	99,44
3.2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	17.000.000	17.000.000	100,00
4.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	93.000.000	92.941.000	99,94
4.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan	93.000.000	92.941.000	99,94
5.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1.081.610.000	1.027.249.490	94,97
5.1	Patroli terpadu dengan unsur TNI/Polri	263.150.000	260.150.000	98,86
5.2	Penertiban dan penindakan pelanggaran perda	420.060.000	402.299.490	95,77
5.3	Operasi miras	398.400.000	264.800.000	91,57
6.	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban	589.321.000	573.877.566	97,38
6.1	Pelatihan Hansip	490.560.000	490.413.566	99,97
6.2	Kegiatan HUT Satpol PP	98.761.000	83.464.000	84,51
7.	Belanja tidak langsung	2.675.926.648	1.863.283.680	66,63
6.1	Belanja pegawai	2.675.926.648	1.863.283.680	66,63
BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN		758.059.102.895	617.410.125.711	81,45
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		3.806.834.148	3.497.116.253	91,86
1.	Belanja tidak langsung	3.806.834.148	3.497.116.253	91,86
1.1	Belanja pegawai	3.806.834.148	3.497.116.253	91,86
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH		594.535.560	558.372.457	93,92
1.	Belanja tidak langsung	594.535.560	558.372.457	93,92
1.1	Belanja pegawai	594.535.560	558.372.457	93,92
SEKRETARIAT DAERAH		367.059.075.628	295.597.747.114	80,53
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	33.311.932.715	23.483.001.543	70,49
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	2.234.000.000	1.350.366.830	60,45
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	242.145.500	179.812.383	74,26
1.3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	80.000.000	25.267.600	31,58
1.4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	2.410.250.000	1.523.240.000	63,20
1.5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	48.601.590	32.030.387	65,90
1.6	penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	136.000.000	81.379.397	59,84
1.7	Penyediaan alat tulis kantor	460.966.159	440.839.000	95,63
1.8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	659.844.960	569.141.611	86,25
1.9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	19.200.000	16.995.259	88,52
1.10	Penyediaan bahan logistik kantor	873.200.000	611.101.802	69,68
1.11	Penyediaan makanan dan minuman	2.922.880.400	1.663.990.162	56,93
1.12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	15.446.537.000	10.372.384.619	67,15
1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, asisten sekda dan staf ahli bupati	5.200.971.106	4.666.079.068	89,72
1.14	Penerbitan buletin warta daerah	1.448.600.000	953.510.225	65,82



**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN ASMAT
TAHUN 2016**

No	Satuan Kerja	Anggaran	Realisasi	%
	1.15 Pendataan dan monitoring pelajar dan mahasiswa di berbagai kota studi	332.950.000	223.170.400	67,03
	1.16 Pendampingan penyaluran dana bantuan studi pelajar dan mahasiswa	795.786.000	773.692.800	97,22
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	15.648.713.362	11.186.403.387	71,48
	2.1 Pembangunan rumah jabatan	748.074.000	695.700.000	93,00
	2.2 Pembangunan gedung kantor	614.350.000	539.200.000	87,77
	2.3 Pengadaan kendaraan dinas/operasional	5.013.181.819	3.290.700.000	65,64
	2.4 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	1.493.401.660	1.482.700.000	99,28
	2.5 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1.807.656.500	1.618.100.000	89,51
	2.6 Pengadaan peralatan gedung kantor	1.132.439.663	905.348.930	79,95
	2.7 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	553.157.000	447.844.477	80,96
	2.8 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	216.400.000	102.168.460	47,21
	2.9 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	450.000.000	330.783.573	73,51
	2.10 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	69.000.000	67.317.018	97,56
	2.11 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	51.053.000	-	0,00
	2.12 Pengadaan tanah pemda	3.500.000.000	1.706.540.929	48,76
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	600.550.000	547.544.648	91,17
	3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	329.000.000	327.778.000	99,63
	3.2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	271.500.000	219.766.648	80,93
4.	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	2.000.000.000	1.200.760.000	60,04
	4.1 Pemulangan pegawai yang pensiun	500.000.000	490.000.000	98,00
	4.2 Pemindahtugasan PNS	1.500.000.000	710.760.000	47,38
5.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	8.129.256.650	7.213.143.662	88,73
	5.1 Operasional kehumasan dan protokoler	1.293.789.000	1.094.319.812	84,58
	5.2 Pengadaan perlengkapan asrama pelajar/mahasiswa	6.835.467.650	6.118.823.850	89,52
6.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	259.214.000	168.300.000	64,93
	6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan	98.000.000	50.000.000	51,02
	6.2 Penyusunan SAKIP Kabupaten	161.214.000	118.300.000	73,38
7.	Program pengembangan kapasitas daerah	9.178.744.000	3.262.627.920	35,55
	7.1 Penataan roda pemerintahan	9.178.744.000	3.262.627.920	35,55
8.	Program penguatan kapasitas kelembagaan organisasi	1.259.350.000	880.845.000	69,94
	8.1 Penyusunan naskah analisis jabatan OPD dan pendataan penyusunan DUK/Nominatif setda dan distrik	445.980.000	366.775.000	82,24
	8.2 Penyusunan SOP	192.750.000	192.300.000	99,77
	8.3 Penyusunan SPM	298.850.000	-	0,00
	8.4 Sosialisasi SKP	321.770.000	321.770.000	100,00
9.	Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	75.826.723.725	57.391.565.164	75,69
	9.1 Dialog/audiens dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	29.248.380.000	17.260.594.171	59,01
	9.2 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/kementerian/LPNK/luar negeri	6.098.756.000	5.005.729.728	82,08
	9.3 Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda)	2.160.000.000	2.123.020.000	98,29
	9.4 Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah	6.000.000.000	5.950.820.000	99,18
	9.5 Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah	10.888.900.000	8.149.880.865	74,85
	9.6 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah lainnya	10.972.087.725	10.287.400.000	93,76
	9.7 Peningkatan tugas-tugas pemerintahan umum dan stabilitas daerah	10.458.600.000	8.614.120.400	82,36
10.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	9.146.303.136	8.429.783.491	92,17
	10.1 Penyusunan standar satuan harga	46.418.000	-	0,00
	10.2 Penyusunan raperda APBD	751.821.000	523.089.200	69,58
	10.3 Penyusunan raperda dan perbup perubahan APBD	620.658.661	610.402.661	98,35
	10.4 Penyusunan raperda dan perbup pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	742.726.775	726.064.500	97,76
	10.5 Penyusunan raperda dan perbup APBD tahun selanjutnya	15.981.000	15.981.000	100,00
	10.6 Pendataan, penilaian dan penghapusan aset pemda	4.484.700	-	0,00
	10.7 Sosialisasi pengelolaan keuangan daerah	3.349.433.000	3.039.395.470	90,74



**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN ASMAT
TAHUN 2016**

No	Satuan Kerja	Anggaran	Realisasi	%
	10.8 Rapat kerja kepala kampung dan aparat kampung, bamuskam dan sosialisasi dana desa	3.614.780.000	3.514.850.660	97,24
11.	Program penataan peraturan perundang-undangan	2.625.911.408	2.364.103.813	90,03
	11.1 Pembuatan raperda	282.624.0000	277.218.000	98,09
	11.2 Penyuluhan hukum	2.059.558.294	1.907.604.299	92,62
	11.3 Penyusunan raperda dan perbup	283.729.114	179.281.514	63,19
12.	Belanja tidak langsung	209.123.279.052	179.418.765.786	85,80
	12.1 Belanja pegawai	209.123.279.052	179.418.765.786	85,80
	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	71.674.162.851	62.360.110.092	87,01
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	10.684.439.420	7.595.169.497	71,09
	1.1 Penyediaan jasa surat menyurat	1.093.000.000	919.000.000	84,08
	1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	684.300.000	61.353.003	8,97
	1.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan	2.029.440.000	1.979.040.000	97,52
	1.4 Penyediaan jasa kebersihan kantor	25.000.000	25.000.000	100,00
	1.5 Penyediaan alat tulis kantor	318.002.420	317.674.661	99,90
	1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	199.160.000	198.206.823	99,52
	1.7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	50.100.000	50.099.950	100,00
	1.8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	56.000.000	43.500.000	77,68
	1.9 Penyediaan bahan logistik kantor	439.000.000	342.936.000	78,12
	1.10 Penyediaan makanan dan minuman	385.990.000	375.293.200	97,23
	1.11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	5.255.242.000	3.133.860.860	59,63
	1.12 Penyediaan jasa pengamanan kantor	72.000.000	72.000.000	100,00
	1.13 Penyediaan jasa dokumentasi/publikasi	77.205.000	77.205.000	100,00
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	18.664.345.000	18.087.826.500	96,91
	2.1 Pembangunan gedung kantor	6.745.510.000	6.738.200.000	99,89
	2.2 Pengadaan kendaraan dinas/operasional	2.076.000.000	1.650.800.000	79,52
	2.3 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	180.000.000	180.000.000	100,00
	2.4 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1.017.000.000	955.500.000	93,95
	2.5 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	2.789.950.000	2.788.350.000	99,94
	2.6 Pengadaan peralatan gedung kantor	1.662.945.000	1.630.850.000	98,07
	2.7 Penyediaan sarana dan prasarana rumah tangga Pimpinan dan Anggota DPRD	2.832.240.000	2.808.426.500	99,16
	2.8 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	255.000.000	255.000.000	
	2.9 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	70.000.000	70.000.000	100,00
	2.10 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	825.000.000	825.000.000	100,00
	2.11 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	210.700.000	185.700.000	100,00
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	373.250.000	373.250.000	100,00
	3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	341.250.000	341.250.000	100,00
	3.2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	32.000.000	32.000.000	100,00
4.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	98.000.000	95.662.500	97,61
	4.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan	98.000.000	95.662.500	97,61
5.	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	26.498.736.000	31.724.768.775	86,92
	5.1 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintahan daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	5.022.500.000	3.390.477.600	67,51
	5.2 Rapat-rapat paripurna	5.643.028.000	3.958.309.080	70,15
	5.3 Reses	5.772.275.000	5.744.875.000	99,53
	5.4 kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	7.062.825.000	6.725.269.000	95,22
	5.5 Sosialisasi peraturan perundang-undangan	2.105.290.000	2.002.950.100	95,14
	5.6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Fraksi DPRD	2.443.318.000	1.717.012.995	70,27
	5.7 Monitoring/pengawasan pelaksanaan APBD	8.449.500.000	8.185.775.000	96,88
6.	Belanja tidak langsung	5.355.392.431	4.483.432.820	83,72
	6.1 Belanja pegawai	5.355.392.431	4.483.432.820	83,72
	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	201.762.776.903	158.481.881.155	78,55
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	4.063.576.107	2.791.381.274	68,69
	1.1 Penyediaan jasa surat menyurat	112.000.000	87.274.039	77,29
	1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	126.077.500	117.642.476	93,31



**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN ASMAT
TAHUN 2016**

No	Satuan Kerja	Anggaran	Realisasi	%
	1.3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	95.000.000	58.079.197	61,14
	1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan	1.131.450.000	932.555.000	82,42
	1.5 Penyediaan alat tulis kantor	202.182.688	193.251.255	95,58
	1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	163.521.369	160.746.880	98,30
	1.7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	601.050.000	593.803.000	98,79
	1.8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	16.000.000	-	0,00
	1.9 Penyediaan bahan logistik kantor	307.213.550	53.822.938	17,52
	1.10 Penyediaan makanan dan minuman	77.936.000	76.124.285	97,68
	1.11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	1.231.145.000	518.082.204	42,08
	2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2.006.458.859	1.487.156.912	74,12
	2.1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional	30.000.000	-	0,00
	2.2 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	234.000.000	233.262.600	99,68
	2.3 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1.063.758.359	700.929.700	65,89
	2.4 Pengadaan peralatan gedung kantor	553.700.500	505.807.625	91,35
	2.5 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	80.000.000	27.362.487	34,20
	2.6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	45.000.000	19.794.500	43,99
	3. Program peningkatan disiplin aparatur	208.000.000	206.042.375	99,06
	3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	136.500.000	135.447.000	98,73
	3.2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	71.500.000	70.595.375	37,22
	4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	255.130.760	94.949.420	37,22
	4.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan	98.000.000	94.949.420	98,69
	4.2 Penyusunan laporan realisasi pendapatan daerah dan pembuatan daftar tunggakan serta pendistribusian laporan	157.130.760	-	0,00
	5. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan pendapatan daerah	551.352.344	178.236.833	32,33
	5.1 Pemetaan dan pendataan PBB oleh KP PBB dan Dispenda di 4 distrik	193.480.109	-	0,00
	5.2 Penyuluhan pajak dan retribusi daerah serta pajak bumi dan bangunan di 5 distrik	357.872.235	178.236.833	49,80
	6. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	19.144.892.616	12.331.844.653	64,41
	6.1 Pengembangan sistem (software) PBB-P2 berbasis SISMIO	405.650.000	372.720.000	91,88
	6.2 Penyusunan standar satuan harga	606.885.000	470.364.000	77,50
	6.3 Penyusunan raperda tentang APBD	1.283.239.116	1.174.343.886	91,51
	6.4 Penyusunan raperda dan perbup perubahan APBD	819.728.000	747.290.169	91,16
	6.5 Penyusunan raperda dan perbup pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	710.848.500	532.429.600	74,90
	6.6 Penyusunan raperda dan perbup APBD tahun selanjutnya	886.670.000	589.565.122	66,49
	6.7 Pendampingan penyusunan inventarisasi aset dan pemeliharaan hardware	999.050.000	677.429.090	67,81
	6.8 Pendataan, penilaian dan penghapusan aset penda	390.000.000	94.396.150	24,20
	6.9 Sensus dan pemasangan plat nomor barang dan pengecekan KIR SKPD	78.250.000	800.000	1,02
	6.10 Sosialisasi pengelolaan keuangan daerah	3.026.396.000	935.118.305	30,90
	6.11 Pendaftaran dan pendataan subyek/obyek pajak dan retribusi daerah dan penagihan di 19 distrik	1.723.101.000	521.420.672	30,26
	6.12 Penerbitan dan penyampaian SKPD dan SKRD (pajak reklame, pajak restoran, pajak hotel dan retribusi surat ijin usaha)	309.305.000	247.177.728	79,91
	6.13 Penyortiran dan penyampaian SPPT PBB serta monitoring penyampaian SPPT PBB	190.580.000	-	0,00
	6.14 Penagihan pajak dan retribusi	844.640.000	80.052.727	9,48
	6.15 Pengadaan, pendampingan implementasi pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi	1.057.650.000	1.009.097.500	95,41
	6.16 Pengadaan perangkat komputer dan pemeliharaan hardware networking sistem tahun anggaran	2.052.400.000	1.896.412.500	92,40
	6.17 Pendampingan, pemeliharaan dan pengembangan SIMAKDA, SIMKASDA dan SIMGAJI	1.854.850.000	1.491.966.629	80,44
	6.18 Pendampingan penyusunan laporan berbasis akrual dan pemeliharaan serta pengembangan sistem	1.905.650.000	1.491.230.575	78,25
	7. Belanja tidak langsung	175.533.366.217	141.392.269.688	80,55
	7.1 Belanja pegawai	175.533.366.217	141.392.269.688	80,55



**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN ASMAT
TAHUN 2016**

No	Satuan Kerja	Anggaran	Realisasi	%
INSPEKTORAT		13.738.343.970	10.203.165.406	74,27
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	868.741.218	728.235.821	83,83
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	10.000.000	9.708.182	97,08
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	50.400.000	46.464.786	92,19
1.3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	30.000.000	29.902.091	99,67
1.4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	143.900.000	143.900.000	100,00
1.5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	6.467.784	6.459.143	99,87
1.6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	76.500.000	76.174.314	99,57
1.7	Penyediaan alat tulis kantor	99.108.727	99.100.000	99,99
1.8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	66.075.707	63.490.941	96,09
1.9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	47.460.000	47.431.364	99,94
1.10	Penyediaan bahan logistik kantor	80.735.000	80.735.000	100,00
1.11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	258.094.000	124.870.000	43,38
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	241.739.000	235.325.000	97,35
2.1	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	87.000.000	87.000.000	100,00
2.2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	97.800.000	93.000.000	95,09
2.3	Pengadaan peralatan gedung kantor	56.939.000	55.325.000	97,17
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	66.250.000	66.250.000	100,00
3.1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	50.750.000	50.750.000	100,00
3.2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	15.500.000	15.500.000	100,00
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	422.572.000	340.727.550	80,63
4.1	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	422.572.000	340.727.550	80,63
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	88.000.000	87.915.647	99,90
5.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan	88.000.000	87.915.647	99,90
6.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	7.282.548.516	5.061.296.081	69,50
6.1	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	4.135.897.516	3.370.598.704	81,50
6.2	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	297.795.000	124.486.073	41,80
6.3	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	179.460.000	146.490.672	81,63
6.4	Tindak lanjut hasil temuan	286.650.000	239.998.600	83,73
6.5	Koordinasi pengawasan komprehensif	482.032.000	209.871.727	43,54
6.6	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	112.620.000	44.535.000	39,54
6.7	Monitoring pengawasan pembangunan	1.718.940.000	859.333.805	49,99
6.8	Sinergis pemeriksaan belanja modal yang putus kontrak tahun 2015 bersama BPKP	69.154.000	65.982.000	95,41
7.	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	506.815.000	375.587.400	74,11
7.1	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	506.815.000	375.587.400	74,11
8.	Belanja tidak langsung	4.261.678.236	3.307.827.907	77,62
8.1	Belanja pegawai	4.261.678.236	3.307.827.907	77,62
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		20.275.784.554	17.722.770.712	87,41
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	1.826.779.714	1.718.172.780	94,05
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	1.800.000	1.800.000	100,00
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	58.351.500	58.190.850	99,72
1.3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	487.800.000	473.400.000	97,05
1.4	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	55.000.000	46.569.000	84,67
1.5	Penyediaan alat tulis kantor	83.550.897	83.366.155	99,78
1.6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	222.359.317	222.220.728	99,94
1.7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	35.000.000	20.495.000	58,56
1.8	Penyediaan bahan logistik kantor	167.052.000	149.880.000	89,72
1.9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	715.866.000	662.251.047	92,51
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	229.676.432	224.220.250	97,62
2.1	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	114.000.000	113.999.970	99,99
2.2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	69.751.432	67.234.570	96,39
2.3	Pengadaan peralatan gedung kantor	10.925.000	10.925.000	100,00
2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	5.000.000	3.473.225	69,46
2.5	Pemeliharaan peralatan kerja	30.000.000	28.587.485	95,29



**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN ASMAT
TAHUN 2016**

No	Satuan Kerja	Anggaran	Realisasi	%
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	94.000.000	94.000.000	100,00
3.1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	66.500.000	66.500.000	100,00
3.2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	27.500.000	27.500.000	100,00
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	466.482.150	131.317.480	28,15
4.1	Sosialisasi (ASN, implementasi SKP dan e-PUPNS dan pengurusan taspen, pensiun)	466.482.150	131.317.480	28,15
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	98.000.000	97.591.850	99,58
5.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan	98.000.000	97.591.850	99,58
6.	Program pendidikan kedinasan	153.245.000	148.828.200	97,12
6.1	Rakornis, Dakor Kepegawaian dan Kediklatan	153.245.000	148.828.200	97,12
7.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	6.899.689.650	6.731.120.823	97,56
7.1	Pendidikan dan pelatihan prajabatan CPNS	5.041.452.500	5.001.358.774	99,20
7.2	Pengurusan Taspen dan Pensiun	206.574.000	163.670.000	79,23
7.3	Pengurusan Kartu Pegawai	156.403.150	146.639.828	93,76
7.4	Pengurusan Kenaikan Pangkat Pegawai	465.244.000	459.970.925	98,87
7.5	Pengurusan konversi NIP bar, penerbitan kartu pegawai elektronik (KPE) dan e-PUPNS	136.077.000	135.854.270	99,84
7.6	Ujian Dinas	47.899.000	31.440.680	65,24
7.7	Ujian Penyesuaian	46.985.000	13.257.000	28,22
7.8	Pelantikan sumpah janji PNS	134.000.000	113.968.478	85,05
7.9	Seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama	665.055.000	664.960.868	99,99
8.	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	5.632.828.054	4.713.187.643	83,67
8.1	biaya studi awal S1 dan S2 (semester I, pemondokan, transportasi)	500.500.000	400.500.000	80,02
8.2	Seleksi penerimaan calon PNSD	555.207.554	542.178.692	97,65
8.3	Monitoring PNS tugas belajar	331.756.000	282.966.600	85,29
8.4	Biaya studi akhir, praktek dan pemulangan	1.177.500.000	927.500.000	78,77
8.5	Seleksi penerimaan mahasiswa IPDN	714.364.500	292.042.351	40,88
8.6	Tunjangan PNS tugas belajar (biaya triwulan D-3)	36.000.000	31.500.000	87,50
8.7	Tunjangan PNS tugas belajar (biaya triwulan S1 dan S2)	2.317.500.000	2.236.500.000	96,50
9.	Belanja tidak langsung	4.875.083.554	3.864.331.686	79,27
9.1	Belanja pegawai	4.875.083.554	3.864.331.686	79,27
DISTRIK		79.147.589.281	68.988.962.522	87,16
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	13.791.687.000	13.094.280.383	94,94
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	61.600.000	61.600.000	100,00
1.2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	585.000.000	569.544.000	97,36
1.3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1.829.400.000	1.639.400.000	89,61
1.4	Penyediaan alat tulis kantor	473.345.000	472.845.000	99,89
1.5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	112.000.000	92.000.000	82,14
1.6	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	157.500.000	157.500.000	100,00
1.7	Penyediaan bahan logistik kantor	1.356.840.000	1.356.195.600	99,95
1.8	Penyediaan makanan dan minuman	92.448.000	88.992.000	96,26
1.9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	861.074.000	500.233.238	58,09
1.10	Kunjungan kerja distrik ke kampung-kampung	8.262.380.000	8.155.970.545	98,71
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	18.241.525.716	16.692.892.270	91,51
2.1	Pembangunan rumah jabatan	2.481.280.000	2.249.770.000	90,67
2.2	Pembangunan rumah dinas	2.949.809.427	2.880.611.000	97,65
2.3	Pembangunan kantor kampung	8.481.362.800	7.745.150.000	91,32
2.4	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	2.043.181.819	2.039.350.000	99,81
2.5	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	99.000.000	99.000.000	100,00
2.6	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	504.551.670	352.051.670	69,78
2.7	Monitoring ke distrik	428.590.000	409.809.600	57,86
2.8	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	105.000.000	105.000.000	95,62
2.9	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	300.000.000	300.000.000	100,00
2.10	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	50.000.000	50.000.000	100,00
2.11	Rapat kerja kepala distrik			
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	933.815.000	913.695.000	97,85
3.1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	126.750.000	126.750.000	100,00
3.2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	807.065.000	786.945.000	97,51
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			
4.1	Sosialisasi dana desa	427.544.000	416.144.000	97,33



**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN ASMAT
TAHUN 2016**

No	Satuan Kerja	Anggaran	Realisasi	%
	4.2 Penyusunan data monografi distrik dan kampung	427.544.000	416.144.000	97,33
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	347.917.000	287.750.300	82,71
	5.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan	98.000.000	48.000.000	48,98
	5.2 Penyusunan LPPD	249.917.000	239.750.300	95,93
6.	Program peningkatan sarana dan prasarana distrik	249.262.000	207.053.500	83,07
	6.1 Pensertifikatan tanah secara massal	249.262.000	207.053.500	83,07
7.	Program penataan administrasi pemerintahan kelurahan dan kampung	800.000.000	-	0,00
	7.1 kajian akademik kelayakan pemekaran kabupaten	800.000.000	-	0,00
8.	Belanja tidak langsung	44.355.938.565	37.377.147.069	84,27
	8.1 Belanja pegawai	44.355.938.565	37.377.147.069	84,27
BIDANG PEMERINTAHAN DAN DESA		22.256.315.308	17.505.880.078	78,66
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG		22.256.315.308	17.505.880.078	78,66
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	2.257.307.802	1.941.203.576	77,15
	1.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	20.000.000	15.457.886	77,29
	1.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan	321.200.000	319.350.000	99,42
	1.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan	8.660.000	8.660.000	100,00
	1.3 Penyediaan alat tulis kantor	99.949.002	99.900.000	99,95
	1.4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	87.000.000	86.986.450	99,98
	1.5 Penyediaan bahan logistik kantor	110.902.800	106.669.570	96,18
	1.6 Penyediaan makanan dan minuman	12.579.000	12.578.500	100,00
	1.7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	947.609.715	688.642.000	72,67
	1.8 Kunjungan kerja distrik ke kampung-kampung	908.375.000	602.959.170	66,38
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	11.428.149.120	9.490.895.973	83,05
	2.1 Pembangunan rumah jabatan	4.976.939.300	4.353.659.370	87,48
	2.2 Pembangunan balai kampung	5.742.007.520	4.439.770.720	77,32
	2.3 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	48.000.000	48.000.000	100,00
	2.4 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	259.096.300	249.000.000	96,10
	2.5 Pengadaan peralatan gedung kantor	135.106.000	134.606.000	99,63
	2.6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	200.000.000	199.000.000	99,50
	2.7 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	67.000.000	66.859.883	99,79
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	41.000.000	41.000.000	100,00
	3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	28.000.000	28.000.000	100,00
	3.2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	13.000.000	13.000.000	100,00
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1.207.860.000	1.040.715.000	86,16
	4.1 Pendidikan dan pelatihan formal	1.207.860.000	1.040.715.000	86,16
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	93.000.000	93.000.000	100,00
	5.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan	93.000.000	93.000.000	100,00
6.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kampung	2.918.500.000	2.040.848.820	69,93
	6.1 Pemilihan dan pelantikan kepala kampung	2.918.500.000	2.040.848.820	69,93
7.	Program penataan administrasi pemerintahan kelurahan dan kampung	364.220.000	-	0,00
	7.1 Pemetaan batas wilayah administrasi kampung	364.220.000	-	0,00
8.	Belanja tidak langsung	3.946.278.386	2.599.248.994	65,87
	8.1 Belanja pegawai	3.946.278.386	2.599.248.994	65,87
BIDANG STATISTIK		3.417.845.240	2.752.362.579	80,53
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		3.417.845.240	2.752.362.579	80,53
1.	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	3.417.845.240	2.752.362.579	80,53
	1.1 Kajian pembangunan manusia dan profil penduduk miskin	354.650.000	354.648.841	100,00
	1.2 Penyusunan data strategis dan laporan perekonomian kabupaten	694.583.260	694.581.673	100,00
	1.3 Peningkatan sistem perencanaan pembangunan. Pengelolaan dan pelaporan	1.816.598.720	1.700.719.738	93,62
	1.4 Penyusunan data strategis	552.013.260	2.412.327	0,44



**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN ASMAT
TAHUN 2016**

No	Satuan Kerja	Anggaran	Realisasi	%
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		3.231.166.182	2.351.442.470	72,77
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		3.231.166.182	2.351.442.470	72,77
1.	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	2.568.236.182	2.059.759.770	80,20
1.1	Pengadaan tower tri angle	616.876.182	541.772.270	87,83
1.2	Peningkatan website kabupaten	1.951.360.000	1.517.987.500	77,79
2.	Program kerjasama informasi dengan media massa	662.930.000	291.682.700	44,40
2.1	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	662.930.000	291.682.700	44,40
URUSAN PILIHAN		125.426.341.612	107.832.206.067	85,97
BIDANG PERTANIAN		27.892.205.015	25.836.026.819	92,63
DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN		27.892.205.015	25.836.026.819	92,63
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	1.816.945.893	1.692.998.301	93,18
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	10.000.000	10.000.000	100,00
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	48.000.000	47.186.552	98,31
1.3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	68.472.237	68.464.625	99,99
1.4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	522.600.000	522.600.000	100,00
1.5	Penyediaan alat tulis kantor	158.058.101	158.058.101	100,00
1.6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	19.670.000	19.669.715	100,00
1.7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	43.000.000	42.243.000	98,24
1.8	Penyediaan bahan logistik kantor	86.265.675	83.925.000	97,29
1.9	Penyediaan makanan dan minuman	16.670.880	16.645.940	99,85
1.10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	844.209.000	724.205.368	85,79
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2.564.618.730	2.559.700.000	99,81
2.1	Pembangunan rumah jabatan/dinas	135.000.000	135.000.000	100,00
2.2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	61.000.000	61.000.000	100,00
2.3	Pengadaan peralatan gedung kantor	24.068.750	24.000.000	100,00
2.4	Pengadaan alat transportasi laut/sungai	2.344.549.980	2.399.700.000	99,79
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	110.750.000	110.596.000	99,86
3.1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	78.750.000	78.660.000	99,89
3.2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	32.000.000	31.936.000	99,80
4.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	98.000.000	97.752.100	99,75
4.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan	98.000.000	97.752.100	99,75
5.	Program peningkatan sumber daya petani	1.488.471.382	1.466.573.045	98,53
5.1	Pelatihan petani hortikultura	452.919.295	452.498.930	99,91
5.2	Pelatihan petani pelaku agribisnis	515.089.295	507.536.750	98,53
5.3	Pekan Daerah (PEDA) Pertanian	241.078.896	227.433.490	94,34
5.4	Pelatihan penanganan pasca panen dan penanganan alsintan	279.383.608	279.103.875	99,90
6.	Program peningkatan ketahanan pangan pertanian	4.505.393.001	4.474.509.115	99,31
6.1	Pelatihan petani bosakhi dan pestisida nabati	470.236.474	470.064.905	99,96
6.2	Pelatihan sumber pangan alternatif	378.350.000	378.064.975	99,92
6.3	Pengadaan benih sayuran	192.587.500	192.337.500	99,87
6.4	Pembukaan lahan baru	1.565.801.760	1.539.576.400	98,33
6.5	Optimasi lahan	894.210.000	892.233.300	99,78
6.6	Pengadaan bibit buah-buahan	444.250.000	443.750.000	99,89
6.7	Pelatihan desa mandiri pangan	461.680.230	461.412.035	99,94
6.8	Pembangunan kebun pembibitan	98.277.037	97.070.000	98,77
7.	Program peningkatan teknologi pertanian	645.702.950	545.301.710	84,45
7.1	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna	418.287.300	416.988.600	99,69
7.2	Pembuatan demplot	227.415.650	128.313.110	56,42
8.	Program peningkatan kesejahteraan penyuluh	2.519.272.176	2.386.980.585	94,75
8.1	Revitalisasi penyuluh pertanian	224.072.998	223.601.210	99,79
8.2	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian	2.114.378.718	2.000.687.725	94,62
8.3	Penyediaan biaya operasional kantor BPP	180.820.460	162.691.650	89,97
9.	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	424.189.482	317.701.500	74,90
9.1	Operasional vaksinasi dan pengobatan ternak	424.189.482	317.701.500	74,90
10.	Program peningkatan hasil produksi dan teknologi peternakan	1.685.140.478	1.681.877.355	99,81



**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN ASMAT
TAHUN 2016**

No	Satuan Kerja	Anggaran	Realisasi	%
	10.1 Pelatihan pengolahan bibit ternak	123.648.530	123.597.665	99,96
	10.2 Pengadaan bibit ternak	1.561.491.948	1.558.279.690	99,79
11.	Peningkatan kapasitas sumber daya peternak dan aparaturnya	923.049.436	728.110.500	78,88
	11.1 Pembinaan wadah kelompok tani dan wanita tani ternak	230.438.335	229.864.905	99,75
	11.2 Pelatihan budidaya ternak	226.396.008	226.372.815	99,99
	11.3 Pelatihan budidaya ayam kampung	284.367.976	271.872.780	95,61
	11.4 Peningkatan pengetahuan penyuluh peternakan	181.847.117	-	0,00
12.	Program peningkatan ketahanan pangan perkebunan	826.134.346	728.110.500	94,39
	12.1 Operasional kebun dinas	120.065.346	74.400.000	61,97
	12.2 Pengembangan tanaman sagu	706.069.000	705.402.010	99,91
13.	Program peningkatan sumber daya manusia bagi penyuluh	114.021.000	111.711.400	97,97
	13.1 Beasiswa bagi putra/i asmat	114.021.000	111.711.400	97,97
14.	Program peningkatan produksi pertanian	2.104.545.567	2.103.544.410	99,95
	14.1 Pengembangan tanaman kelapa	544.011.019	543.865.300	99,97
	14.2 Pengembangan tanaman kopi robusta	454.966.551	454.754.260	99,95
	14.3 Dem area budidaya tanaman kelapa	708.943.972	708.651.475	99,96
	14.4 Pelatihan tanaman sagu	396.624.025	396.273.375	99,91
15.	Program peningkatan sumber daya petani	430.412.011	384.397.950	89,31
	15.1 Pelatihan petani budidaya tanaman kelapa	373.856.011	348.663.750	93,26
	15.2 Sinkronisasi dan evaluasi program bidang perkebunan	56.556.000	35.734.200	63,18
16.	Belanja tidak langsung	7.635.558.563	6.394.470.838	83,75
	16.1 Belanja pegawai	7.635.558.563	6.394.470.838	83,75
	BIDANG KEHUTANAN	18.238.655.714	11.200.091.936	61,41
	DINAS KEHUTANAN	18.238.655.714	11.200.091.936	61,41
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	1.492.722.098	1.341.042.398	89,84
	1.1 Penyediaan jasa surat menyurat	29.750.000	19.601.650	65,89
	1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	21.600.000	21.407.300	99,11
	1.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan	303.000.000	276.242.000	91,17
	1.4 Penyediaan jasa kebersihan kantor	8.782.000	8.605.345	97,99
	1.5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	157.000.000	144.684.875	92,16
	1.6 Penyediaan alat tulis kantor	79.723.510	79.680.000	99,95
	1.7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	40.001.588	39.887.303	99,71
	1.8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.820.000	6.786.175	99,50
	1.9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	45.000.000	44.847.250	99,66
	1.10 Penyediaan bahan logistik kantor	80.890.000	80.824.000	99,92
	1.11 Penyediaan makanan dan minuman	13.158.000	13.129.300	99,78
	1.12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	706.997.000	605.347.200	85,82
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya	282.623.470	262.340.000	92,82
	2.1 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	159.000.000	157.940.000	99,33
	2.2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	63.000.000	54.400.000	86,35
	2.3 Pengadaan peralatan gedung kantor	60.623.470	50.000.000	82,48
3.	Program peningkatan disiplin aparaturnya	126.250.000	122.930.000	97,37
	3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	92.750.000	90.100.000	97,14
	3.2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	33.500.000	32.830.000	98,00
4.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	98.000.000	98.000.000	100,00
	4.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan	98.000.000	98.000.000	100,00
5.	Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	3.536.414.472	1.315.026.338	37,19
	5.1 Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB)	213.821.000	49.016.100	22,92
	5.2 Pelayanan perijinan kehutanan	179.046.000	102.765.000	57,40
	5.3 Pekan Daerah (PEDA)	499.948.660	411.414.000	82,29
	5.4 Pembangunan rumah mesin gudang tipe 48 m ²	199.521.812	-	0,00
	5.5 Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan hasil hutan mangrove	383.637.500	25.509.000	6,65
	5.6 Pelatihan teknik inokulasi patogen penyebab gaharu	752.413.000	484.952.800	64,45
	5.7 Pelatihan pemanfaatan tanaman obat tradisional	413.340.000	-	0,00



**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN ASMAT
TAHUN 2016**

No	Satuan Kerja	Anggaran	Realisasi	%
5.8	Pengembangan hasil hutan anggrek masyarakat	503.614.000	-	0,00
5.9	Pelatihan pemanfaatan hasil hutan sagu	391.072.500	241.369.438	61,72
6.	Program rehabilitasi hutan dan lahan	2.528.069.188	1.610.026.000	63,69
6.1	Budidaya tanaman unggulan (gaharu)	1.347.168.188	846.020.000	62,80
6.2	Penghijauan kota	466.450.000	368.291.000	78,96
6.3	Reboisasi dan pengkayaan jenis tegakan unggulan	392.230.000	331.910.000	84,62
6.4	Reboisasi/pengkayaan jenis tegakan unggulan gaharu	45.476.000	-	0,00
6.5	Reboisasi/pengkayaan jenis tegakan unggulan lokal sagu licin	276.745.000	63.805.000	23,06
7.	Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan	495.739.840	-	0,00
7.1	Pemantapan prakondisi kawasan hutan	495.739.840	-	0,00
8.	Program perencanaan dan pengembangan hutan	1.382.419.500	888.258.000	64,25
8.1	Pengembangan hutan masyarakat	881.530.000	837.570.000	95,01
8.2	Pembuatan kebun bibit unggulan tanaman kehutanan bernilai ekonomis (gaharu dan merbau)	500.889.500	50.688.000	10,12
9.	Program pemberdayaan polisi kehutanan	685.781.200	358.800.000	52,32
9.1	Patroli pengawasan dan pengamanan hutan dan hasil hutan	685.781.200	358.800.000	52,32
10.	Program perencanaan makro bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan	1.221.577.000	157.682.000	12,91
10.1	Penyusunan perwilayahan hutan dan daerah alih fungsi untuk non kegiatan kehutanan	1.221.577.000	157.682.000	12,91
11.	Program peningkatan tertib peredaran	289.953.000	243.335.000	83,92
11.1	Pemantauan peredaran hasil hutan kayu	289.953.000	243.335.000	83,92
12.	Program dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis	229.930.000	96.073.200	41,78
12.1	Evaluasi perencanaan dan program lintas sektor kehutanan	229.930.000	96.073.200	41,78
13.	Belanja tidak langsung	5.869.175.946	4.706.579.000	80,19
16.1	Belanja pegawai	5.869.175.946	4.706.579.000	80,19
BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		18.861.095.560	17.045.785.342	90,38
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI		18.861.095.560	17.045.785.342	90,38
1.	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	49.988.000	27.176.000	54,37
1.1	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi mengenai ketenagalistrikan dan pertambangan	49.988.000	27.176.000	54,37
2.	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	18.374.197.560	16.953.415.322	92,27
2.1	Pengadaan BBM dan operasional PLTD Agats	14.875.648.000	13.709.741.817	92,16
2.2	Pendataan monitoring dan instalasi ulang PLTS	46.140.000	24.542.220	53,19
2.3	Pembangunan PLTS terpusat	3.452.409.560	3.219.131.285	93,24
3.	Program monitoring dan pengendalian bidang perijinan	359.040.000	65.194.020	18,16
3.1	Tim pemantauan BBM bersubsidi	359.040.000	65.194.020	18,16
4.	Program pembinaan dan pengembangan bidang geologi	77.780.000	-	0,00
4.1	Pendidikan dan pelatihan formal	77.780.000	-	0,00
BIDANG PARIWISATA		7.829.118.365	7.553.888.191	96,48
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		7.829.118.365	7.553.888.191	96,48
1.	Program pengembangan pemasaran pariwisata	1.574.961.000	1.535.849.400	97,52
1.1	Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran obyek wisata	1.034.360.000	1.009.146.750	97,56
1.2	Kegiatan pelaksanaan promosi pariwisata nusantara	334.456.000	324.736.000	97,09
1.3	Pelatihan pemandu wisata	206.145.000	201.966.650	97,97
2.	Program pengembangan destinasi pariwisata	2.432.887.082	2.222.847.391	91,37
2.1	Pengembangan obyek pariwisata unggulan	255.645.000	169.489.091	66,30
2.2	Pengembangan daerah tujuan wisata	944.790.000	829.122.800	87,76
2.3	Pelaksanaan koordinasi pembangunan obyek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha	46.070.000	46.070.000	100,00
2.4	Penyusunan buku Ripda dan Perda Ripka	331.936.000	324.165.500	97,66
2.5	Pengadaan sarana dan prasarana pariwisata	854.446.082	854.000.000	99,95
3.	Program pengembangan kemitraan	3.821.270.283	3.795.191.400	99,32
3.1	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	412.915.000	412.714.000	99,95



**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN ASMAT
TAHUN 2016**

No	Satuan Kerja	Anggaran	Realisasi	%
	3.2 Pembangunan sarana dan prasarana budaya	3.076.088.283	3.068.715.000	99,76
	3.3 Pemilihan putra/i pariwisata kabupaten	332.267.000	313.762.400	94,43
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	32.966.747.439	28.991.705.143	87,94
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	32.966.747.439	28.991.705.143	87,94
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	3.069.832.000	2.505.309.769	81,61
	1.1 Penyediaan jasa surat menyurat	22.500.000	22.496.425	99,98
	1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	97.000.000	46.260.314	47,69
	1.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan	826.600.000	695.506.667	84,14
	1.4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	101.025.000	76.937.000	76,16
	1.5 Penyediaan alat tulis kantor	113.500.000	113.500.000	100,00
	1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	54.000.000	53.999.456	100,00
	1.7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	56.000.000	48.800.000	87,14
	1.8 Penyediaan bahan logistik kantor	85.500.000	85.500.000	100,00
	1.9 Penyediaan makanan dan minuman	18.900.000	18.891.200	99,95
	1.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	1.694.807.000	1.343.418.707	79,27
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	984.105.166	952.982.000	96,84
	2.1 Pembangunan gedung kantor	179.214.650	174.900.000	97,59
	2.2 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	168.000.000	168.000.000	100,00
	2.3 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	94.900.000	76.800.000	80,93
	2.4 Pengadaan peralatan gedung kantor	166.955.516	166.950.000	99,99
	2.5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	375.035.000	366.332.000	97,68
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	140.000.000	140.000.000	100,00
	3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	98.000.000	98.000.000	100,00
	3.2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	42.000.000	42.000.000	100,00
4.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	98.000.000	97.919.030	99,92
	4.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan	98.000.000	97.919.030	99,92
5.	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	2.333.807.500	1.845.961.895	79,10
	5.1 Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir	504.720.000	497.949.447	98,66
	5.2 Pemberdayaan wanita nelayan	274.350.000	-	0,00
	5.3 Pendampingan masyarakat pesisir	1.554.737.500	1.348.012.448	86,70
6.	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan	139.989.500	-	0,00
	6.1 Pembinaan, penggalangan dan pergerakan kelompok pengawas (Pokmaswas)	139.989.500	-	0,00
7.	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan	748.296.500	681.621.960	91,09
	7.1 Patroli pengawasan ikan di perairan laut	205.108.500	205.096.600	99,99
	7.2 Pengawasan pengangkutan distribusi dan pemasaran hasil perikanan	294.285.000	231.091.470	78,53
	7.3 Pengawasan penangkapan ikan di perairan umum	248.903.000	245.433.890	98,61
8.	Program pengembangan budidaya perikanan	1.730.111.000	1.438.706.142	83,16
	8.1 Pelatihan pengolahan ikan	749.440.000	628.450.822	83,86
	8.2 Pelatihan teknik budidaya ikan	530.011.000	507.115.000	95,68
	8.3 Pendampingan teknis usaha kelompok penangkapan ikan	450.660.000	303.140.320	67,27
9.	Program optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan	434.927.000	402.033.878	92,44
	9.1 Pekan Daerah (PEDA)	434.927.000	402.033.878	92,44
10.	Program pengembangan basis industri perikanan dan kelautan	1.183.884.000	888.709.468	75,07
	10.1 Penataan kawasan daerah kerja dan pengoperasian PPI Omor	1.033.238.000	807.098.968	78,11
	10.2 Operasional syahbandar di pelabuhan perikanan	141.350.000	81.610.500	57,74
	10.3 Inspeksi bongkar muat ikan di pelabuhan perikanan	9.296.000	-	0,00
11.	Program peningkatan prasarana dan sarana produksi SDKP	14.824.715.000	14.757.860.180	99,55
	11.1 Peningkatan produksi hasil perikanan	832.890.000	796.880.000	95,68
	11.2 Kaji terap budidaya ikan nila merah	125.754.600	118.516.280	94,24
	11.3 Pengadaan bibit ikan nila dan bandeng	500.000.000	495.000.000	99,00



**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN ASMAT
TAHUN 2016**

No	Satuan Kerja	Anggaran	Realisasi	%
	11.4 Pengadaan sarana dan prasarana penangkapan ikan	13.366.070.400	13.347.463.900	99,86
12.	Program peningkatan kapasitas SDM aparatur dan nelayan	474.540.000	250.637.068	52,82
	12.1 Pembinaan kelompok usaha pengolahan ikan	262.130.000	99.470.005	37,95
	12.2 Temu usaha kelompok pengolahan hasil perikanan	156.175.000	151.167.063	96,79
	12.3 Sosialisasi tentang Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI)	56.235.000	-	0,00
13.	Program pengembangan data dan informasi kelautan dan perikanan	371.021.000	-	0,00
	13.1 Identifikasi rumah tangga perikanan serta perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan	371.021.000	-	0,00
14.	Belanja tidak langsung	6.341.935.773	5.016.457.753	79,10
	14.1 Belanja pegawai	6.341.935.773	5.016.457.753	79,10
BIDANG PERDAGANGAN		18.934.259.519	16.574.598.490	87,54
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI		18.934.259.519	16.574.598.490	87,54
1.	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	4.958.413.700	4.193.743.990	84,58
	1.1 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	577.568.000	351.248.340	60,82
	1.2 Penerbitan ijin usaha dan sidang tera alat ukur, alat takar dan alat timbang	407.134.000	175.770.000	43,17
	1.3 Pembangunan pasar	3.973.711.700	3.666.725.000	92,27
2.	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	8.273.867.000	7.756.713.350	93,75
	2.1 Pemantauan 9 bahan pokok barang penting dan barang kebutuhan lainnya	454.000.000	166.484.670	36,67
	2.2 Tim pemantauan raskin	592.432.000	362.793.680	61,24
	2.3 Distribusi raskin	7.227.435.000	7.227.435.000	100,00
3.	Belanja tidak langsung	5.701.978.819	4.624.141.150	81,10
	3.1 Belanja pegawai	5.701.978.819	4.624.141.150	81,10
BIDANG INDUSTRI		704.260.000	630.110.146	89,47
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI		704.260.000	630.110.146	89,47
1.	Program inventarisasi dan pemantauan sumber daya mineral	110.100.000	105.577.486	95,89
	1.1 Pelatihan pembuatan minyak kelapa	110.100.000	105.577.486	95,89
2.	Program pengembangan industri kecil menengah	594.160.000	524.532.660	88,28
	2.1 Pelatihan pembuatan ikan asin	239.400.000	238.316.225	99,55
	2.2 Pengadaan mesin parut kulit lawang	64.680.000	-	0,00
	2.3 Pelatihan pengolahan sagu	290.080.000	286.216.435	98,67

Sumber :

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2017



BAB IV PENUTUP

Demikian laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten Asmat Tahun 2016 yang berisi tentang capaian indikator makro, indikator kinerja utama dan indikator sasaran sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan dan/atau kegagalan terhadap pelaksanaan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Asmat Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 13 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Asmat Tahun 2016-2021, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Asmat Nomor 40 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Asmat Tahun 2016-2021.

Rata-rata capaian kinerja dari 15 sasaran dan 111 indikator kinerja di tahun 2016 adalah sebesar 83,99% dengan kategori BAIK. Pencapaian kinerja paling tinggi adalah pada Misi 1 dengan rata-rata capaian kinerjanya sebesar 96,62% dengan kategori BAIK. Kemudian diikuti oleh pencapaian kinerja pada Misi 3 dengan rata-rata capaian kinerjanya adalah sebesar 87,73% dengan kategori BAIK. Pencapaian ketiga adalah pada Misi 4 dengan rata-rata capaian kinerjanya adalah sebesar 86,86% dengan kategori BAIK. Pencapaian keempat adalah pada Misi 2 dengan rata-rata capaian kinerjanya adalah sebesar 83,95% dengan kategori BAIK. Pencapaian kelima adalah pada Misi 5 dengan rata-rata capaian kinerjanya adalah sebesar 77,52% dengan kategori CUKUP, dan pencapaian keenam adalah pada Misi 6 dengan rata-rata capaian kinerjanya adalah sebesar 72,06% dengan kategori CUKUP.

Pendapatan daerah tahun 2016 adalah sebesar Rp. 1.501.875.953.059,94, yang terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp. 54.112.352.857,94, dana perimbangan sebesar Rp. 1.312.027.747.271,00 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 135.735.852.931,00. Adapun belanja di tahun 2016 sebesar 1.221.931.012.465,00 yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 1.221.931.012.465,00, belanja modal sebesar Rp. 367.882.691.736,00, belanja tak terduga sebesar Rp. 64.374.546,00 dan transfer bantuan keuangan sebesar Rp. 229.104.152.242,00 serta pembiayaan daerah sebesar Rp. 242.038.907.065,00.



Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian kinerja sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan di tahun 2016 antara lain;

- ✓ Tidak adanya *Blue Print Grand Design* di semua urusan pemerintahan yang menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten;
- ✓ Tidak adanya analisis yang jelas terhadap rencana kebutuhan jumlah dan spesifikasi sumber daya manusia di setiap satuan kerja sehingga menyebabkan belum memadainya ketersediaan dan kapasitas SDM yang handal;
- ✓ Belum diterapkan standar pelayanan minimal yang dikeluarkan oleh kementerian masing-masing yang harus dilaksanakan oleh setiap satuan kerja yang ada di kabupaten sehingga kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja skpd menjadi tidak fokus;
- ✓ Kondisi geografis daerah yang berupa rawa-rawa menyebabkan satu-satunya sarana transportasi yang dapat menjangkau hingga ke pelosok kabupaten adalah sarana transportasi air sehingga berdampak terhadap tingginya biaya operasional yang dikeluarkan oleh setiap satuan kerja yang akan melakukan pelayanan, pembinaan dan pendampingan bagi masyarakat di kampung-kampung;
- ✓ Program dan kegiatan di setiap satuan kerja belum mengarah pada pencapaian sasaran sebagaimana yang tertuang dalam indikator kinerja utama;
- ✓ Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antar satuan kerja perangkat daerah;
- ✓ Rendahnya kualitas sumber daya manusia terutama di satuan kerja perangkat daerah yang bersifat teknis dalam memberikan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat;
- ✓ Belum tersedianya database data yang valid dan akurat di setiap satuan kerja menyebabkan ketersediaan data masih bersifat manual dan diperparah dengan rendahnya kesadaran satuan kerja untuk menyimpan dan memperbaharui data yang ada di masing-masing satuan kerja;
- ✓ Kurang optimalnya pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat sehingga tujuan dari kegiatan tidak tercapai;
- ✓ Belum fokusnya program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas sehingga menyebabkan rendahnya pencapaian kinerja terhadap sasaran strategis;

Langkah perbaikan yang harus dilaksanakan di tahun yang akan datang sebagai berikut;

- ✓ Ketersediaan *Blue Print Grand Design* di semua urusan pemerintahan yang menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten;



- ✓ Setiap satuan kerja perangkat daerah harus segera mengkaji dan menganalisis rencana kebutuhan jumlah dan spesifikasi sumber daya manusia di masing-masing unit kerjanya;
- ✓ Penerapan standar pelayanan minimal yang dikeluarkan oleh kementerian masing-masing yang harus dilaksanakan oleh setiap satuan kerja yang ada di kabupaten sehingga kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja skpd menjadi lebih fokus;
- ✓ Tim Anggaran Pemerintah Daerah harus lebih fokus dalam mengkaji, menelaah, menganalisis dan mengevaluasi setiap usulan program dan kegiatan yang disampaikan oleh setiap satuan kerja sehingga lebih terarah dan terukur dalam pencapaian sasaran sebagaimana yang tertuang dalam indikator kinerja utama;
- ✓ Peningkatan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi antar satuan kerja perangkat daerah sehingga perencanaan terhadap program dan kegiatan yang ada di setiap satuan kerja lebih terarah;
- ✓ Peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama di satuan kerja perangkat daerah yang bersifat teknis dalam memberikan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat;
- ✓ Penerapan database data manual maupun data elektronik yang valid dan akurat di setiap satuan kerja sehingga perencanaan program dan kegiatan mengacu pada data yang disajikan;
- ✓ Satuan kerja harus lebih intens dan lebih optimal dalam rangka memberikan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat sehingga sasaran dari kegiatan dapat tercapai bukan hanya sekedar menyelenggarakan kegiatan tanpa menganalisis, mengevaluasi dan mencari solusi untuk langkah selanjutnya yang harus dilaksanakan;
- ✓ Program dan kegiatan harus lebih fokus agar pencapaian kinerja terhadap sasaran strategis yang tertuang dalam dokumen indikator kinerja utama yang harus dicapai oleh skpd penanggungjawab.

Sebagai sebuah gambaran terhadap pencapaian kinerja oleh Pemerintah Kabupaten Asmat di tahun 2016 ini, kami menyadari SAKIP ini masih jauh dari kata sempurna oleh karenanya kami sangat mengharapkan saran, masukan serta kritikan guna penyempurnaan penyusunannya di tahun-tahun yang akan datang.

Semoga SAKIP ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi dan pedoman dalam meningkatkan kinerja setiap satuan kerja perangkat daerah yang ada di Kabupaten Asmat di masa mendatang sehingga memberikan kontribusi yang nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di kabupaten Asmat.